



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN JAWA TENGAH
TAHUN 2017**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN JAWA TENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT, atas berkat dan rahmat-Nya Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah, telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Kepala LPMP Jawa Tengah, atas pelaksanaan tugas dan fungsinya menopang tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyelenggarakan program pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan, dan Penjaminan Mutu Pendidikan, sebagaimana diatur dalam Permendikbud no. 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP Sumatera Barat, LPMP Jawa Tengah dan LPMP Sulawesi Selatan yang diperkuat dengan rincian tugas LPMP.

Laporan ini menyajikan target dan capaian kinerja LPMP Jawa Tengah tahun 2017, yang meliputi kinerja atas kegiatan yang terkait dengan kegiatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : 1) Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah, 2) Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan, 3) Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam menjamin mutu pendidikan, 4) Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional, 5) Pengembangan dan Pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional, 6) Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah, 7) Pelaksanaan urusan administrasi LPMP. Ketujuh kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari tujuan strategis LPMP Jawa Tengah dan telah melaksanakan berbagai programnya guna merealisasikan target penjaminan mutu pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja LPMP Jawa Tengah tahun 2017, serta Rencana Strategis LPMP Jawa Tengah tahun 2015 – 2019. Untuk masing-masing program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja, sehingga evaluasi terhadap capaian kinerja menjadi jelas, terukur dan akuntabel.

Target hasil secara umum dari program LPMP Jawa Tengah tahun anggaran 2017 berhasil dicapai dengan baik, bahkan untuk beberapa indikator kinerja target dapat tercapai secara signifikan.

Sejalan dengan itu, penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik juga telah menunjukkan kinerja yang cukup signifikan melalui implementasi penguatan sistem manajemen mutu dan prosedur perencanaan, koordinasi, pengelolaan anggaran, pengelolaan barang milik negara (BMN), kepegawaian, kerumahtanggaan serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam upaya percepatan pencapaian target beberapa program telah menempuh berbagai langkah terobosan berdasarkan amanat undang-undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan undang-undang no 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen, peraturan pemerintah no. 74 tahun 2008 tentang guru dan Permendiknas no. 3 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang terbukti cukup efektif dalam mendorong kinerja seluruh jajaran LPMP Jawa Tengah berperan secara aktif.

Di pihak lain, LPMP Jawa Tengah menyadari bahwa tantangan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di tingkat provinsi masih cukup banyak dan memerlukan kerja keras pada tahun-tahun mendatang. Diharapkan, dukungan semua pihak dalam menjawab tantangan yang masih harus ditangani sebagaimana ditargetkan, yang pada saatnya akan dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja LPMP Jawa Tengah selama tahun 2017. Selain itu, Laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan peningkatan penjaminan mutu pendidikan serta peningkatan mutu PTK pada tahun mendatang. Akhirnya kepada Semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, kami sampaikan terimakasih.

Semarang, 25 Januari 2018
Kepala LPMP Jawa Tengah

Drs. Harmanto, M.Si
NIP. 19600105 198503 1 004



DAFTAR ISI

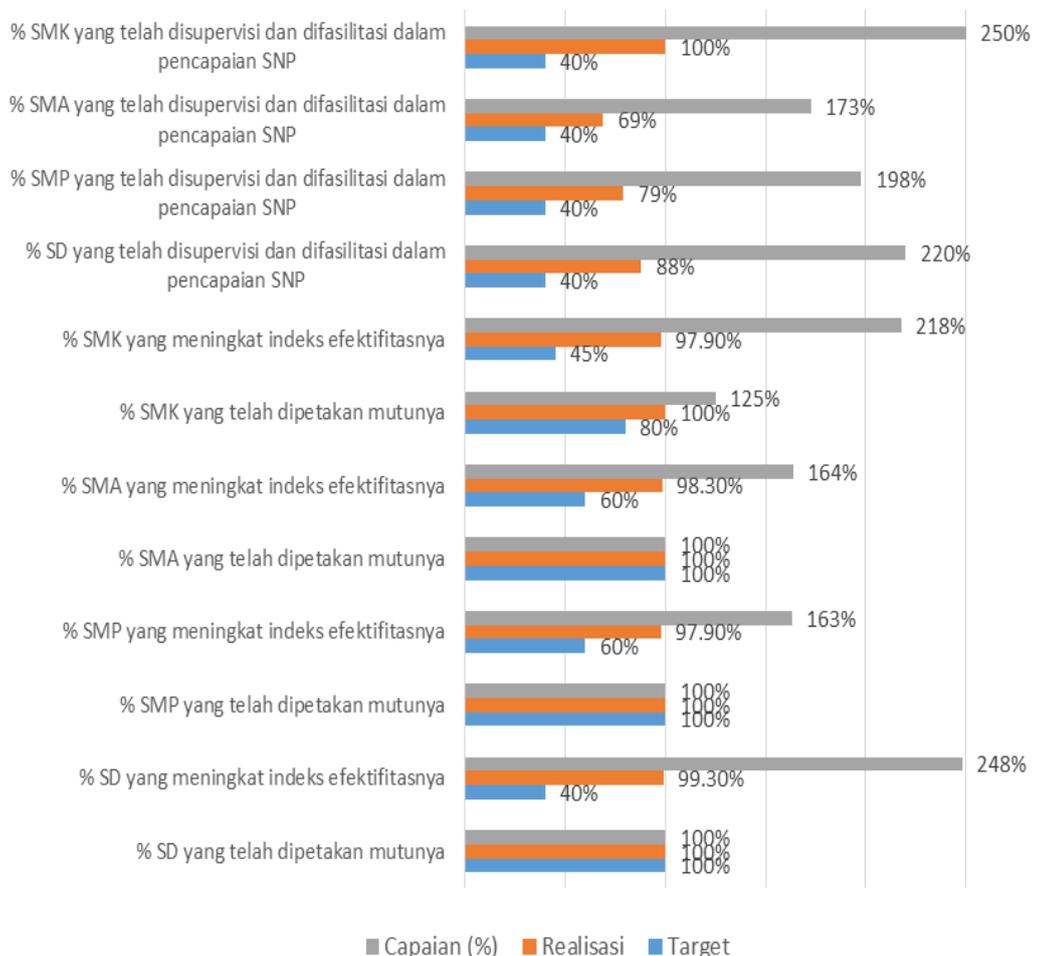
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Struktur Organisasi	3
E. Mekanisme Kerja	4
F. Permasalahan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. Capaian Kinerja Organisasi	10
B. Realisasi Anggaran	80
BAB IV PENUTUP	86
LAMPIRAN	89



IKHTISAR EKSEKUTIF

LPMP Jawa Tengah Sebagai Unit Eselon II Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjabarkan berbagai kegiatan-kegiatan dan program penjaminan mutu pendidikan di tingkat provinsi. Laporan kinerja ini disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP LPMP Jawa Tengah merupakan laporan kinerja tahun ketiga atas pelaksanaan Rencana Strategis LPMP Jawa Tengah tahun 2015 – 2019. Laporan ini memberikan informasi tingkat pencapaian indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala LPMP Jawa Tengah dengan Dirjen Dikdasmen.

Grafik Ringkasan Capaian IKK



Kinerja Keuangan

Alokasi Anggaran = Rp177.052.350.000,00

Realisasi = Rp173.651.003.025,00

98,79

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja, antara lain:

1. LPMP Jawa Tengah tidak memiliki akses untuk pengelolaan data PMP sehingga LPMP tidak bisa membantu sekolah dalam mendalami akar masalah untuk membuat rekomendasi tingkat sekolah, kabupaten/kota maupun Provinsi.
2. Mayoritas sekolah membebankan pengentrian data mutu hanya pada operator sekolah sehingga faktor jumlah instrumen yang banyak menyebabkan kelelahan dan kejemuhan dalam entri data sehingga memungkinkan hasilnya tidak sama dengan isi instrumen manual.
3. Dijumpai banyak sekolah yang menggunakan aplikasi “*faster*” untuk mengentri data mutu sehingga isian data menjadi tidak valid
4. Adanya keterlambatan dalam menampilkan rapor peta mutu oleh satgas PMP sehingga LPMP harus memundurkan jadwal pelaksanaan kegiatan penyusunan peta mutu, analisis data mutu, penyusunan rekomendasi mutu dan desiminasi hasil pemetaan mutu.
5. Kegiatan Bimtek Guru Sasaran yang dilaksanakan di TPK, waktunya bersamaan dengan akreditasi sekolah, penerimaan peserta didik baru, sehingga prosentase Guru Sasaran yang tidak hadir menjadi cukup besar.
6. Sebaran Instruktur Kabupaten (IK) yang ada, tidak lagi sesuai dengan sekolah yang baru sehingga kesulitan dalam komunikasi dengan IK.
7. Penandatanganan MOU Sekolah Model tahun 2017 belum mengundang struktural dinas pendidikan kabupaten/kota dan BP2MK sehingga proposal belum disahkan saat penandatanganan MoU.

Dari permasalahan di atas,beberapa rekomendasi yang diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun 2018 agar kegiatan selanjutnya dapat berjalan lebih efektif dan efisien, antara lain:

1. Mengusulkan kepada pusat (satgas PMP) agar memberikan akses dalam pengelolaan data mutu
2. Menekankan kepada sekolah melalui pengawas agar pengentrian data mutu dilakukan oleh setiap responden dan penjadwalan entri data oleh setiap responden
3. Pengawas Sekolah perlu memahami pimpinan sekolah tentang pentingnya data mutu
4. Mengusulkan agar penyederhanaan instrumen pemetaan dengan mengurangi jumlah pertanyaan dengan cara menggabungkan pertanyaan-pertanyaan sejenis dalam satu variabel.

5. Mengusulkan agar satgas pusat menyusun *milestones* pelaksanaan peta mutu hingga presentasi datanya menyesuaikan dengan jadwal yang ada di LPMP dan Satgas menaati *milestones* yang disusun tersebut.
6. Jadwal kegiatan Bimtek diupayakan tidak bersamaan dengan pelaksanaan UN, dan PPDB, Ujian kenaikan kelas dan akreditasi sekolah
7. Pendataan IK dan penugasan IK memperhatikan letak geografis dan penggantian IK memperhatikan syarat yang sudah ditentukan.
8. Penandatanganan MoU sekolah model perlu mengundang pejabat struktural dari kabupaten/kota dan BP2MK



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 07 tahun 2007. Sebelum keputusan tersebut terbit bernama Balai Penataran Guru (BPG) Semarang. Balai Penataran Guru Semarang pada awal berdirinya diatur oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0116/O/1977 tanggal 23 April 1977 tentang Tata Kerja Balai Penataran Guru dan Tenaga Teknis Regional. Selanjutnya melalui Keputusan Mendikbud Nomor 0181/O/1979 tanggal 20 Agustus 1979 Balai Penataran Guru dan Tenaga Teknis Regional diubah menjadi Balai Penataran Guru. Struktur organisasi BPG saat itu diatur menurut Keputusan Mendikbud Nomor 0203/O/1978 tanggal 23 Juli 1978, yang susunan organisasinya belum mencerminkan lembaga penataran karena belum tampak adanya tenaga fungsional. Dalam perkembangan selanjutnya, fungsi dan peranan BPG Semarang semakin meningkat setelah terbit Keputusan Mendikbud Nomor 024/O/1991 tanggal 2 Mei 1991 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Penataran Guru yang didalamnya memuat pula jabatan struktural dan fungsionalnya dalam BPG. Selanjutnya Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/O/2003 tanggal 4 Juli 2003 sebagai lembaga yang bertujuan agar pelaksanaan pendidikan di Jawa Tengah sesuai dengan standar, norma, kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Setelah mengalami berbagai perubahan nomenklatur, hingga akhirnya terbit Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan, yang merupakan Unit Pelayanan Teknis dibawah Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah. Saat ini LPMP Jawa Tengah dipimpin oleh Drs. Harmanto, M.Si.

LPMP Jawa Tengah memiliki ketersediaan sumber daya manusia sejumlah 131 orang PNS dan 34 orang tenaga honorer. Dari 131 PNS terdapat tenaga fungsional sejumlah 18 orang, pejabat struktural 11 orang, dan fungsional umum 102 orang, dengan kualifikasi pendidikan S-3 sejumlah 5 orang, S-2 sejumlah 51 orang, S-1 sejumlah 49 orang, D3 sejumlah 7 orang, SLTA sejumlah 13 orang, SMP sejumlah 5 orang, dan SD sederajat sejumlah 1 orang.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Permendikbud Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP);
4. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah Nomor: SP DIPA-023.03.2.419519/2017 tanggal 7 Desember 2016.

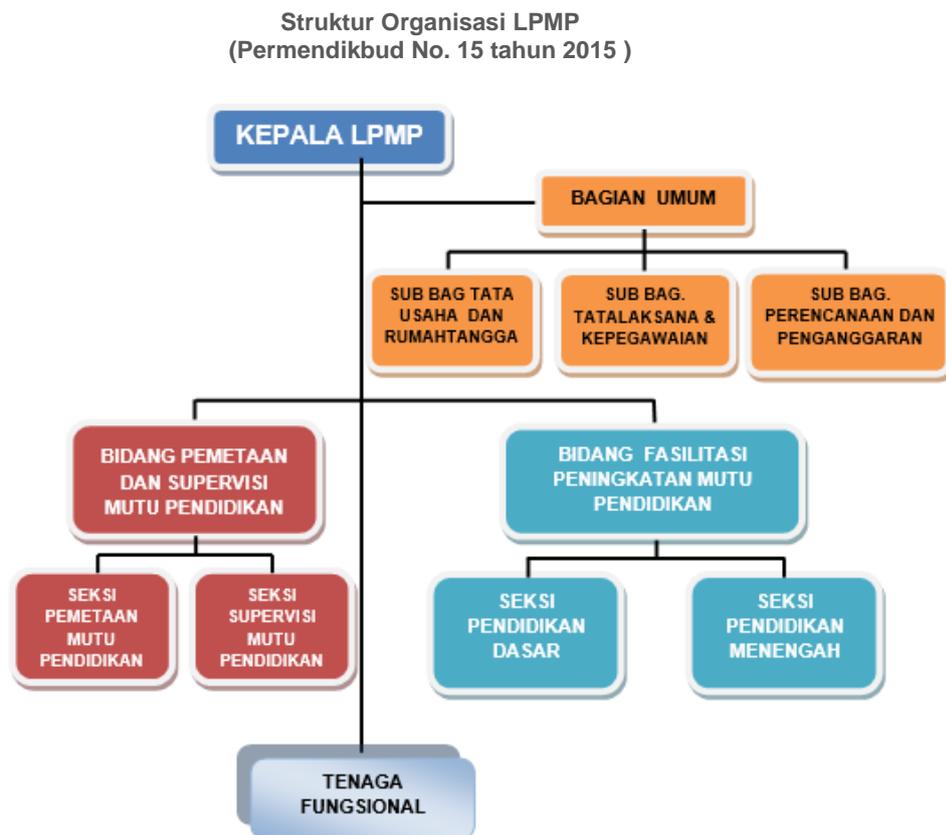
C. TUGAS DAN FUNGSI

LPMP Jawa Tengah memiliki tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya LPMP menyelenggarakan fungsi:

1. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
3. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu nasional;

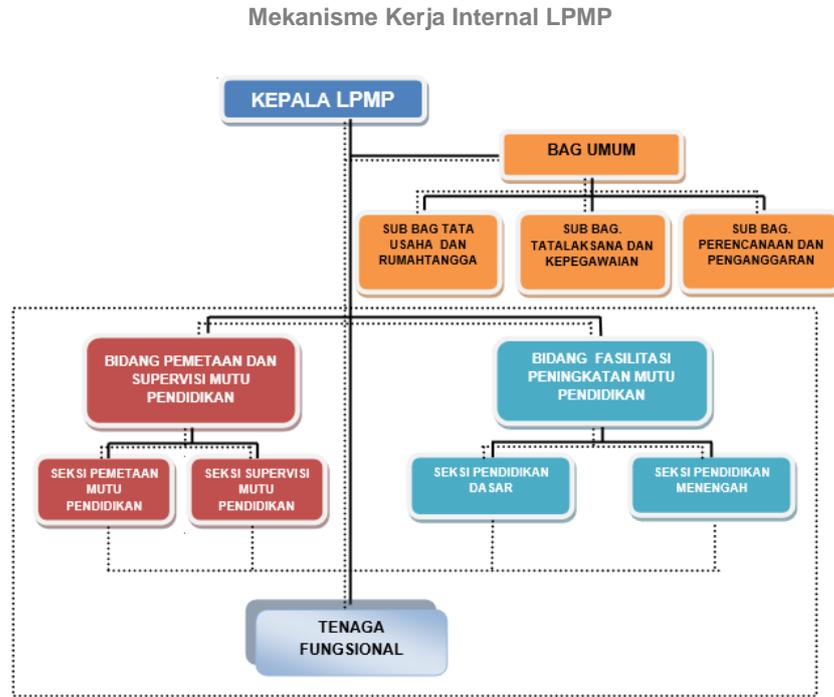
4. Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah secara nasional;
5. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional;
6. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
7. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

D. STRUKTUR ORGANISASI

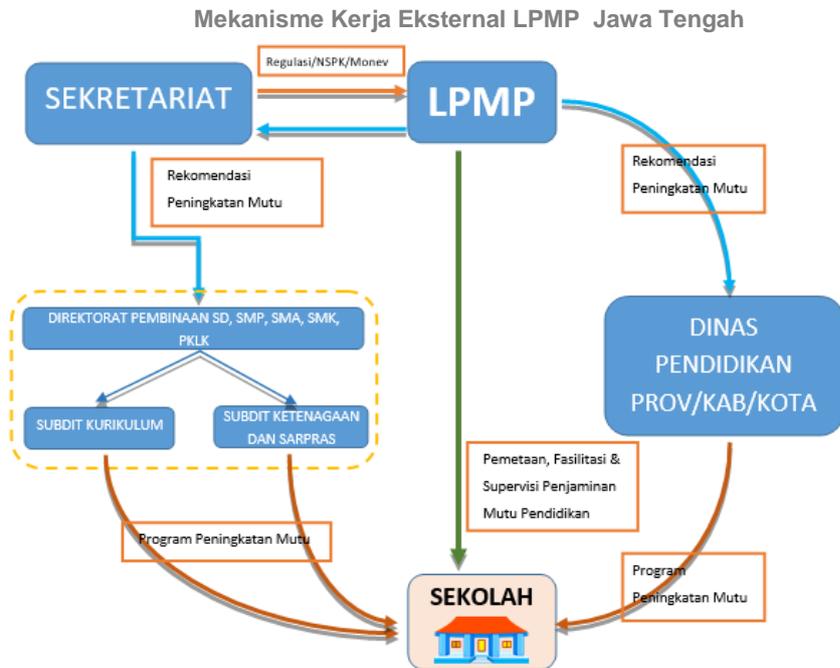


E. MEKANISME KERJA

1) Mekanisme Kerja Internal



2) Mekanisme Kerja Eksternal



F. PERMASALAHAN

Sebagai upaya pencapaian kinerja dari sasaran strategis LPMP Jawa Tengah, maka permasalahan-permasalahan pendidikan harus dapat diselesaikan dengan baik. LPMP Jawa Tengah telah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama satu tahun ke depan sebagai berikut.

1. Lulusan kurang memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif
2. Kompetensi guru belum sesuai dengan harapan
3. Pelibatan masyarakat kurang maksimal dalam pengelolaan peningkatan mutu pendidikan
4. Guru belum mampu membuat RPP secara mandiri.
5. Manajemen kepala sekolah belum dapat berjalan dengan baik
6. Perencanaan program belum dilaksanakan sesuai dengan standar
7. Masih sedikitnya sekolah yang mencapai SNP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

PENTAHAPAN PENCAPAIAN RENSTRA LPMP JATENG 2015-2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET					
			2015	2016	2017	2018	2019	
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	1	Persentase SD yang telah dipetakan mutunya	%	90,15	100	100	100	100
	2	Persentase SD yang meningkat indeks efektifitasnya	%	0	0	40	75	95
	3	Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya	%	71,49	100	100	100	100
	4	Persentase SMP yang meningkat indeks efektifitasnya	%	0	0	60	80	95
	5	Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya	%	71,49	100	100	100	100
	6	Persentase SMA yang meningkat indeks efektifitasnya	%	0	0	60	80	95
	7	Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya	%	59,6	65	80	90	100
	8	Persentase SMK yang meningkat indeks efektifitasnya	%	0	0	45	70	95
	9	Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	16,8	25	40	60	80
	10	Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	16,8	25	40	60	80
	11	Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	16,8	25	40	60	80
	12	Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	16,8	25	40	60	80

- a) Pemenuhan Hak Terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar Yang Berkualitas;
- b) Siswa yang berpartisipasi mengikuti pendidikan SMA/SMK/SMLB/Paket C;
- c) Persentase angka putus sekolah SMA/SMK/SMLB/Paket C;
- d) Sekolah menengah di setiap kecamatan
- e) Peningkatan Kualitas Pembelajaran;
- f) Jumlah sekolah menengah rujukan/model di setiap kab/kota;
- g) **Meningkatnya kualitas satuan pendidikan melalui peningkatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP);**
- h) Tata kelola Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang baik

**PERJANJIAN KINERJA 2017
DIRJEN DIKDASMEN
dengan MENDIKBUD**

**1 dari 8 Sasaran
Strategis merupakan
tanggungjawab**



PERJANJIAN KINERJA 2017

KEPALA LPMP JATENG DENGAN DIRJEN DIKDASMEN

Sasaran Strategis



“Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan”

Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1. Persentase SD yang telah dipetakan mutunya	100%	
2. Persentase SD yang meningkat indeks efektifitasnya	40%	
3. Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya	100%	
4. Persentase SMP yang meningkat indeks efektifitasnya	60%	
5. Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya	100%	6.585.645.000,00
6. Persentase SMA yang meningkat indeks efektifitasnya	60%	
7. Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya	80%	
8. Persentase SMK yang meningkat indeks efektifitasnya	45%	
9. Persentase SD yang telah di fasilitasi berdasarkan 8 SNP	40%	
10. Persentase SMP yang telah di fasilitasi berdasarkan 8 SNP	40%	
11. Persentase SMA yang telah di fasilitasi berdasarkan 8 SNP	40%	151.061.897.000,00
12. Persentase SMK yang telah di fasilitasi berdasarkan 8 SNP	40%	

PK tahun 2017 mengalami ...perubahan dikarenakan adanya perubahan anggaran dan output. Dokumen PK awal dan perubahan secara keseluruhan tercantum dalam lampiran.

TOTAL ANGGARAN LPMP =

Rp177.052.350.000,00



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

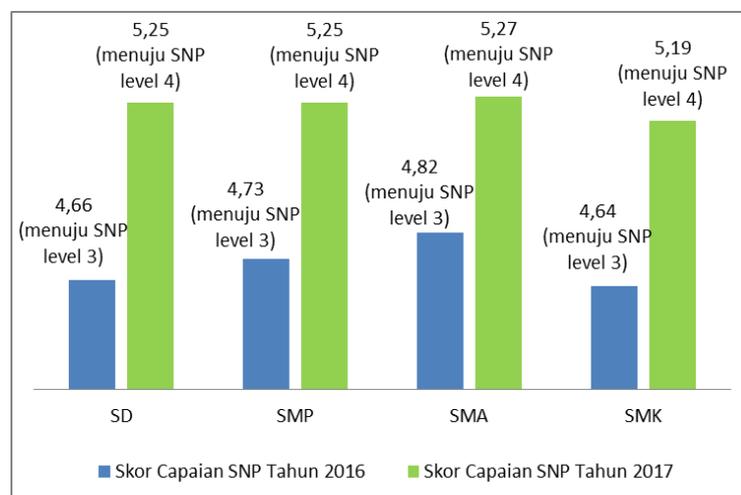
Seuai dengan penetapan kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2017, LPMP Jawa Tengah berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi atau lembaga. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan instansi atau lembaga dalam upaya pencapaian sasaran strategisnya dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka diperlukan suatu gambaran tentang capaian-capaian kinerja tersebut. Di bawah ini diuraikan hasil capaian kinerja LPMP Jawa Tengah sebagai implementasi kebijakan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab menuju akuntabilitas kegiatan dan keuangan lembaga.

A. Capaian Kinerja Organisasi

SASARAN STRATEGIS

“Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan”

Penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Jateng menunjukkan peningkatan, peningkatan tersebut terlihat dari makin meningkatnya nilai capaian SNP atau level SNP di Provinsi Jawa Tengah. Jika pada tahun 2016 capaian SNP berada pada level 3 maka di tahun 2017 naik ke level 4.



Grafik Perbandingan Capaian Mutu SNP Tahun 2016 dan Tahun 2017 Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah

Secara keseluruhan pencapaian indikator kinerja LPMP Jawa Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut :



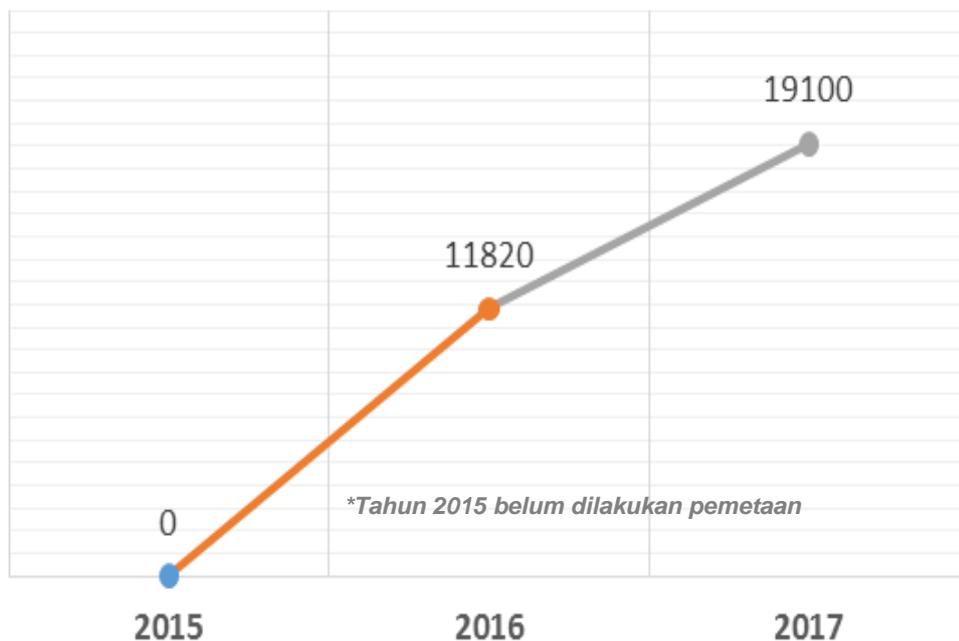
IKK #1 "Persentase SD yang telah dipetakan mutunya"

Realisasi 2016	Tahun 2017			Target Renstra 2019	Capaian Terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
61,88%	100%	100%	100	100%	100%

Indikator kinerja persentase Sekolah Dasar (SD) telah dipetakan mutu pendidikannya di Jawa Tengah dan telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu 100% atau sejumlah 19.100 SD. Dari 19.100 sekolah, sebanyak 18.878 sekolah berhasil mengirimkan data hasil pemetaan mutunya. Dari jumlah tersebut, terdapat 18.865 sekolah yang berhasil diolah rapor mutunya.

Jika dibanding dengan tahun 2016 target SD yang telah dipetakan mengalami kenaikan sejumlah 7.280 SD. Tahun 2017 jumlah SD yang dipetakan sebanyak 19.100 SD, sedangkan pada tahun 2016 sejumlah 11.820 SD.

Tren Jumlah SD dipetakan mutunya tahun 2015-2017

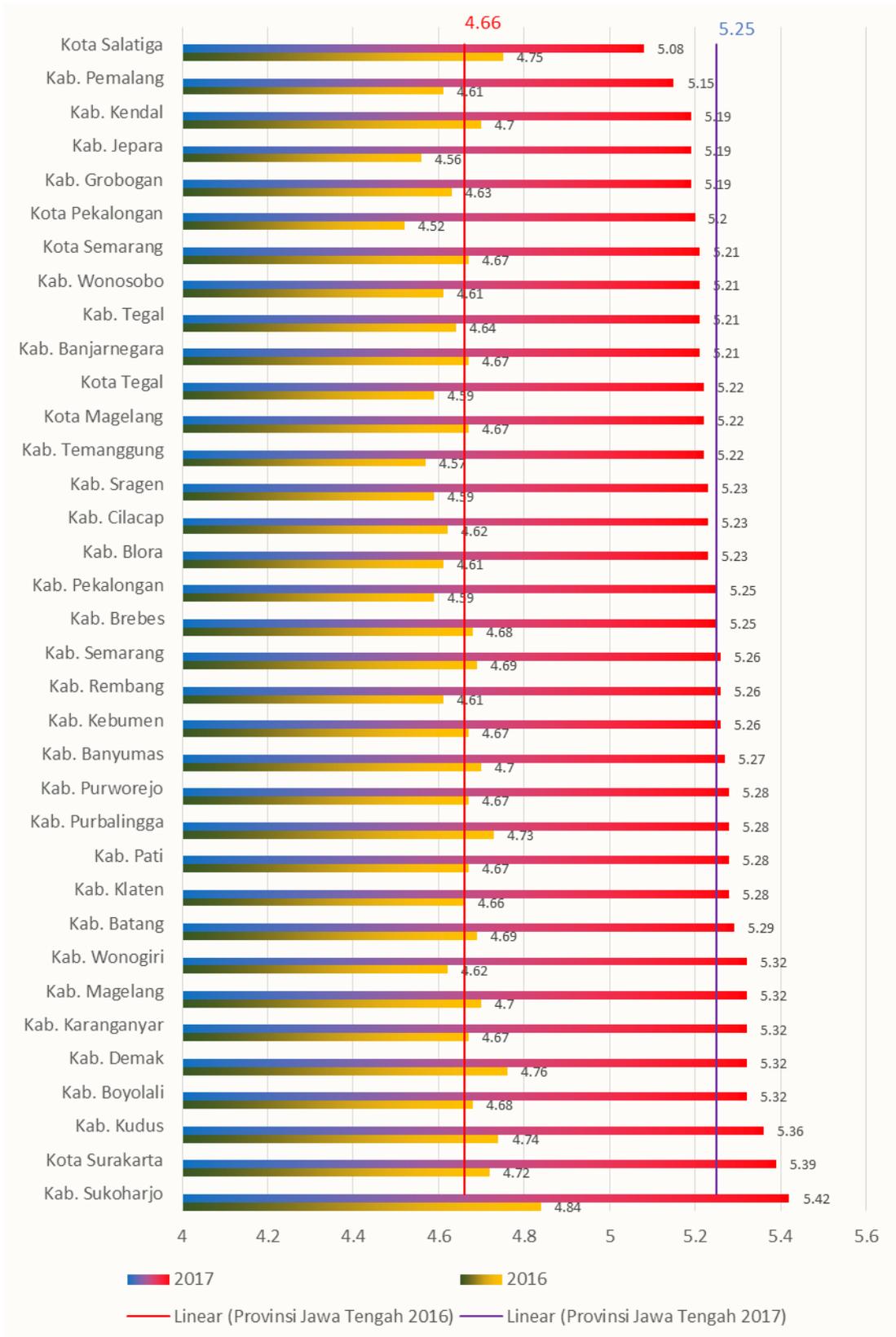


Hasil pencapaian target diatas disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Fungsi koordinasi berjalan dengan baik antara LPMP Jawa Tengah dengan Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, khususnya Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah;
- 2) Mengoptimalkan fungsi pengawas dan melibatkan unsur diluar pengawas seperti Dinas Pendidikan kabupaten/kota.
 - ✓ Jumlah pengawas SD yang dilatih untuk mendampingi kegiatan pemetaan mutu pada Tahun 2017 sejumlah 1.562 pengawas SD. Setiap pengawas memiliki kewajiban mendampingi 10 sekolah dari sisi akademik, yakni terkait kualitas data hasil pemetaan. Sehingga terdapat 15.620 sekolah yang didampingi dalam pelaksanaan pemetaan mutu. Sementara untuk menjangkau SD yang pengawasnya tidak dilatih, LPMP Jawa Tengah melatih 572 operator kecamatan dari 572 kecamatan dan 35 operator kabupaten/kota dari 35 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah untuk mendampingi SD lainnya dan juga bertugas mendampingi seluruh sekolah dari sisi teknis.
 - ✓ Pengawas sekolah yang dilatih dan Dinas Pendidikan bertugas untuk membiaskan hasil pelatihan kepada pengawas sekolah lainnya yang tidak dilatih di LPMP.

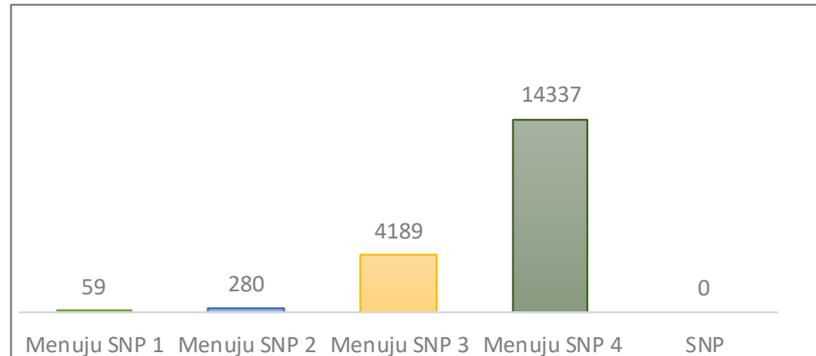
1. Gambaran Umum Capaian SNP

Dari 19.100 sekolah dasar yang dipetakan mutunya, sebanyak 18.865 sekolah yang dapat diolah peta mutunya. Sekolah yang tidak dapat diolah peta mutunya disebabkan karena (1) ada sekolah yang data pemetaan mutunya tidak sampai ke pusat, (2) ada juga sekolah yang mengirimkan data pemetaan mutunya melewati batas waktu yang ditetapkan, sehingga proses pengolahan datanya belum bisa dilakukan pada akhir tahun 2017 ini. Peta capaian mutu jenjang Sekolah Dasar (SD) Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Grafik Peta Capaian SNP Jenjang Sekolah Dasar (SD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Berdasarkan data pada grafik di atas dapat diketahui bahwa capaian mutu SNP jenjang SD di 35 kabupaten/kota seluruhnya dapat dikategorikan “menuju SNP level 4”. Bila dilihat dari jumlah sekolahnya, gambaran capaian mutu dipaparkan pada grafik sebagai berikut.

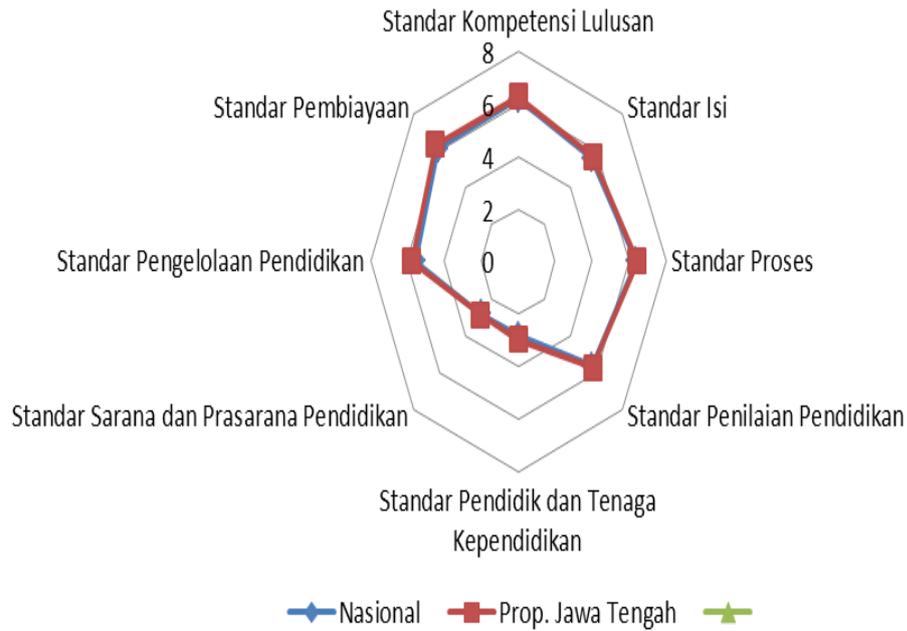


Grafik Jumlah Sekolah Berdasarkan Kategori Capaian SNP Jenjang Sekolah Dasar (SD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Secara umum capaian mutu SNP jenjang SD di 35 kabupaten/kota seluruhnya dapat dikategorikan “menuju SNP level 4”, tetapi bila dilihat dari masing-masing sekolah, belum ada SD yang sudah mencapai SNP. Sementara itu, ada 14.337 SD yang dapat dikategorikan capaian mutunya “menuju SNP level 4”. Hal ini sebagian besar SD di Jawa Tengah capaian mutu SNP-nya hampir mendekati SNP. Sementara itu, ada pula SD yang capaian mutunya masih jauh dari yang diharapkan yaitu menuju SNP level 1 sejumlah 59 SD.

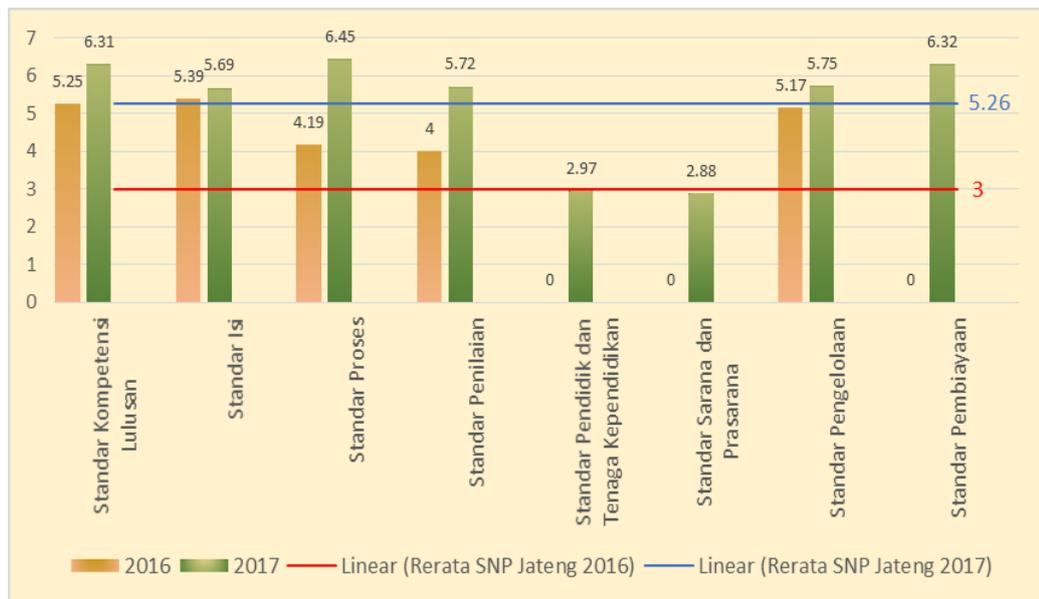
2. Capaian SNP untuk Setiap Standar

Gambaran capaian mutu jenjang SD di Jawa Tengah untuk masing-masing standar dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Grafik Peta Capaian SNP Setiap Standar Jenjang Sekolah Dasar (SD) Jawa Tengah Tahun 2017

Skor capaian mutu jenjang SD di Jawa Tengah untuk masing-masing standar dipaparkan pada grafik di bawah ini.



Grafik Skor Peta Capaian SNP Setiap Standar Jenjang Sekolah Dasar (SD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa capaian mutu jenjang SD di Jawa Tengah pada tahun 2017 secara umum belum mencapai SNP, akan tetapi sudah meningkat dibandingkan tahun 2016. Pada Tahun 2017, capaian mutu

yang paling baik adalah pada standar proses dengan skor mutu 6,45 dan capaian mutu yang paling rendah ada pada standar sarana dan prasarana dengan skor mutu 2,88.

3. Hambatan dan Kendala Pemetaan Mutu jenjang SD, SMP, SMA, SMK

Pelaksanaan pemetaan mutu untuk semua jenjang mempunyai permasalahan yang sama yaitu kendala teknis dalam pengolahan data pada aplikasi Pemetaan Data Mutu yang dilakukan oleh Satgas Pusat PMP.

Efek dari kendala teknis tersebut juga mempengaruhi hasil peta mutu yang terolah, terutama pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Sarana Prasarana. Hasil kedua standar tersebut pada raport mutu seluruh sekolah tidak sesuai dengan kondisi riil di sekolah.

4. Langkah antisipasi yang dilakukan ke depan

Untuk memecahkan kendala pemetaan mutu jenjang SD, SMP, SMA, SMK, hal yang harus dilakukan adalah: Pertama, pemerintah perlu memperbaiki design penjaminan mutu yang dimotori oleh Satgas Pusat PMP, terutama terkait waktu. Kedua, perlu penyempurnaan aplikasi pemetaan mutu dan pengurangan jumlah pertanyaan pada kuisioner, sehingga sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan sarana komputer tetap bisa menggunakan aplikasi tersebut tanpa mengalami kendala berarti. Ketiga, server pusat sebaiknya lebih disiapkan kinerjanya untuk menerima data dari seluruh sekolah di Indonesia. Keempat, ke depan disamping melatih pengawas, operator sekolah juga dilatih tentang penggunaan aplikasi PMP.



IKK #2 "Persentase SD yang meningkat indeks efektifitasnya"

Target 2017 = 40%

Realisasi = 99,3%

Capaian 248,25%

PERBANDINGAN RENSTRA 2019

**Target 2019 =
95%**

**Capaian
104,5%**

Indikator kinerja persentase SD yang meningkat indeks efektifitasnya di Jawa Tengah telah melampaui target yang ditetapkan. Dari target PK sebesar 40%

berhasil terealisasi 99,3%. Hasil yang diharapkan dalam kegiatan penjaminan mutu oleh sekolah itu sendiri adalah adanya peningkatan mutu pada satuan pendidikan secara berkelanjutan. Seperti telah dipaparkan sebelumnya, jumlah SD di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi target pemetaan mutu pendidikan Tahun 2016 sebanyak 11.820 SD dan pada Tahun 2017 sebanyak 19.100 SD. Gambaran jumlah SD yang berhasil diolah data mutu pendidikannya pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel : **Rekapitulasi Jumlah SD di Provinsi Jawa Tengah Yang Diolah Data Mutu Pendidikannya Tahun 2016 dan Tahun 2017**

Tahun	Jumlah SD	
	Target Pemetaan	Diolah Mutu Pendidikannya
2016	11.820	9.992
2017	19.100	18.865

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa ada perbedaan jumlah SD yang berhasil diolah data mutunya, yaitu pada Tahun 2016 sebanyak 9.992 SD dan pada Tahun 2017 sebanyak 18.865 SD. Untuk itu, perhitungan indeks efektifitas kegiatan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada jumlah SD pada Tahun 2016 yang diolah mutu pendidikannya yaitu sebanyak 9.992 SD.

Efektifitas kegiatan penjaminan mutu pendidikan jenjang SD di Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2016 ke Tahun 2017 dapat terlihat pada Grafik berikut ini.



Dari Grafik di atas dapat diketahui persentase jumlah SD yang meningkat indeks efektifitasnya sebesar 99,3%, melebihi dari target persentase

peningkatan indeks efektifitas (yaitu sebesar 40%). Data ini menunjukkan terjadi peningkatan mutu pendidikan pada Tahun 2017 dibandingkan Tahun 2016. Ini terlihat pula pada gambaran capaian mutu pendidikan dimana pada Tahun 2016 sebagian besar SD (76,77%) di Provinsi Jawa Tengah memiliki kategori capaian mutu “menuju SNP level 3”. Sementara pada Tahun 2017, sebagian besar SD (76%) capaian mutunya meningkat menjadi “menuju SNP level 4”.

b) Hambatan dan Kendala pengukuran indeks efektifitas

Beberapa hambatan yang ditemui dalam mengukur indeks efektifitas jenjang SD, SMP, SMA dan SMK:

- a. Terdapat perbedaan jumlah sekolah yang berhasil mengirimkan data PMP dan diolah menjadi rapor mutu antara tahun 2016 dan 2017. Dengan perbedaan tersebut analisis terhadap indeks efektifitas tidak bisa langsung dilakukan.
- b. Terjadi keterlambatan keluarnya rapor mutu tahun 2017 yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan indeks efektifitas. Setelah rapor mutu keluar, masih terjadi pergerakan data dari bulan November hingga akhir Desember 2017. Konsekuensinya perhitungan indeks efektifitas tidak bisa segera dilaksanakan.

c) Langkah Antisipasi yang Dilakukan ke Depan

Langkah antisipasi yang perlu dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala pengukuran indeks efektifitas jenjang SD, SMP, SMA dan SMK adalah:

- a. Untuk memecahkan masalah pertama, dilakukan penyamaan data baik dari segi jumlah maupun nama sekolah yang akan diukur indeks efektifitasnya. Di samping itu LPMP Jawa Tengah meminta bantuan kepada Tim Satgas PMP Ditjen Dikdasmen untuk menyediakan data yang diperlukan. Ke depan, kendala serupa diharapkan tidak terjadi lagi, karena sejak tahun 2017 pemetaan mutu pendidikan dilakukan terhadap seluruh sekolah.
- b. Dalam memecahkan kendala kedua LPMP Jawa Tengah melakukan kontak dengan tim satgas PMP Ditjen Dikdasmen untuk memastikan bahwa pergerakan data tidak lagi terjadi. Setelah kondisi stabil, dilakukan

download data rapor mutu maupun data mentah melalui web PMP. Ke depan diharapkan akhir bulan November rapor mutu dan data mentah hasil pemetaan mutu pendidikan sudah tersedia di web PMP.

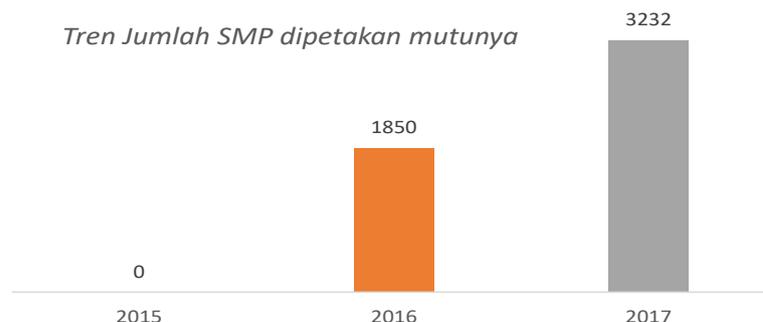


IKK #3 "Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya"

Realisasi 2016	Tahun 2017			Target Renstra 2019	Capaian Terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
57,24%	100%	100%	100	100%	100%

Indikator kinerja persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah dipetakan mutu pendidikannya di Jawa Tengah telah mencapai target yang ditetapkan dalam PK yaitu 100% atau sejumlah 3.232 SMP. Jumlah SMP di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi sasaran dipetakan mutu pendidikannya pada tahun 2017 yaitu seluruh SMP sebanyak 3.232. Seluruh SMP tersebut telah melaksanakan pemetaan mutu sehingga indikator kinerja persentase SMP yang telah dipetakan mutunya adalah 100%. Dari 3.232 sekolah, sebanyak 3.168 sekolah berhasil mengirimkan data hasil pemetaan mutunya. Dari jumlah tersebut, terdapat 3.164 sekolah yang berhasil diolah raport mutunya.

Jika dibanding dengan tahun 2016 target SMP yang telah dipetakan mengalami kenaikan sejumlah 1.382 SMP. Tahun 2017 jumlah SMP yang dipetakan sebanyak 3.232 SMP, sedangkan pada tahun 2016 sejumlah 1.850 SMP.



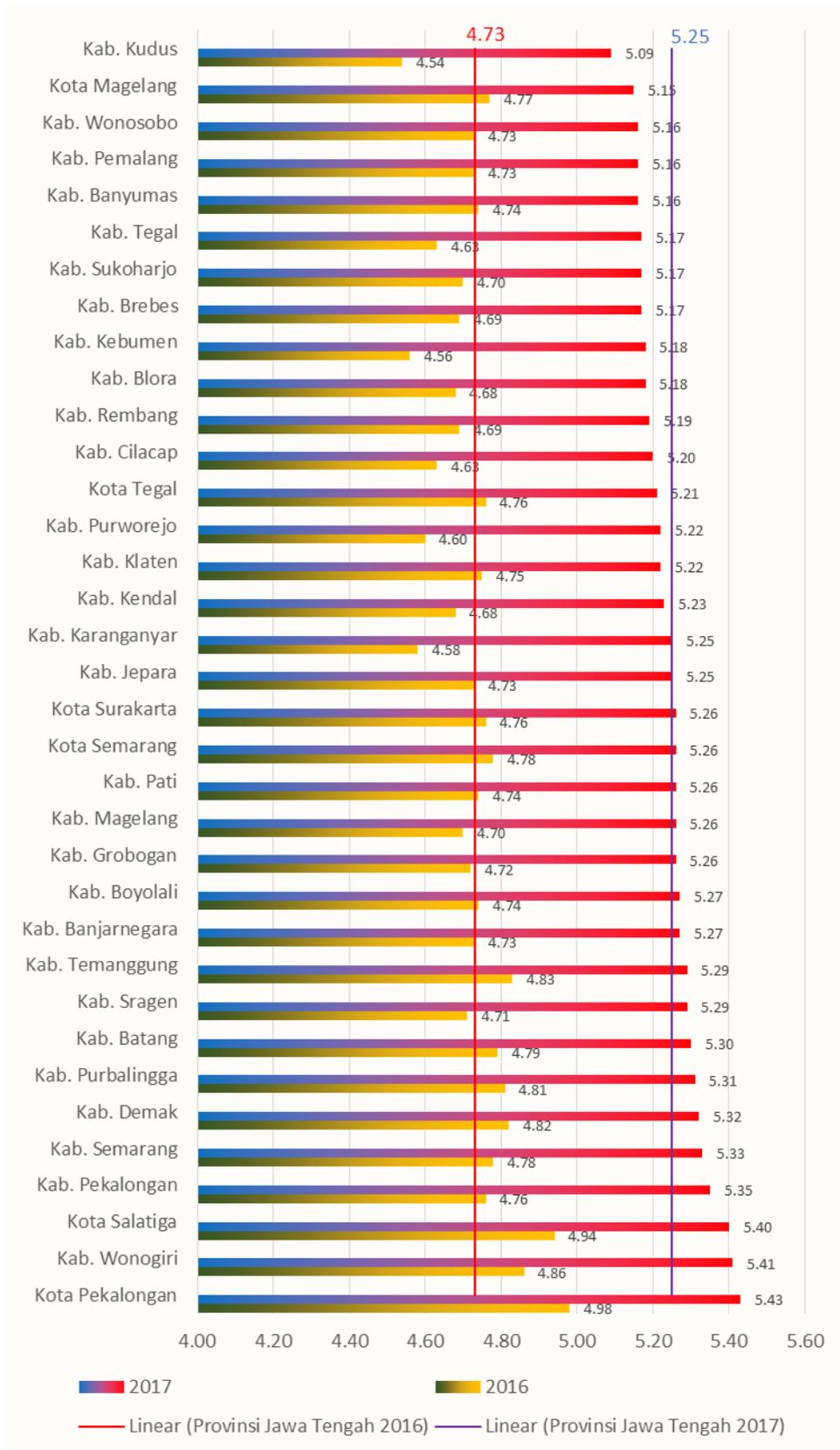
Hasil capaian melebihi dari target yang ditetapkan, disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Fungsi koordinasi berjalan dengan baik antara LPMP Jawa Tengah dengan Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, khususnya Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah;
- 2) Adanya strategi pencapaian dengan mengoptimalkan fungsi pengawas dan unsur diluar pengawas seperti Dinas Pendidikan kabupaten/kota.
 - ✓ Jumlah pengawas SMP yang dilatih untuk mendampingi kegiatan pemetaan mutu pada Tahun 2017 sejumlah 227 pengawas SMP. Setiap pengawas memiliki kewajiban mendampingi 10 sekolah dari sisi akademik, yakni terkait kualitas data hasil pemetaan. Sehingga terdapat 2270 sekolah yang didampingi dalam pelaksanaan pemetaan mutu. Sementara untuk menjangkau SMP yang pengawasnya tidak dilatih, LPMP Jawa Tengah melatih 35 operator kabupaten/kota dari 35 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah untuk mendampingi SMP lainnya dan juga bertugas mendampingi seluruh sekolah dari sisi teknis.
 - ✓ Pengawas sekolah yang dilatih dan Dinas Pendidikan bertugas untuk membiaskan hasil pelatihan kepada pengawas sekolah lainnya yang tidak dilatih di LPMP.

Gambaran capaian pelaksanaan program pemetaan mutu pendidikan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Gambaran Umum Capaian SNP

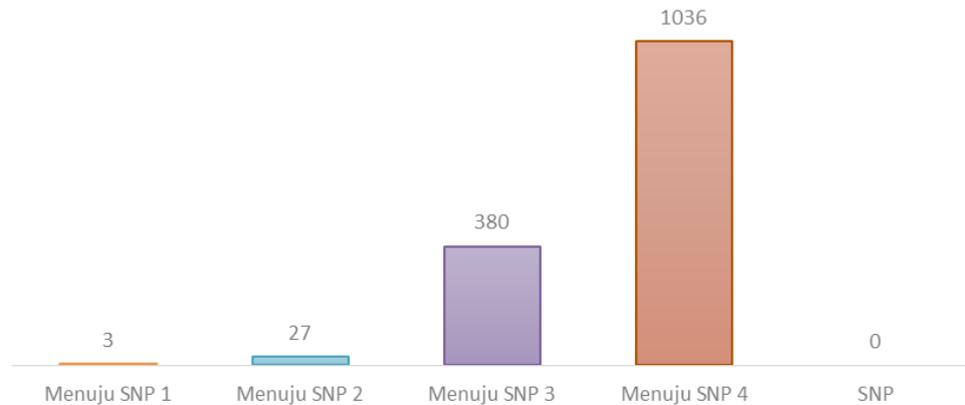
Dari 3.232 SMP yang dipetakan mutunya, sebanyak 3.164 sekolah yang dapat diolah peta mutunya. Sekolah yang tidak dapat diolah peta mutunya disebabkan karena (1) ada sekolah yang data pemetaan mutunya tidak sampai ke pusat, (2) ada juga sekolah yang mengirimkan data pemetaan mutunya melewati batas waktu yang ditetapkan, sehingga proses pengolahan datanya belum bisa dilakukan pada akhir tahun 2017 ini. Peta capaian mutu jenjang SMP di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Grafik Peta Capaian SNP Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Berdasarkan data pada grafik di atas dapat diketahui bahwa capaian mutu SNP jenjang SMP di 35 kabupaten/kota seluruhnya dapat dikategorikan “menuju SNP level 4”. Jadi dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan jenjang SMP di Jawa Tengah hampir mencapai SNP.

Bila dilihat dari jumlah sekolahnya, gambaran capaian mutu dipaparkan pada grafik sebagai berikut.

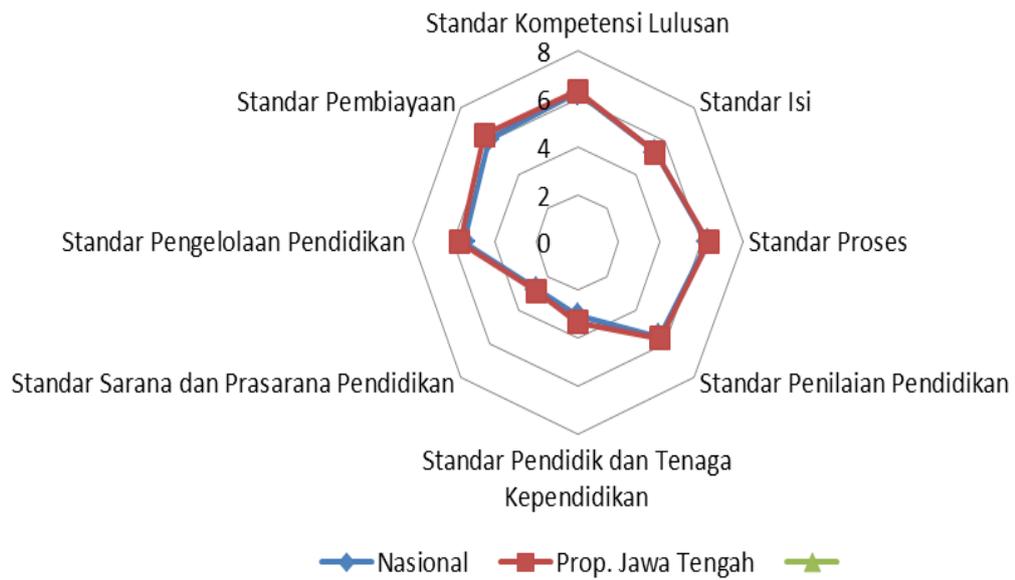


Grafik Jumlah Sekolah Berdasarkan Kategori Capaian SNP Jenjang SMP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Secara umum capaian mutu SNP jenjang SMP di 35 kabupaten/kota seluruhnya dapat dikategorikan “menuju SNP level 4”, tetapi bila dilihat dari masing-masing sekolah, belum ada SMP yang sudah mencapai SNP. Sementara itu, ada 2.338 SMP yang dapat dikategorikan capaian mutunya “menuju SNP level 4”. Hal ini sebagian besar SMP di Jawa Tengah capaian mutu SNP-nya hampir mendekati SNP. Sementara itu, ada pula SMP yang capaian mutunya masih jauh dari yang diharapkan yaitu menuju SNP level 1 sejumlah 9 SMP.

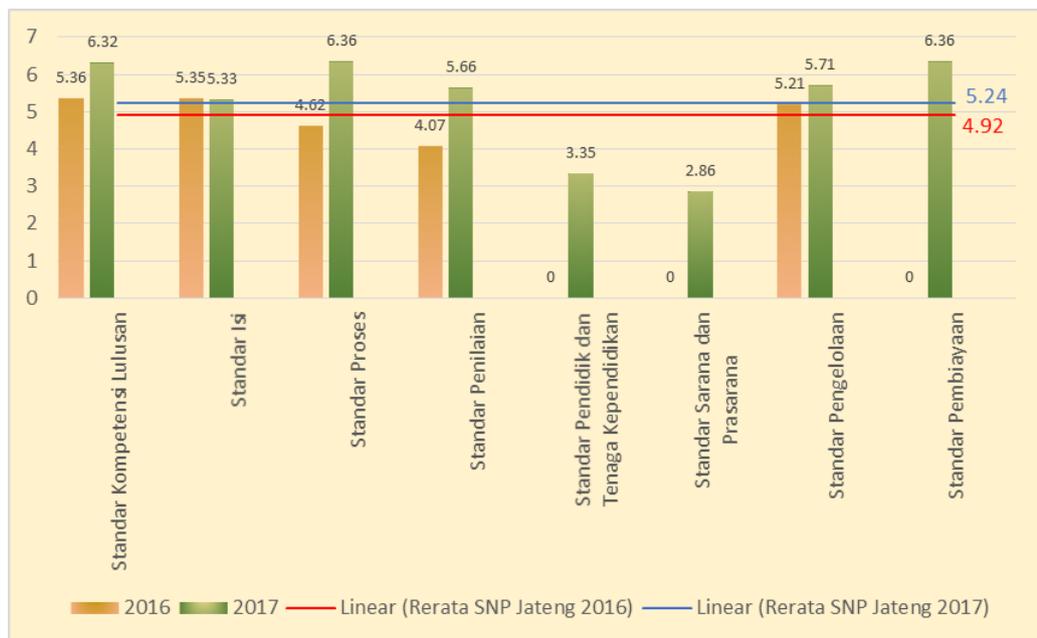
2. **Capaian SNP untuk Setiap Standar**

Gambaran capaian mutu jenjang SMP di Jawa Tengah untuk masing-masing standar dapat dilihat pada gambar 3.9 berikut.



Grafik Peta Capaian SNP Setiap Standar Jenjang SMP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Skor capaian mutu jenjang SMP di Jawa Tengah untuk masing-masing standar dipaparkan pada grafik di bawah ini.



Grafik Skor Peta Capaian SNP Setiap Standar Jenjang SMP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Berdasarkan tdi atas dapat diketahui bahwa capaian mutu jenjang SMP di Jawa Tengah pada tahun 2017 secara umum belum mencapai SNP, akan tetapi sudah meningkat dibandingkan tahun 2016. Pada Tahun 2017, capaian mutu

yang paling baik adalah pada standar prosedural standar pembiayaan dengan skor mutu masing-masing sebesar 6,36 dan capaian mutu yang paling rendah ada pada standar sarana dan prasarana dengan skor mutu 2,86.

Diskusi kelompok operator dinas kabupaten/kota yang akan membantu pelaksanaan pemetaan jenjang SMP pada kegiatan Bintek Pengawas SMP



IKK #4 "Persentase SMP yang meningkat indeks efektifitasnya"

Target 2017 = 60%

Realisasi = 97,90%

Capaian 163,17%

PERBANDINGAN RENSTRA 2019

**Target 2019 =
95%**

Capaian 103%

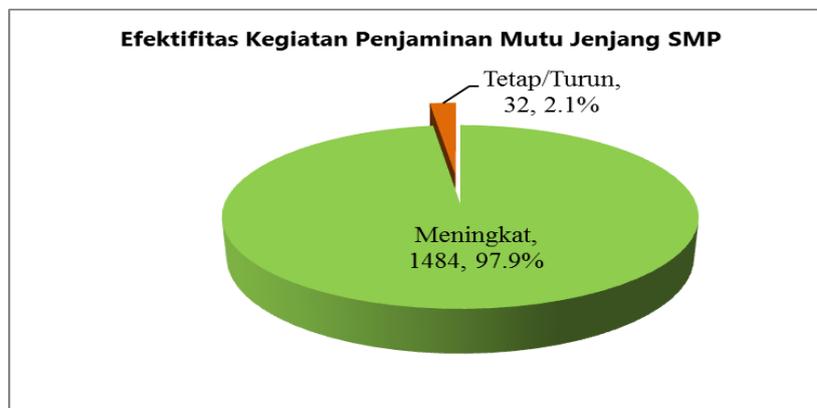
Indikator kinerja persentase SMP yang meningkat indeks efektifitasnya di Jawa Tengah telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 97,9% dari target PK sebesar 60%. Hasil yang diharapkan dalam kegiatan penjaminan mutu oleh sekolah itu sendiri adalah adanya peningkatan mutu pada satuan pendidikan secara berkelanjutan. Seperti telah dipaparkan sebelumnya, jumlah SMP di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi target pemetaan mutu pendidikan Tahun 2016 sebanyak 1.850 SMP dan pada Tahun 2017 sebanyak 3.232 SMP. Gambaran jumlah SMP yang berhasil diolah data mutu pendidikannya pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Rekapitulasi Jumlah SMP di Provinsi Jawa Tengah Yang Diolah Data Mutu Pendidikannya Tahun 2016 dan Tahun 2017

Tahun	Jumlah SMP	
	Target Pemetaan	Diolah Mutu Pendidikannya
2016	1.850	1.516
2017	3.232	3.164

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa ada perbedaan jumlah SMP yang berhasil diolah data mutunya, yaitu pada Tahun 2016 sebanyak 1.516 SMP dan pada Tahun 2017 sebanyak 3.164 SMP. Untuk itu, perhitungan indeks efektifitas kegiatan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada jumlah SMP pada Tahun 2016 yang diolah mutu pendidikannya yaitu sebanyak 1.516 SMP.

Efektifitas kegiatan penjaminan mutu pendidikan jenjang SMP di Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2016 ke Tahun 2017 dapat terlihat pada grafik berikut ini.



Dari Grafik di atas dapat diketahui persentase jumlah SMP yang meningkat indeks efektifitasnya sebesar 97,9%, melebihi dari target persentase peningkatan indeks efektifitas (yaitu sebesar 60%). Data ini menunjukkan terjadi peningkatan mutu pendidikan pada Tahun 2017 dibandingkan Tahun 2016. Ini terlihat pula pada gambaran capaian mutu pendidikan dimana pada Tahun 2016 sebagian besar SMP (63,08%) di Provinsi Jawa Tengah memiliki kategori capaian mutu “menuju SNP level 3”. Sementara pada Tahun 2017, sebagian besar SMP (71,1%) capaian mutunya meningkat menjadi “menuju SNP level 4”.



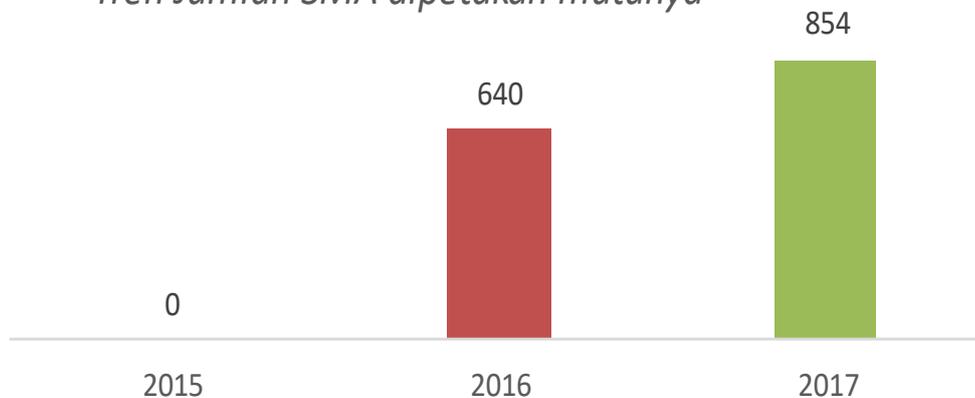
IKK #5 "Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya"

Realisasi 2016	Tahun 2017			Target Renstra 2019	Capaian Terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
74,94%	100%	100%	100	100%	100%

Indikator kinerja persentase Sekolah Menengah Atas (SMA) telah dipetakan mutu pendidikannya di Jawa Tengah telah mencapai target yang ditetapkan dalam PK yaitu 100% atau sejumlah 854 SMA. Jumlah SMA di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi sasaran dipetakan mutu pendidikannya pada Tahun 2017 yaitu seluruh SMA sebanyak 854. Seluruh SMA tersebut telah melaksanakan pemetaan mutu sehingga indikator kinerja persentase SMA yang telah dipetakan mutunya adalah 100%. Dari 854 sekolah, sebanyak 807 sekolah berhasil mengirimkan data hasil pemetaan mutunya. Dari jumlah tersebut, terdapat 804 sekolah yang berhasil diolah rapor mutunya.

Jika dibanding dengan tahun 2016 target SMA yang telah dipetakan mengalami kenaikan sejumlah 214 SMA. Tahun 2017 jumlah SMA yang dipetakan sebanyak 854 SMA, sedangkan pada tahun 2016 sejumlah 640 SMA.

Tren Jumlah SMA dipetakan mutunya



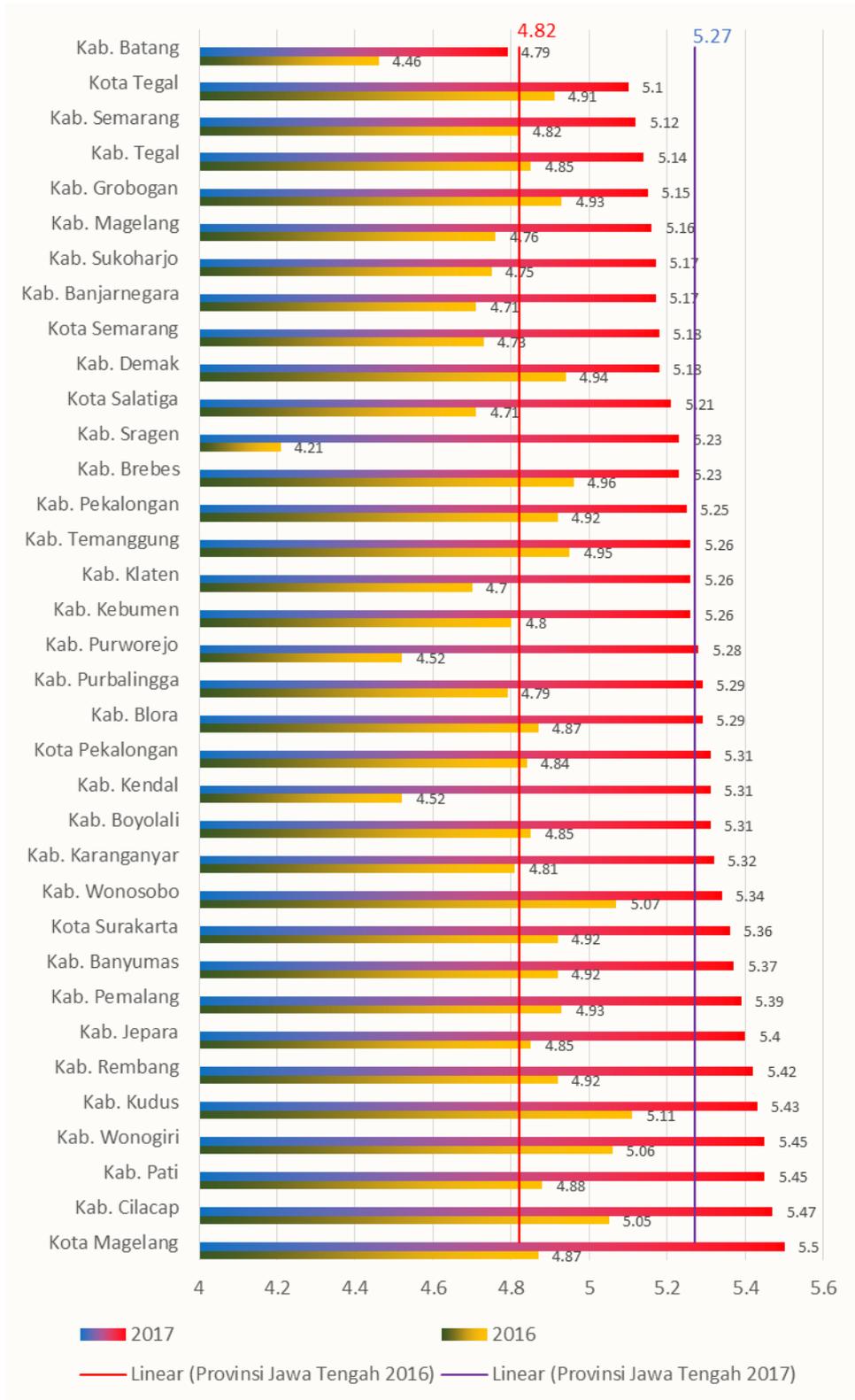
Hasil pencapaian target disebabkan oleh beberapa hal dibawah ini:

- 1) Fungsi koordinasi berjalan dengan baik antara LPMP Jawa Tengah dengan Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, khususnya Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah;
- 2) Mengoptimalkan fungsi pengawas dan melibatkan unsur diluar pengawas seperti Dinas Pendidikan kabupaten/kota.
 - ✓ Jumlah pengawas SMA yang dilatih untuk mendampingi kegiatan pemetaan mutu pada Tahun 2017 sejumlah 71 pengawas SMA. Setiap pengawas memiliki kewajiban mendampingi 10 sekolah dari sisi akademik, yakni terkait kualitas data hasil pemetaan. Sehingga terdapat 710 sekolah yang didampingi dalam pelaksanaan pemetaan mutu. Dengan asumsi bahwa di jenjang SMA responden kegiatan PMP sudah cukup mahir dalam pengoperasian komputer dan aplikasi PMP, maka jenjang SMA tidak mendapatkan bantuan teknis dari operator dinas pendidikan maupun operator UPTD.
 - ✓ Pengawas sekolah yang dilatih dan Dinas Pendidikan bertugas untuk membiaskan hasil pelatihan kepada pengawas sekolah lainnya yang tidak dilatih di LPMP.

Gambaran capaian pelaksanaan program pemetaan mutu pendidikan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Gambaran Umum Capaian SNP

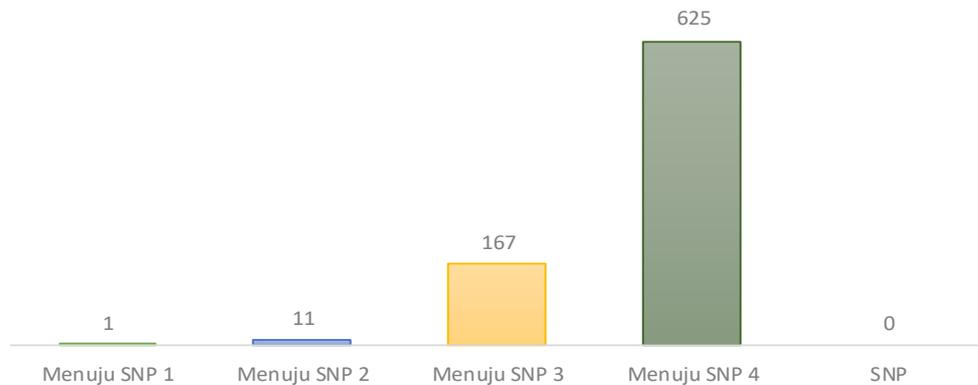
Dari 854 SMA yang dipetakan mutunya, sebanyak 804 sekolah yang dapat diolah peta mutunya. Sekolah yang tidak dapat diolah peta mutunya disebabkan karena (1) ada sekolah yang data pemetaan mutunya tidak sampai ke pusat, (2) ada juga sekolah yang mengirimkan data pemetaan mutunya melewati batas waktu yang ditetapkan, sehingga proses pengolahan datanya belum bisa dilakukan pada akhir tahun 2017 ini. Peta capaian mutu jenjang SMA di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Grafik Peta Capaian SNP Jenjang SMA
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Berdasarkan data pada grafik di atas dapat diketahui bahwa capaian mutu SNP jenjang SMA di 35 kabupaten/kota seluruhnya dapat dikategorikan “menuju SNP level 4”. Jadi dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan jenjang SMA di Jawa Tengah hampir mencapai SNP.

Bila dilihat dari jumlah sekolahnya, gambaran capaian mutu dipaparkan pada gambar sebagai berikut.



Grafik Jumlah Sekolah Berdasarkan Kategori Capaian SNP Jenjang SMA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Secara umum capaian mutu SNP jenjang SMA di 35 kabupaten/kota seluruhnya dapat dikategorikan “menuju SNP level 4”, tetapi bila dilihat dari masing-masing sekolah, belum ada SMA yang sudah mencapai SNP. Sementara itu, ada 625 SMA yang dapat dikategorikan capaian mutunya “menuju SNP level 4”. Hal ini sebagian besar SMA di Jawa Tengah capaian mutu SNP-nya hampir mendekati SNP. Sementara itu, ada pula SMA yang capaian mutunya masih jauh dari yang diharapkan yaitu menuju SNP level 1 sejumlah 1 SMA.

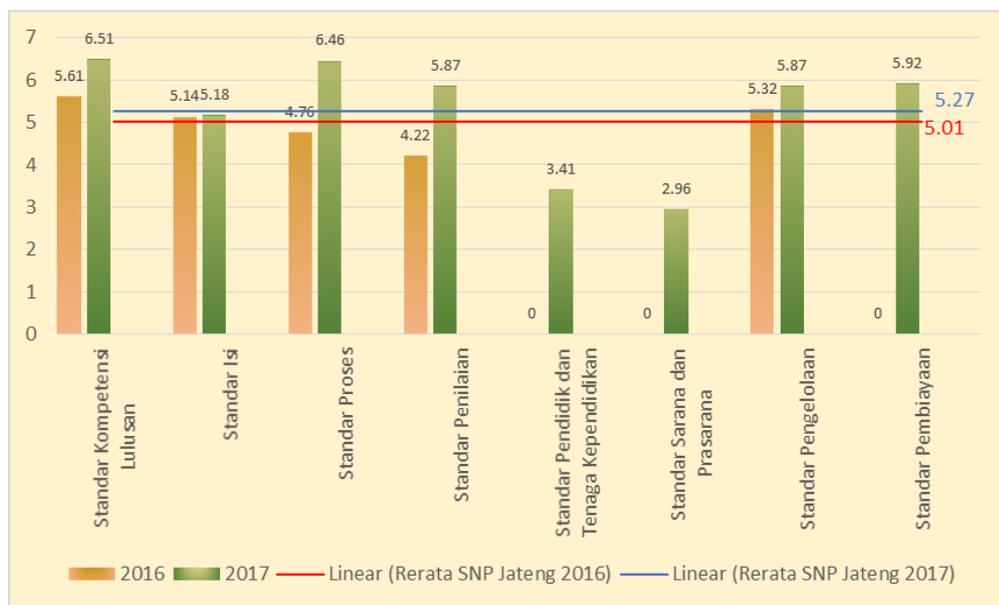
2. Capaian SNP untuk Setiap Standar

Gambaran capaian mutu jenjang SMA di Jawa Tengah untuk masing-masing standar dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Grafik Peta Capaian SNP Setiap Standar Jenjang SMA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Skor capaian mutu jenjang SMA di Jawa Tengah untuk masing-masing standar dipaparkan pada grafik di bawah ini.



Grafik Skor Peta Capaian SNP Setiap Standar Jenjang SMA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa capaian mutu jenjang SD di Jawa Tengah pada tahun 2017 secara umum belum mencapai SNP, akan tetapi sudah meningkat dibandingkan tahun 2016. Pada Tahun 2017, capaian mutu yang paling baik adalah pada standar kompetensi lulusan dengan skor mutu sebesar 6,51 dan capaian mutu yang paling rendah ada pada standar sarana dan prasarana dengan skor mutu 2,96.



IKK #6 "Persentase SMA yang meningkat indeks efektifitasnya"

Target 2017 = 60%

Realisasi = 98,30%

Capaian 163,83%

PERBANDINGAN RENSTRA 2019

**Target 2019 =
95%**

**Capaian
103,5%**

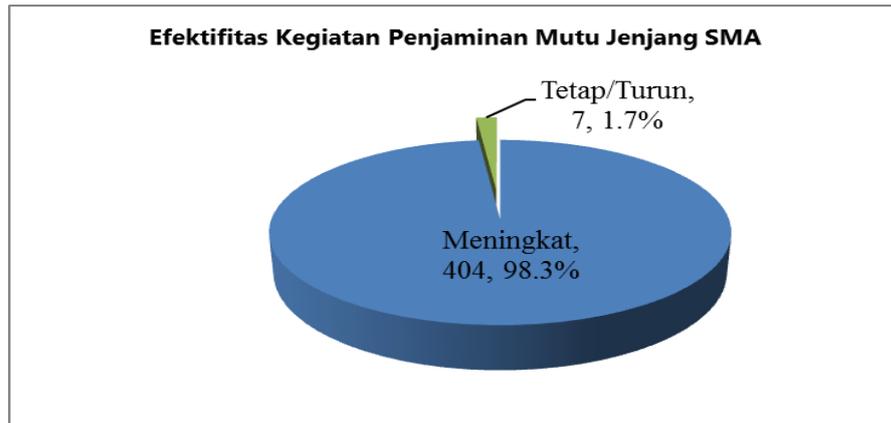
Indikator kinerja persentase SMP yang meningkat indeks efektifitasnya di Jawa Tengah telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 98,3% dari target PK sebesar 60%. Hasil yang diharapkan dalam kegiatan penjaminan mutu oleh sekolah itu sendiri adalah adanya peningkatan mutu pada satuan pendidikan secara berkelanjutan. Seperti telah dipaparkan sebelumnya, jumlah SMA di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi target pemetaan mutu pendidikan Tahun 2016 sebanyak 640 SMA dan pada Tahun 2017 sebanyak 854 SMA. Gambaran jumlah SMA yang berhasil diolah data mutu pendidikannya pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Rekapitulasi Jumlah SMA di Provinsi Jawa Tengah Yang Diolah Data Mutu Pendidikannya Tahun 2016 dan Tahun 2017

Tahun	Jumlah SMA	
	Target Pemetaan	Diolah Mutu Pendidikannya
2016	640	411
2017	854	804

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa ada perbedaan jumlah SMA yang berhasil diolah data mutunya, yaitu pada Tahun 2016 sebanyak 411 SMA dan pada Tahun 2017 sebanyak 804 SMA. Untuk itu, perhitungan indeks efektifitas kegiatan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada jumlah SMA pada Tahun 2016 yang diolah mutu pendidikannya yaitu sebanyak 411 SMA.

Efektifitas kegiatan penjaminan mutu pendidikan jenjang SMA di Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2016 ke Tahun 2017 dapat terlihat pada grafik berikut ini.



Dari grafik di atas dapat diketahui persentase jumlah SMA yang meningkat indeks efektifitasnya sebesar 98,3%, melebihi dari target persentase peningkatan indeks efektifitas (yaitu sebesar 60%). Data ini menunjukkan terjadi peningkatan mutu pendidikan pada Tahun 2017 dibandingkan Tahun 2016. Ini terlihat pula pada gambaran capaian mutu pendidikan dimana pada Tahun 2016 sebagian besar SMA (52,58%) di Provinsi Jawa Tengah memiliki kategori capaian mutu “menuju SNP level 3”. Sementara pada Tahun 2017, sebagian besar SMA (73,2%) capaian mutunya meningkat menjadi “menuju SNP level 4”.



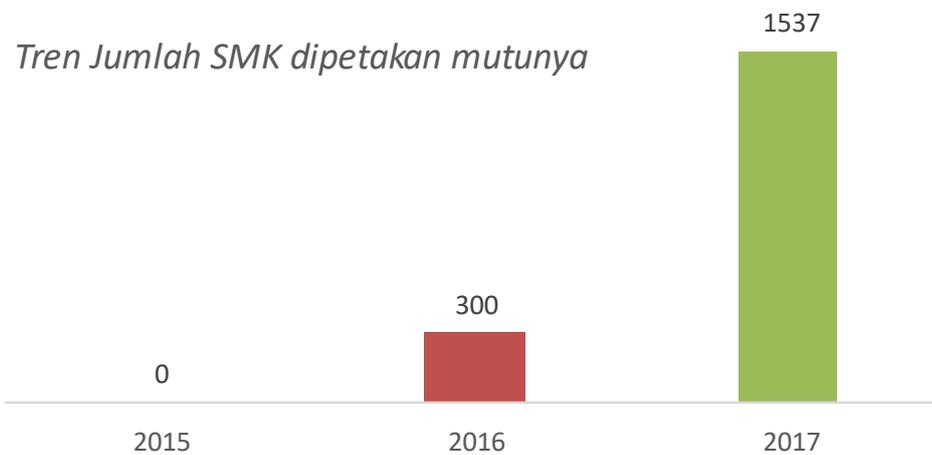
IKK #7 “Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya”

Realisasi 2016	Tahun 2017			Target Renstra 2019	Capaian Terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
30,03%	80%	100%	125	100%	100%

Indikator kinerja persentase Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) telah dipetakan mutunya di Jawa Tengah telah terealisasi sebesar 100% atau sejumlah 1537 SMK dari Target PK sebesar 80% dengan prosentase capaian sebesar 125%. Jumlah SMK di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi sasaran dipetakan mutu pendidikannya pada Tahun 2017 yaitu seluruh SMK sebanyak 1.537. Seluruh SMK tersebut telah melaksanakan pemetaan mutu sehingga indikator kinerja persentase SMK yang telah dipetakan mutunya adalah 100%. Dari 1.537 sekolah, sebanyak 1.448 sekolah

berhasil mengirimkan data hasil pemetaan mutunya. Dari jumlah tersebut, terdapat 1.446 sekolah yang berhasil diolah rapor mutunya.

Jika dibanding dengan tahun 2016 target SMK yang telah dipetakan mengalami kenaikan sejumlah 1.237 SMK. Tahun 2017 jumlah SMK yang dipetakan sebanyak 1.537 SMK, sedangkan pada tahun 2016 sejumlah 300 SMK.



Hasil capaian target diatas disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Fungsi koordinasi berjalan dengan baik antara LPMP Jawa Tengah dengan Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, khususnya Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah;
- 2) Adanya strategi pencapaian dengan mengoptimalkan fungsi pengawas dan melibatkan unsur diluar pengawas seperti Dinas Pendidikan kabupaten/kota.
 - ✓ Jumlah pengawas SMK yang dilatih untuk mendampingi kegiatan pemetaan mutu pada Tahun 2017 sejumlah 89 pengawas SMK. Setiap pengawas memiliki kewajiban mendampingi 10 sekolah dari sisi akademik, yakni terkait kualitas data hasil pemetaan. Sehingga terdapat 890 sekolah yang didampingi dalam pelaksanaan pemetaan mutu. Dengan asumsi bahwa di jenjang SMA responden kegiatan PMP sudah cukup mahir dalam pengoperasian komputer dan aplikasi PMP, maka jenjang SMK tidak mendapatkan bantuan teknis dari operator dinas pendidikan maupun operator UPTD.

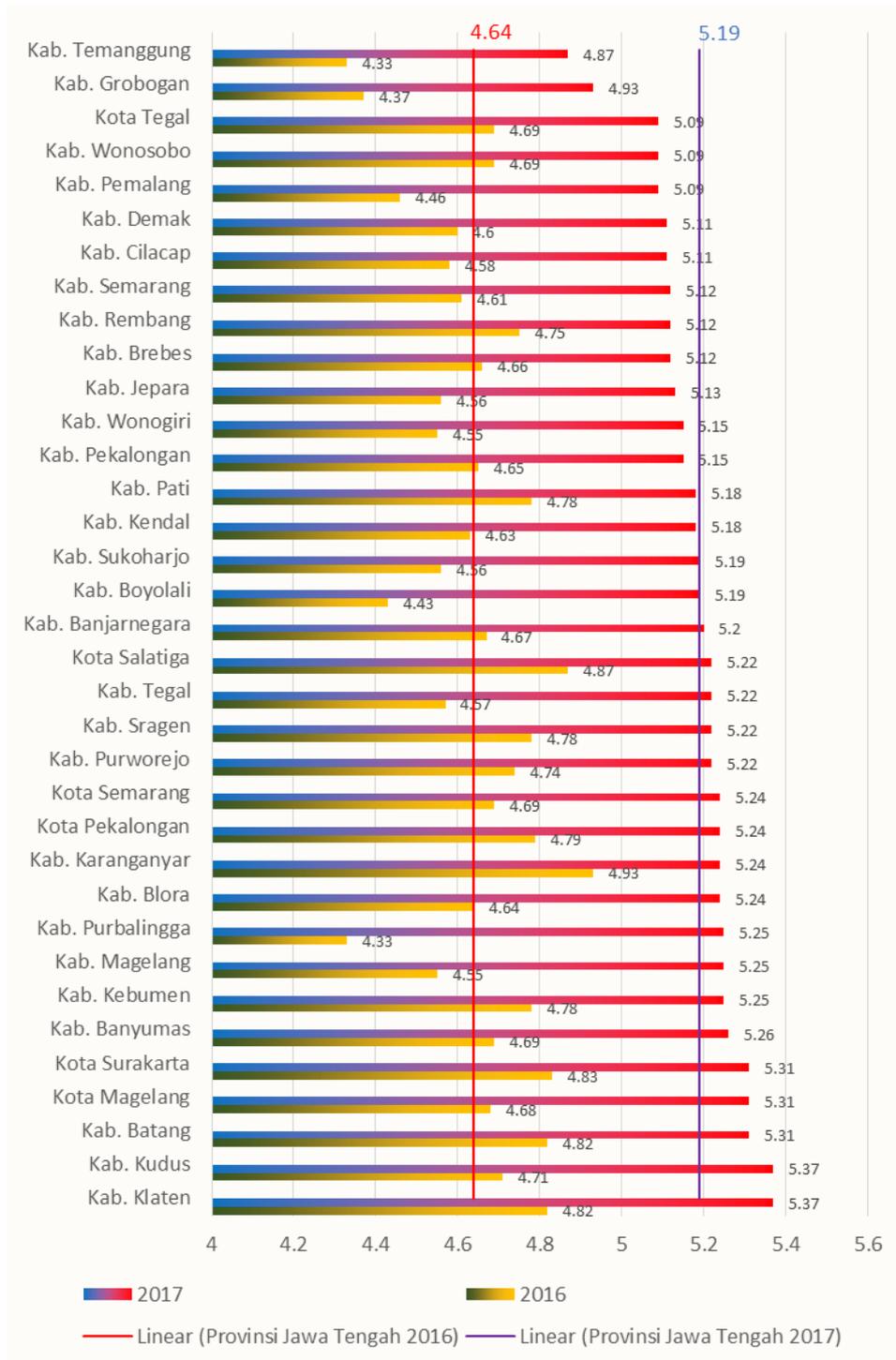
- ✓ Pengawas sekolah yang dilatih dan Dinas Pendidikan bertugas untuk membiaskan hasil pelatihan kepada pengawas sekolah lainnya yang tidak dilatih di LPMP.

Berikut adalah gambar perbandingan capaian jumlah SMK yang dipetakan mutu pendidikannya antara tahun 2016 dan 2017.

Gambaran capaian pelaksanaan program pemetaan mutu pendidikan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Gambaran Umum Capaian SNP

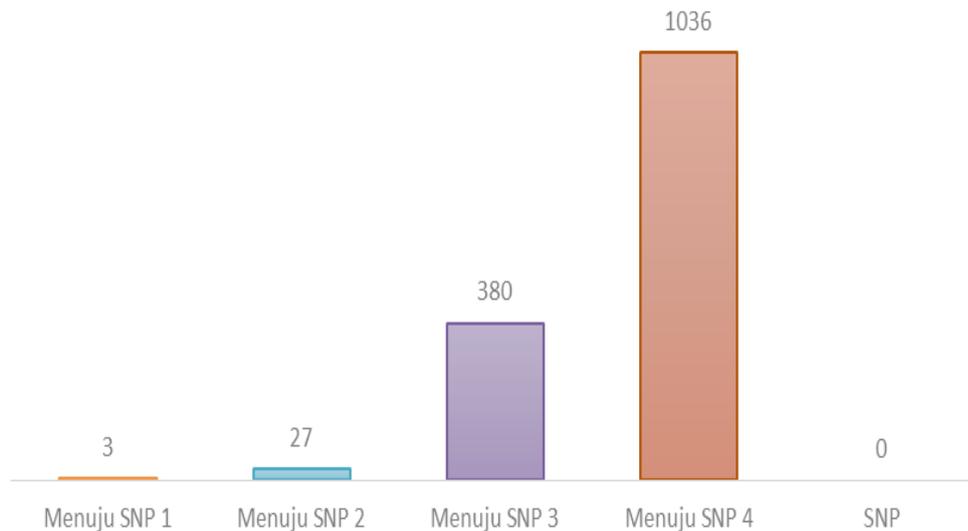
Dari 1.537 SMK yang dipetakan mutunya, sebanyak 1.446 sekolah yang dapat diolah peta mutunya. Sekolah yang tidak dapat diolah peta mutunya disebabkan karena (1) ada sekolah yang data pemetaan mutunya tidak sampai ke pusat, (2) ada juga sekolah yang mengirimkan data pemetaan mutunya melewati batas waktu yang ditetapkan, sehingga proses pengolahan datanya belum bisa dilakukan pada akhir tahun 2017 ini. Peta capaian mutu jenjang SMK di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Grafik Peta Capaian SNP Jenjang SMK
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Berdasarkan data pada grafik dapat diketahui bahwa capaian mutu SNP jenjang SMK di 35 kabupaten/kota seluruhnya dapat dikategorikan “menuju SNP level 4”. Jadi dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan jenjang SMK di Jawa Tengah hampir mencapai SNP.

Bila dilihat dari jumlah sekolahnya, gambaran capaian mutu dipaparkan pada gambar berikut ini.

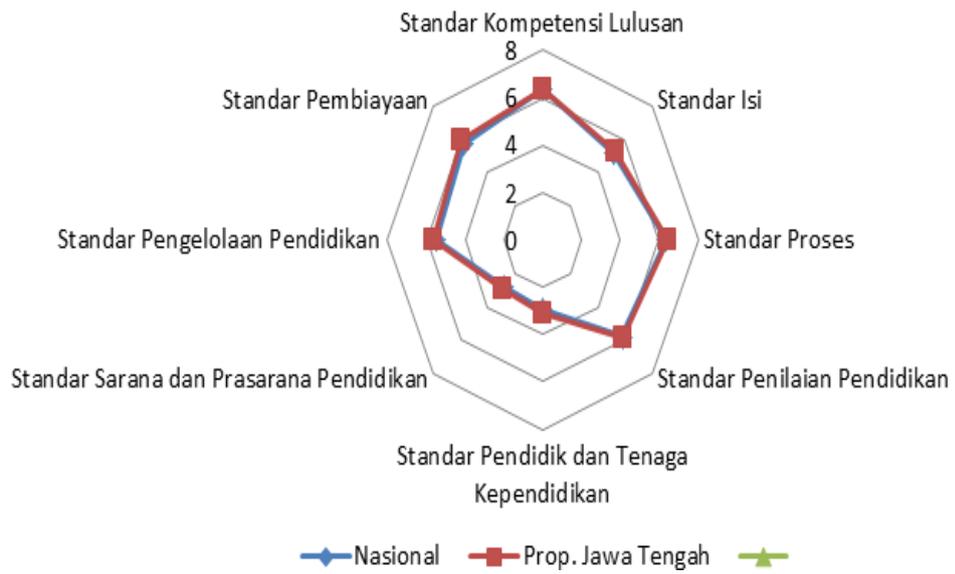


Grafik Jumlah Sekolah Berdasarkan Kategori Capaian SNP
Jenjang SMK Jawa Tengah Tahun 2017

Secara umum capaian mutu SNP jenjang SMK di 35 kabupaten/kota seluruhnya dapat dikategorikan “menuju SNP level 4”, tetapi bila dilihat dari masing-masing sekolah, belum ada SMK yang sudah mencapai SNP. Sementara itu, ada 1.036 SMK yang dapat dikategorikan capaian mutunya “menuju SNP level 4”. Hal ini sebagian besar SMK di Jawa Tengah capaian mutu SNP-nya hampir mendekati SNP. Sementara itu, ada pula SMK yang capaian mutunya masih jauh dari yang diharapkan yaitu menuju SNP level 1 sejumlah 3 SMK.

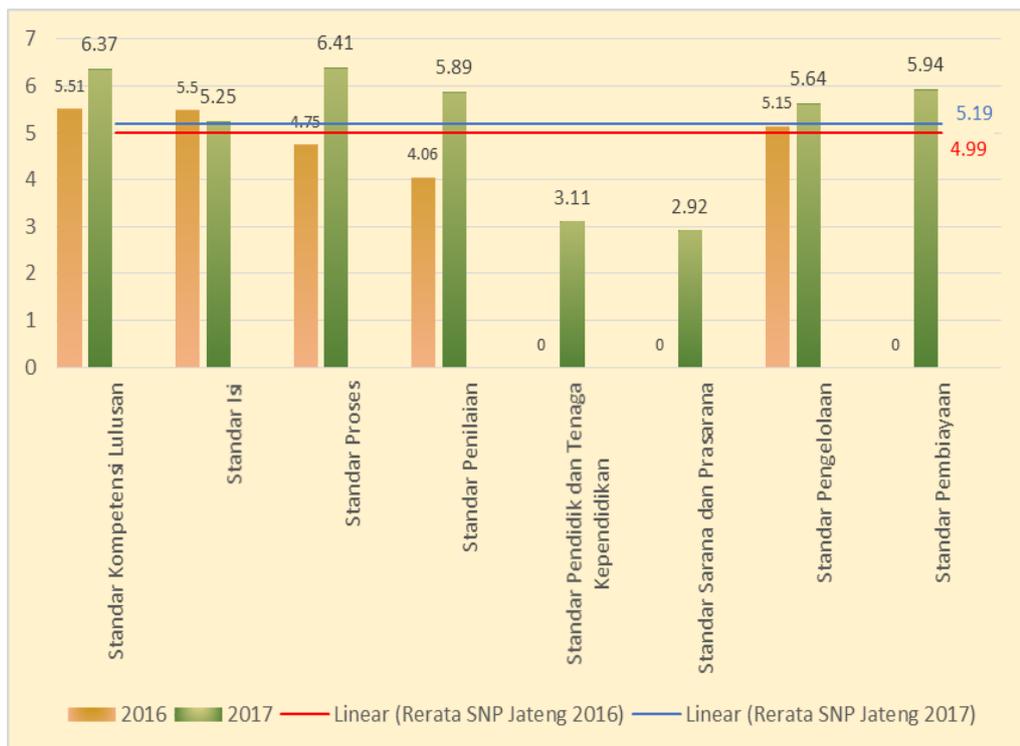
2. Capaian SNP untuk Setiap Standar

Gambaran capaian mutu jenjang SMK di Jawa Tengah untuk masing-masing standar dapat dilihat pada gambar 3.19 berikut.



Grafik Peta Capaian SNP Setiap Standar Jenjang SMK Jawa Tengah Tahun 2017

Skor capaian mutu jenjang SMK di Jawa Tengah untuk masing-masing standar dipaparkan pada grafik di bawah ini.



Grafik Skor Peta Capaian SNP Setiap Standar Jenjang SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa capaian mutu jenjang SD di Jawa Tengah pada tahun 2017 secara umum belum mencapai SNP, akan tetapi sudah meningkat dibandingkan tahun 2016. Pada Tahun 2017, capaian mutu yang paling baik adalah pada standar proses dengan skor mutu sebesar 6,41 dan capaian mutu yang paling rendah ada pada standar sarana dan prasarana dengan skor mutu 2,92.



IKK #8 "Persentase SMK yang meningkat indeks efektifitasnya"

Target 2017 = 45%

Realisasi = 97,90%

Capaian 217,56%

PERBANDINGAN RENSTRA 2019

**Target 2019 =
95%**

Capaian 103%

Indikator kinerja persentase SMP yang meningkat indeks efektifitasnya di Jawa Tengah telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 97,9% dari target PK sebesar 45%. Hasil yang diharapkan dalam kegiatan penjaminan mutu oleh sekolah itu sendiri adalah adanya peningkatan mutu pada satuan pendidikan secara berkelanjutan. Seperti telah dipaparkan sebelumnya, jumlah SMK di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi target pemetaan mutu pendidikan Tahun 2016 sebanyak 300 SMK dan pada Tahun 2017 sebanyak 1.537 SMK. Gambaran jumlah SMK yang berhasil diolah data mutu pendidikannya pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

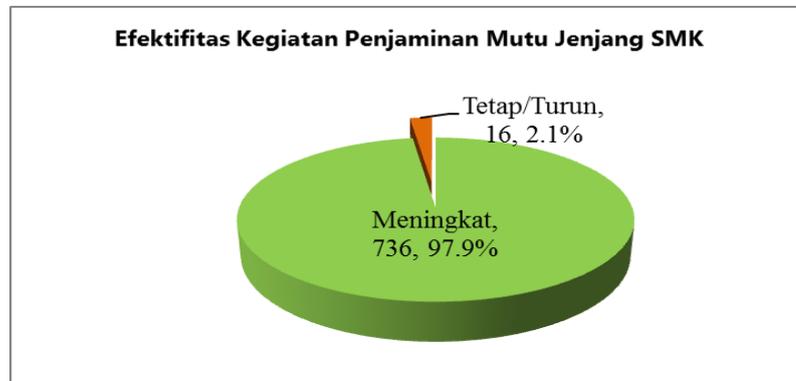
Tabel Rekapitulasi Jumlah SMK di Provinsi Jawa Tengah Yang Diolah Data Mutu Pendidikannya Tahun 2016 dan Tahun 2017

Tahun	Jumlah SMK	
	Target Pemetaan	Diolah Mutu Pendidikannya
2016	300	752
2017	1.537	1.446

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa ada perbedaan jumlah SMK yang berhasil diolah data mutunya, yaitu pada Tahun 2016 sebanyak 752 SMK dan pada Tahun 2017 sebanyak 1.446 SMK. Untuk itu, perhitungan indeks efektifitas kegiatan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Jawa Tengah

didasarkan pada jumlah SMK pada Tahun 2016 yang diolah mutu pendidikannya yaitu sebanyak 752 SMK.

Efektifitas kegiatan penjaminan mutu pendidikan jenjang SMK di Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2016 ke Tahun 2017 dapat terlihat pada Grafik berikut ini.



Dari Grafik di atas dapat diketahui persentase jumlah SMK yang meningkat indeks efektifitasnya sebesar 97,9%, melebihi dari target persentase peningkatan indeks efektifitas (yaitu sebesar 45%). Data ini menunjukkan terjadi peningkatan mutu pendidikan pada Tahun 2017 dibandingkan Tahun 2016. Ini terlihat pula pada gambaran capaian mutu pendidikan dimana pada Tahun 2016 sebagian besar SMK (55,28%) di Provinsi Jawa Tengah memiliki kategori capaian mutu “menuju SNP level 3”. Sementara pada Tahun 2017, sebagian besar SMK (71,7%) capaian mutunya meningkat menjadi “menuju SNP level 4”.

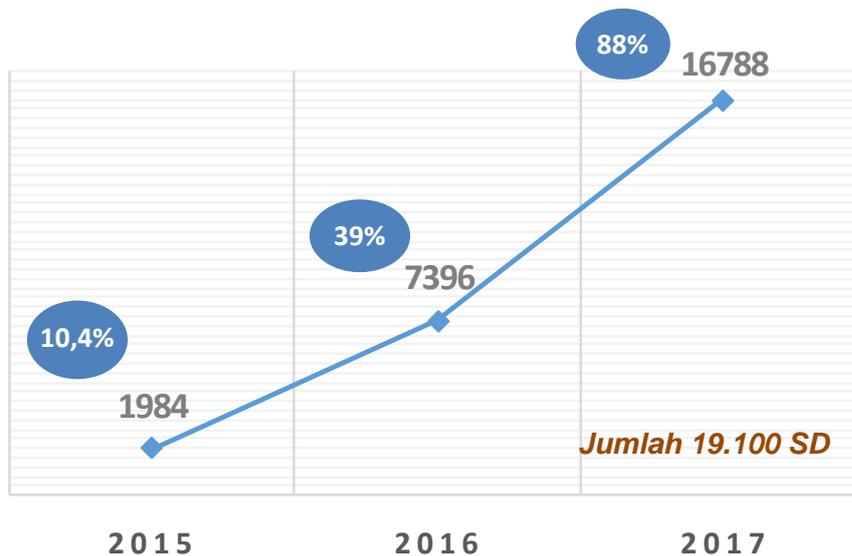


IKK #9 "Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP"

Realisasi 2016	Tahun 2017			Target Renstra 2019	Capaian Terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
39%	40%	88%	220	80%	110%

Indikator kinerja persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP telah terealisasi sebesar 88% atau sejumlah 16.788 sekolah dari target 40% atau 7.640 sekolah dengan persentase capaian 220%.

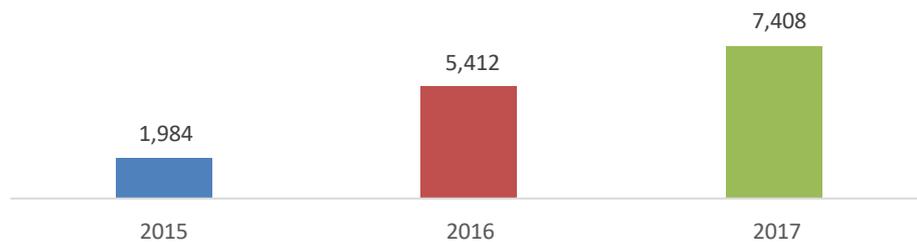
Tren Kenaikan jumlah SD yang disupervisi dan difasilitasi (komulatif)



Khusus capaian tahun 2017 sendiri ada sebanyak 7.408 sekolah yang telah disupervisi dan difasilitasi dari target yang ditetapkan 7.317 sekolah.

Pada tahun 2016 realisasi indikator persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP adalah 5.412 sekolah. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 7.408 sekolah. Ini berarti ada peningkatan sejumlah 1.996 sekolah sebagaimana dalam Grafik dibawah ini.

*Grafik capaian tahunan
SD yang disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP*



Capaian realisasi tahun 2017 sebanyak 7.408 sekolah tersebut di tunjang dengan beberapa program/kegiatan yaitu :

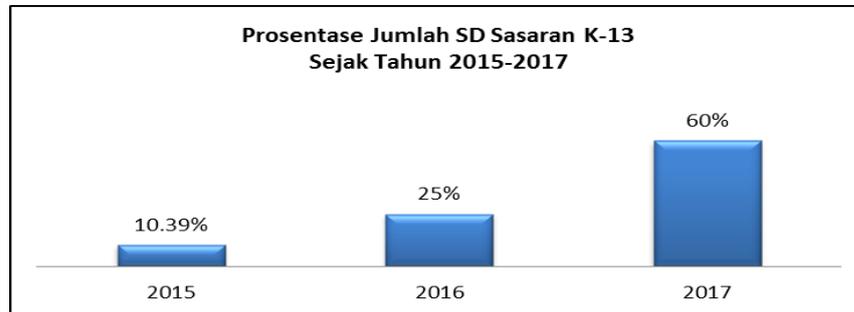
- realisasi program sekolah model sebanyak 494 sekolah;
- realisasi program supervisi Kurikulum 2013 kepada 70 sekolah;
- realisasi program pengembangan sekolah unggul melalui kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Magelang sebanyak 21 sekolah
- fasilitasi pelatihan dan pendampingan kurikulum tahun 2017 sebanyak 6823 sekolah; dan
- fungsi koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini dinas pendidikan kabupaten/kota yang berjalan dengan baik.

Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SD

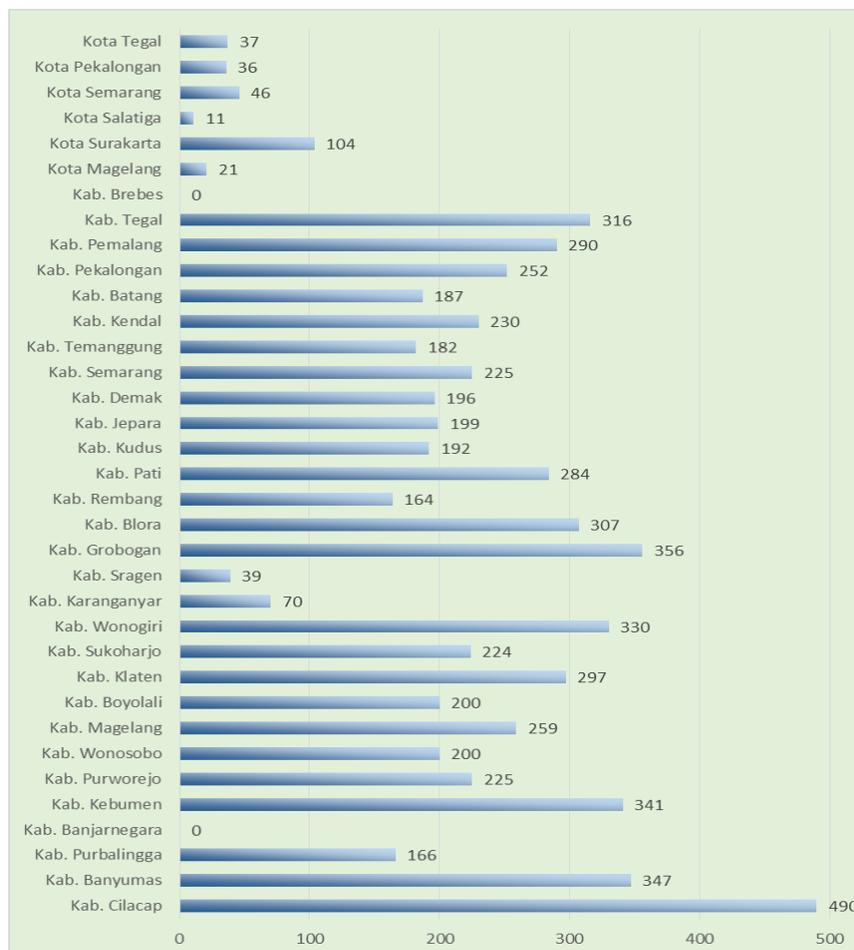
Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SD memiliki sasaran sejumlah 6.823 sekolah. Strategi untuk mencapai sasaran tersebut, maka LPMP Jawa Tengah menyelenggarakan beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut meliputi rapat koordinasi dengan kabupaten kota, *capacity building* bagi narasumber, bimtek bagi tim pengembang Kurikulum (TPK) tingkat Kabupaten/Kota, bimtek Kurikulum 2013 bagi guru sasaran, pendampingan Kurikulum 2013, pemberian bantuan pelaksanaan bimtek dan pendampingan kurikulum, monitoring dan evaluasi penggunaan dana bantuan pendampingan dan diakhiri dengan kegiatan evaluasi pelaporan kegiatan (kegiatan disini meliputi pelaporan penyelenggaraan Bimtek di TPK maupun pelaporan kegiatan pendampingan).

Sejak tahun 2015 sasaran Kurikulum 2013 untuk jenjang SD Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan. Sampai tahun 2015 sebanyak 10,39% sekolah, tahun 2016 bertambah menjadi 25% sekolah, sementara itu pada tahun 2017

bertambah 35% yaitu sejumlah 6.823 sekolah. Sehingga sampai tahun 2017 jumlah sekolah dasar sasaran implementasi Kurikulum 2013 di Provinsi Jawa Tengah kurang lebih sudah 60% sekolah, sebagaimana yang tertuang dalam grafik dibawah ini:



Adapun sebaran sekolah sasaran kurikulum 2013 tahun 2017 untuk jenjang SD sejumlah 6.823 sekolah, disajikan dalam bentuk tabel dan grafik berikut ini.



Grafik Sebaran Sekolah Sasaran Kurikulum 2013
Jenjang SD Jawa Tengah Tahun 2017

Dalam rangka mendukung implementasi Kurikulum 2013 di sekolah sasaran untuk jenjang SD perlu dilakukan bimbingan teknis (bimtek) dan pendampingan terhadap pelaksanaan di tingkat satuan pendidikan.

REKAPITULASI BIMTEK KURIKULUM 2013 JENJANG SD
TAHUN 2017

NO	Jenjang	Tim Pengembang K-13 Kabupaten/Kota			%	Guru Sasaran			%
		Kuota	Hadir	Tidak Hadir		Kuota	Hadir	Tidak Hadir	
1	SD	1.694	1.693	1	99,94	28.747	28.737	10	99,96

Bentuk kegiatan untuk memenuhi sasaran tersebut disajikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Bimbingan Teknis bagi Tim Pengembang Kurikulum 2013 tingkat Kabupaten/Kota Kurikulum 2013 dan Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 bagi Guru Sasaran. Pada bagian awal ditampilkan data rekapitulasi Bimtek bagi Tim Pengembang Kurikulum 2013 tingkat Kabupaten/Kota. Pada data tampak kehadiran pada peserta jenjang kelas I, kelas IV dan kelas agama. Kehadiran peserta pada bimbingan teknis Tabel dibawah ini. Bimtek Tim Pengembang Kurikulum 2013 tingkat Kabupaten/Kota kurikulum 2013 tiap kelas jenjang SD adalah 99,94%.

Matriks Peserta
Bimtek Tim Pengembang Kurikulum 2013 Kabupaten/Kota Kurikulum 2013
tiap Kelas pada Jenjang SD

No	Kegiatan	Jumlah Kelas 1	Jumlah kelas 4	Jumlah Kelas Agama	Jumlah
1	Bimtek tim pengembang Kurikulum (TPK) tingkat Kab/Kota Kurikulum 2013	811	810	76	1.693

Bimbingan teknis Tim Pengembang Kurikulum 2013 tingkat Kabupaten/Kota kurikulum 2013 tiap kelas jenjang SD diselenggarakan di LPMP Jawa Tengah. Hasil dari kegiatan Bimbingan teknis tersebut menyatakan bahwa seluruh peserta lulus. Tugas tim pengembang kurikulum setelah dinyatakan lulus dari kegiatan bimbingan teknis, antara lain adalah mengembangkan kurikulum 2013 di tingkat kabupaten/

kota masing masing, membimbing secara teknis para guru sekolah sasaran di sekolah penyelenggara/TPK Bimtek Kurikulum 2013 bagi Guru Sasaran, mendampingi guru saat mengimplementasikan kurikulum 2013 di sekolah masing masing. Secara umum untuk kegiatan pendampingan tim pengembang kurikulum 2013 jenjang SD dipilih pengawas. Adapun jika jumlah pengawas kurang, maka kepala sekolah potensial lah yang biasanya diajukan oleh dinas pendidikan kabupaten/ kota masing-masing. Matriks kelulusan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) tingkat Kabupaten/Kota disajikan pada tabel berikut ini:

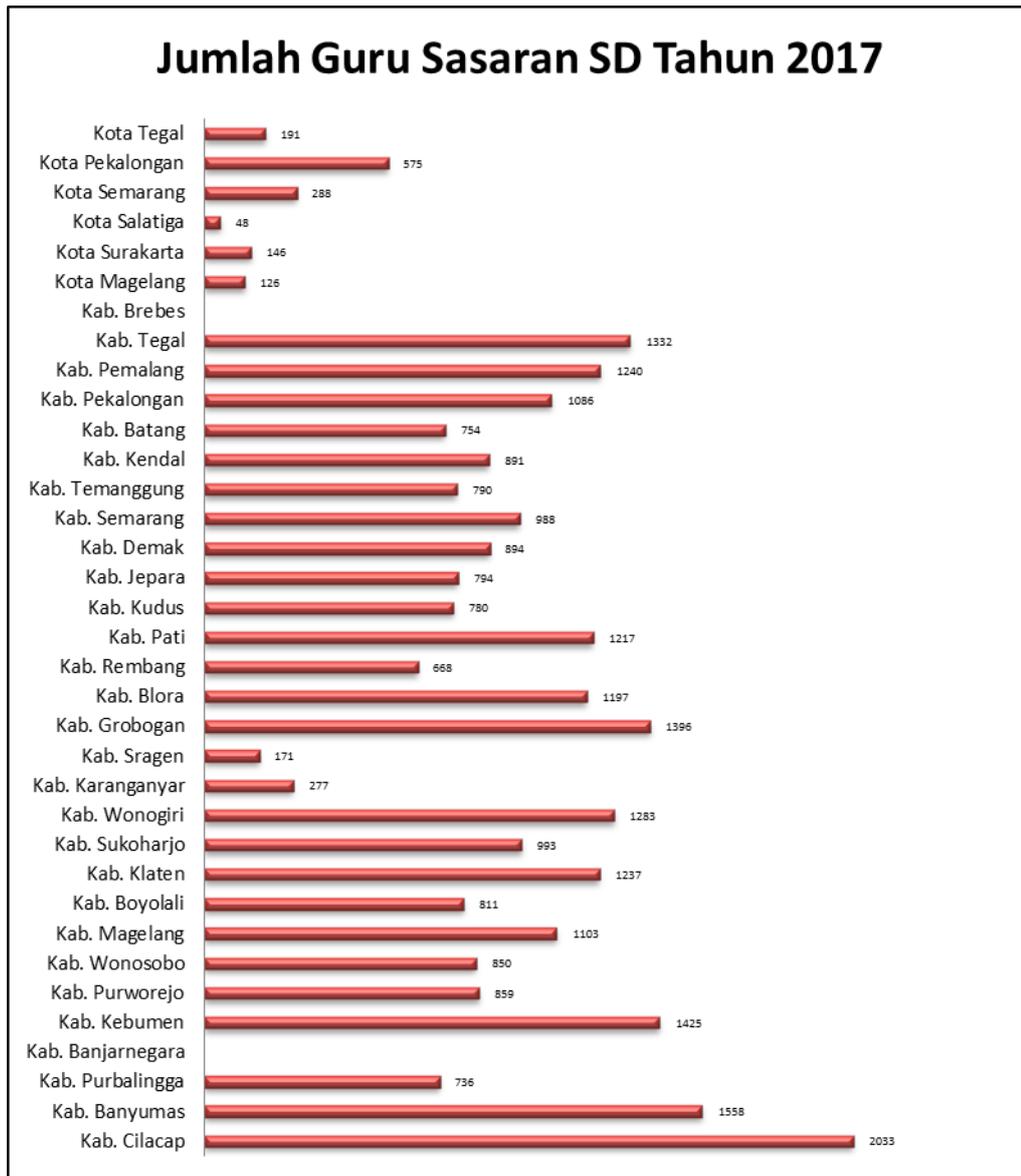
**Matriks Kelulusan
Peserta Bimtek Instruktur Kabupaten/Kota Kurikulum 2013 Jenjang SD**

No	Jenjang	Jumlah	Lulus	Tidak Lulus	Kelulusan (%)
1	Kelas I	811	811	-	100
2	Kelas IV	810	810	-	100
3	Agama	76	76	-	100
	Jumlah	1.693	1.693	-	100



Gb. Aktivitas Peserta Kegiatan Bimtek Tim Pengembang Kurikulum 2013 Kabupaten/ Kota jenjang SD

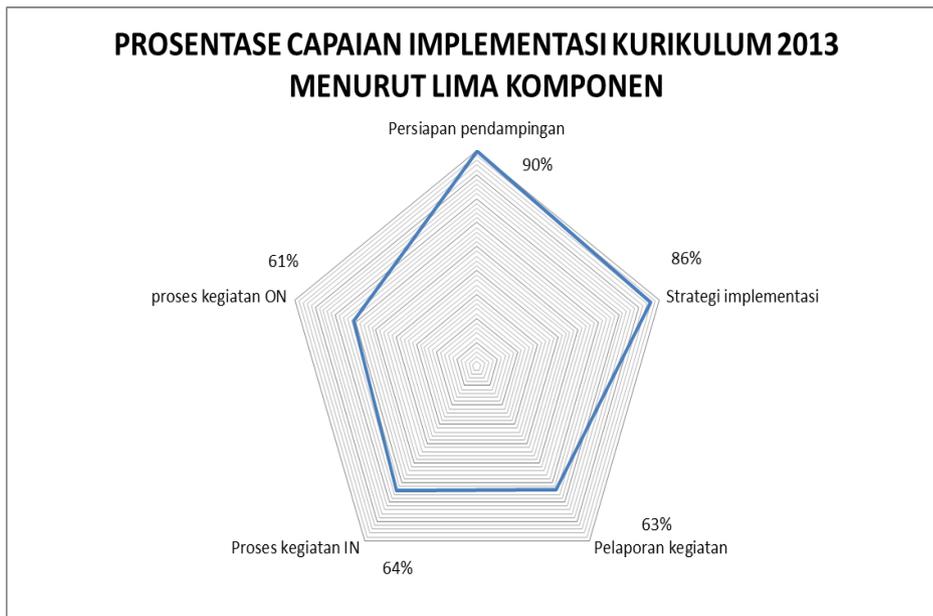
Bimbingan teknis kurikulum 2013 bagi guru sasaran diselenggarakan di sekolah penyelenggara bimtek (TPK). Adapun data peserta bimtek Kurikulum 2013 bagi Guru Sasaran Jenjang SD setiap Kabupaten/Kota sejumlah 28.737 yang terdiri dari Kepala Sekolah, Guru Kelas I, Guru Kelas IV, dan Guru Agama/PJOK disajikan pada grafik berikut.



Secara keseluruhan capaian pelaksanaan Bimtek Kurikulum 2013 bagi Guru Sasaran terealisasi sebesar 99,96%. Beberapa alasan ketidak tercapaian tersebut, antara lain beberapa peserta: a) memasuki masa pensiun; b) alasan kesehatan; c) mengikuti kegiatan lain yang bersamaan.

Setelah kegiatan bimbingan teknis bagi guru sasaran kegiatan dilanjutkan dengan program Pendampingan Kurikulum 2013 kepada sekolah sasaran yang dilakukan oleh Tim Pengembangan Kurikulum 2013 Kab/Kota. Kegiatan pendampingan dilaksanakan dengan pola *In-On-In*. Penyelenggaraan pendampingan implementasi kurikulum 2013, diselenggarakan dengan

menggunakan anggaran bantuan pemerintah terhadap sekolah sasaran. Di Jawa Tengah untuk jenjang SD terdapat sejumlah 703 sekolah inti. Pada tiap sekolah inti bergabung lebih kurang 10 sekolah sasaran. Pengelolaan dana bantuan pemerintah yang diberikan melalui sekolah inti juga dikelola secara kolektif. Selama proses pendampingan dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi diselenggarakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendampingan dilakukan sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh LPMP Jawa Tengah. Adapun hasil monitoring disampaikan pada grafik berikut ini.



Instrumen yang dikembangkan untuk melakukan monev ada lima komponen utama. Komponen tersebut adalah persiapan pendampingan, strategi implementasi, penyusunan laporan kegiatan, proses kegiatan IN dan proses kegiatan ON. Pada grafik tampak bahwa pada komponen persiapanlah yang dapat dikatakan dari 703 sekolah inti sudah siap mulai proposal, pendanaan, perencanaan kegiatan sampai dengan pendampingnya. Disajikan pada grafik bahwa kesiapan mereka sebesar 90%. Akan tetapi kesiapan mereka yang 90% tersebut menjadi sangat berkurang tatkala strategi yang telah dirancang di LPMP Jawa Tengah hanya dapat terlaksana sebesar 86%. Strategi implementasi sebenarnya lebih memfokuskan pada keterampilan kepala sekolah dasar inti dan pendamping dalam melakukan pendampingan. Responden monev menilai strategi implementasi kurikulum 2013 efektifitasnya hanya sebesar 86%. Hal ini

berakibat pada proses penyusunan laporan, proses kegiatan IN dan proses kegiatan ON. Ketiga komponen tersebut memiliki capaian sebesar kurang dari 70%. Kendala yang muncul saat mereka melakukan kegiatan In dan On service adalah terlalu padatnya kegiatan di sekolah maupun di dinas pendidikan di luar kegiatan pendampingan kurikulum 2013. Mungkin inilah yang menyebabkan proses kegiatan In dan On tidak dapat diselenggarakan sesuai dengan strategi yang sudah mereka rancang sejak awal.

Hambatan dan Kendala

Beberapa hambatan utama yang muncul selama penyelenggaraan supervisi adalah:

- a) Waktu pelaksanaan rangkaian kegiatan di tingkat pusat kurang awal. Rangkaian kegiatan sekolah model SPMI membutuhkan alokasi waktu yang memadai sehingga cukup untuk melaksanakan siklus dari pemetaan mutu, perencanaan peningkatan mutu, pelaksanaan peningkatan mutu, audit mutu hingga penetapan standar mutu baru. Idealnya, kegiatan di tingkat pusat dapat dilaksanakan seawal mungkin sehingga kegiatan di daerah dan sekolah dapat segera dimulai, karena bila kegiatan dilaksanakan dengan waktu yang mepet dikawatirkan akan mempengaruhi kualitas proses maupun hasilnya.
- b) Jumlah bantuan pemerintah belum cukup. Bantah sekolah model SPMI Sekolah Model senilai Rp 8.000.000,- dirasa kurang karena baru bisa membantu untuk penyelenggaraan sosialisasi, rapat persiapan, rapat evaluasi, kunjungan ke sekolah imbas dan pelaporan. Sedangkan kegiatan pelaksanaan peningkatan mutu yang merupakan inti dari SPMI belum tersentuh bantah tersebut.
- c) Supervisi K13 belum teranggarkan sejak awal. Kegiatan supervisi satuan pendidikan dalam aspek pelaksanaan K13, seperti halnya supervisi pemantauan USBN/UN/US, belum teranggarkan dalam DIPA sejak awal, meskipun merupakan kegiatan utama sesuai dengan tugas dan fungsi LPMP. Kegiatan-kegiatan ini merupakan usulan/revisi yang sangat tergantung dari jumlah efisiensi kegiatan-kegiatan lain, sehingga jumlah sarannya fluktuatif.
- d) Indikator ketercapaian sekolah yang disupervisi disatukan dengan sekolah yang difasilitasi. Dengan penyatuan indikator capaian ini menyulitkan dalam

menghitung capaian kinerja karena penekanan capaian hasil dari kegiatan supervisi dan fasilitasi bisa jadi tidak sama. Sebaiknya indikator capaian kedua program tersebut dipisah.

Langkah antisipasi yang dilakukan ke depan

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut adalah:

- Mengupayakan mulainya kegiatan sekolah model SPMI seawal mungkin serta berkoordinasi dengan satgas penjaminan mutu di tingkat pusat,
- Mengusulkan jumlah bantuan pemerintah untuk sekolah model SPMI bisa ditingkatkan agar lebih bisa membantu sekolah dalam implementasi program,
- Mengusulkan program-program supervisi satuan pendidikan menjadi sasaran kinerja lembaga yang perlu prioritas, khususnya supervisi kurikulum 2013 , supervisi pelaksanaan USBN, Supervisi Pelaksanaan UN/UNBK, dan Supervisi Pelaksanaan US.
- Mengusulkan perumusan indikator kinerja bidang supervisi mutu pendidikan dipisah dari bidang fasilitasi peningkatan mutu agar lebih jelas berapa sekolah yang telah disupervisi mutunya.

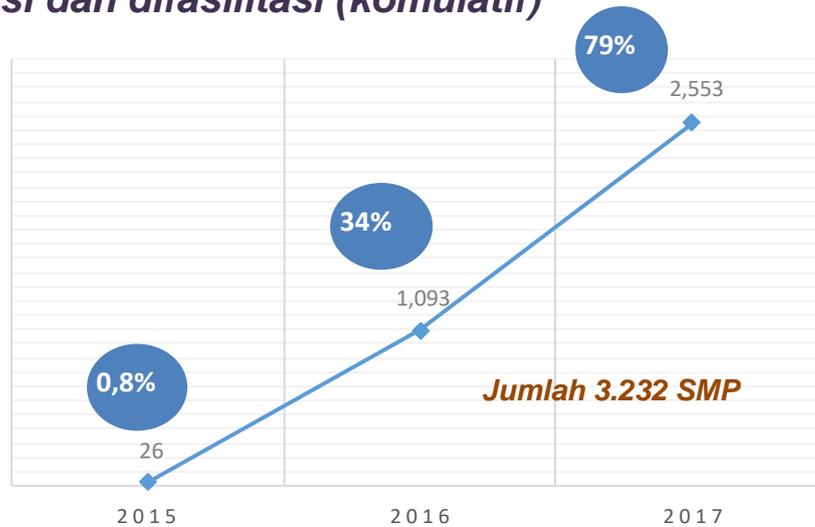


IKK #10 "Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP"

Realisasi 2016	Tahun 2017			Target Renstra 2019	Capaian Terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
34%	40%	79%	197	80%	98,75%

Indikator kinerja persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP telah terealisasi sebesar 79% atau sejumlah 2.553 sekolah dari target 40% atau 1293 sekolah dengan persentase capaian 197%. Total jumlah sekolah SMP di provinsi Jateng sebanyak 3.232 sekolah.

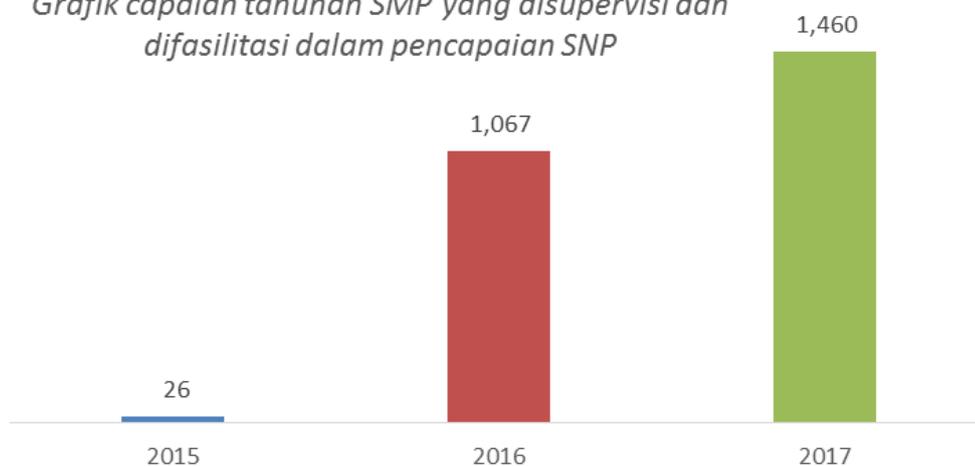
Tren Kenaikan jumlah SMP yang disupervisi dan difasilitasi (komulatif)



Khusus capaian tahun 2017 sendiri ada sebanyak 1.460 SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dari target yang ditetapkan 1.418 sekolah.

Pada tahun 2016 realisasi indikator persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP adalah 1.067 sekolah. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 1.460 sekolah. Ini berarti ada peningkatan sejumlah 393 sekolah sebagaimana dalam gambar dibawah ini.

Grafik capaian tahunan SMP yang disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP



Capaian realisasi tahun 2017 sebanyak 1.460 sekolah tersebut ditunjang dengan beberapa program/kegiatan yaitu :

- a) realisasi kegiatan sekolah model SPMI sebanyak 171 sekolah;
- b) realisasi program supervisi kurikulum 2013 kepada sebanyak 70 sekolah;
- c) pengembangan sekolah unggul jenjang SMP sebanyak 8 sekolah
- d) fasilitasi pelatihan dan pendampingan kurikulum tahun 2017 sebanyak 1.211 sekolah; dan
- e) fungsi koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini dinas pendidikan dan dinas pendidikan kabupaten/kota yang berjalan dengan baik.

Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMP.

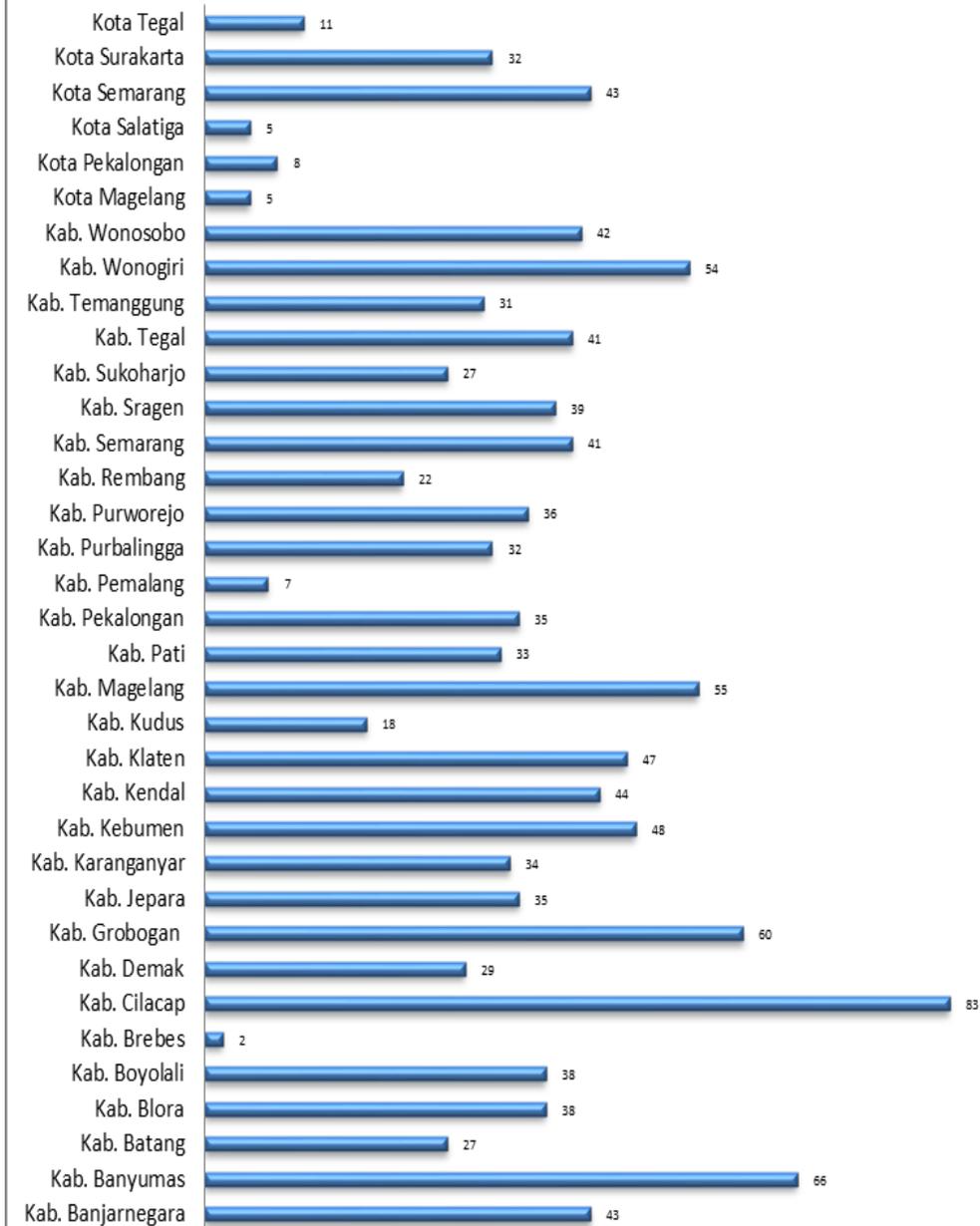
Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMP memiliki sasaran sejumlah 1.211 sekolah. Strategi untuk mencapai sasaran tersebut, maka LPMP Jawa Tengah menyelenggarakan beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut meliputi rapat koordinasi dengan kabupaten/kota, *capacity building* bagi narasumber, bimtek bagi tim pengembang Kurikulum (TPK) tingkat Kabupaten/Kota, bimtek Kurikulum 2013 bagi guru sasaran, pendampingan Kurikulum 2013, pemberian bantuan pelaksanaan bimtek dan pendampingan kurikulum, monitoring dan evaluasi penggunaan dana bantuan pendampingan dan diakhiri dengan kegiatan evaluasi pelaporan kegiatan (kegiatan disini meliputi pelaporan penyelenggaraan Bimtek di TPK maupun pelaporan kegiatan pendampingan).

Sejak tahun 2015 sasaran Kurikulum 2013 untuk jenjang SMP Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 sebanyak 176 sekolah, tahun 2016 bertambah 799 sekolah, sementara itu pada tahun 2017 bertambah 1.211 sekolah yang tertuang dalam gambar berikut ini:



Adapun sebaran sekolah sasaran kurikulum 2013 tahun 2017 untuk jenjang SMP disajikan dalam bentuk grafik berikut ini.

Jumlah SMP Sasaran Kurikulum 2013 Tahun 2017

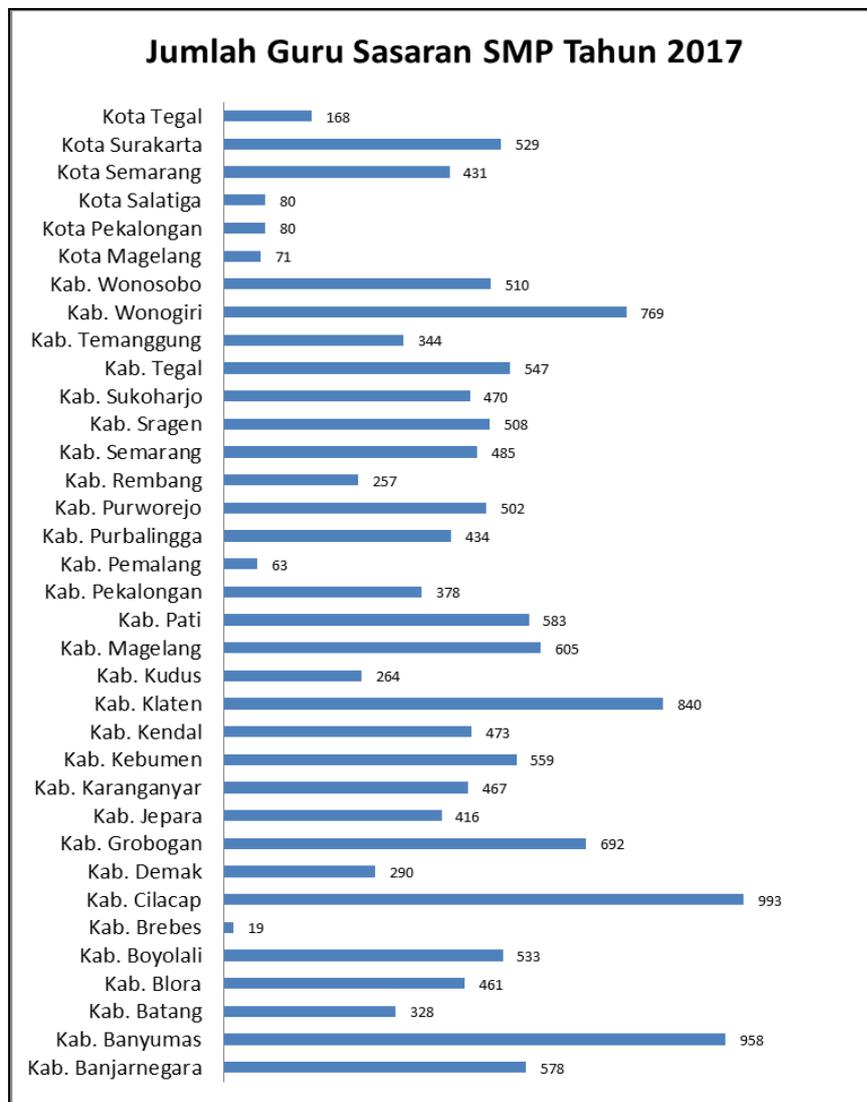


Dalam rangka mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah sasaran jenjang SMP dilakukan bimbingan teknis (bimtek) dan pendampingan terhadap pelaksanaan di tingkat satuan pendidikan, berikut rekapitulasinya.

**REKAPITULASI BIMTEK KURIKULUM 2013 JENJANG SMP
TAHUN 2017**

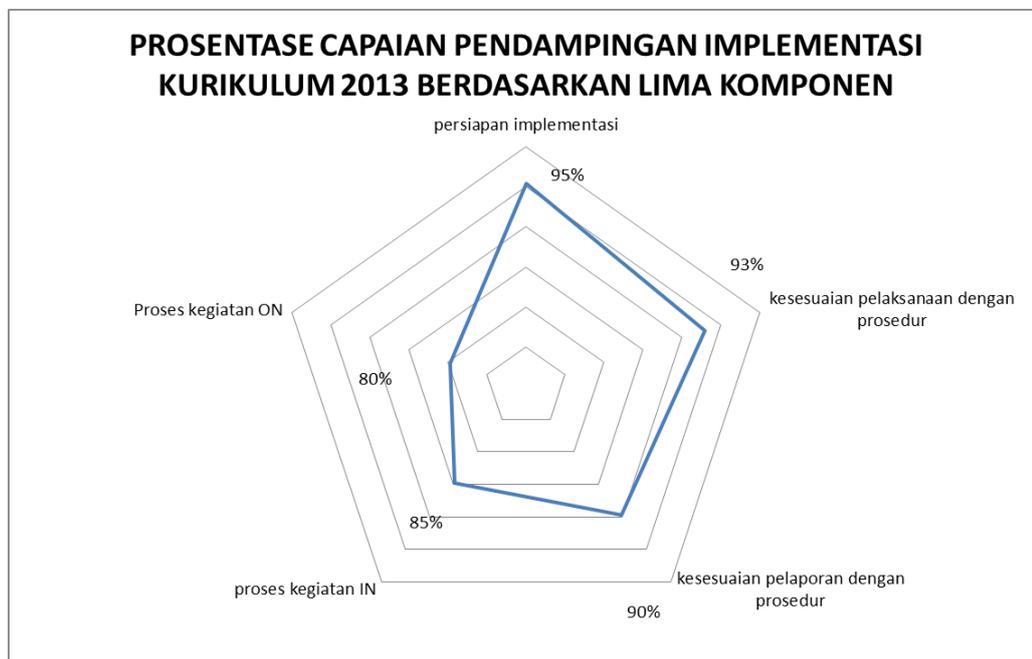
NO	Jenjang	Tim Pengembang K-13 Kabupaten/kota			%	Guru Sasaran			%
		Kuota	Hadir	Tidak Hadir		Kuota	Hadir	Tidak Hadir	
1	SMP	1.240	1.226	14	98,87	15.900	15.685	215	98,65

Sebaran guru sasaran SMP Implementasi kurikulum 2013 tiap kabupaten/kota meliputi mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, PPKn, PJOK, Seni Budaya, Prakarya, Pend. Agama dan Budi Pekerti disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut.



Secara keseluruhan capaian pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 jenjang SMP untuk Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 2013 Kabupaten/Kota pada tahun 2017 adalah 98,87%, dan untuk Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 Bagi Guru Sasaran sebesar 98,65%. Ketidakhadiran tersebut disebabkan adanya data ganda di beberapa sekolah, alasan kesehatan dan pelaksanaan Bimtek Kurikulum 2013 bersamaan waktunya dengan kegiatan yang lain.

Selanjutnya untuk mengetahui pelaksanaan pendampingan kurikulum 2013 di tingkat SMP di Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah berjalan sesuai dengan pedoman maka diadakan Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pendampingan Kurikulum Jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun 2017 di 315 Induk Klaster penerima bantuan pemerintah. Hasil monitoring dan evaluasi disajikan pada grafik berikut ini.



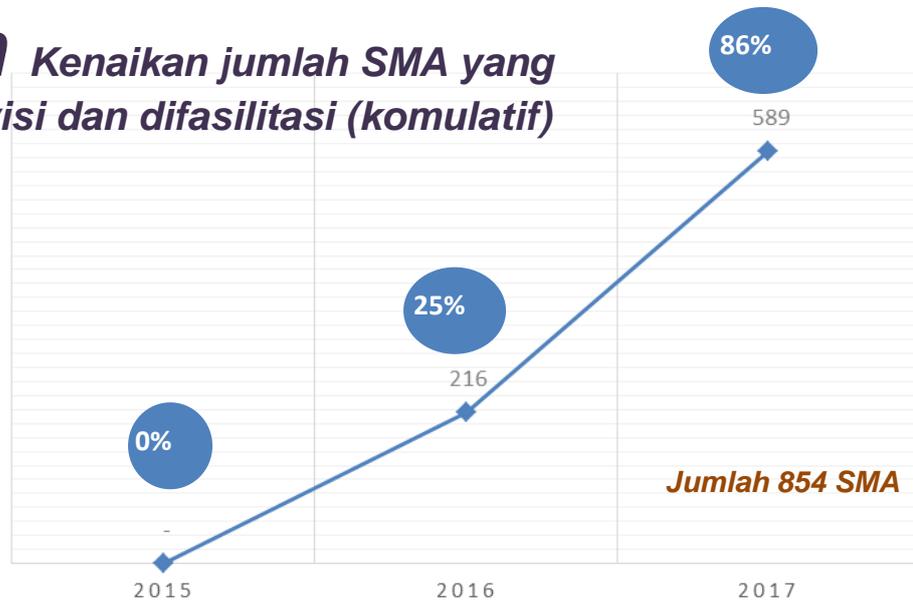


IKK #11 “Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP”

Realisasi 2016	Tahun 2017			Target Renstra 2019	Capaian Terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
25%	40%	69%	172	80%	141%

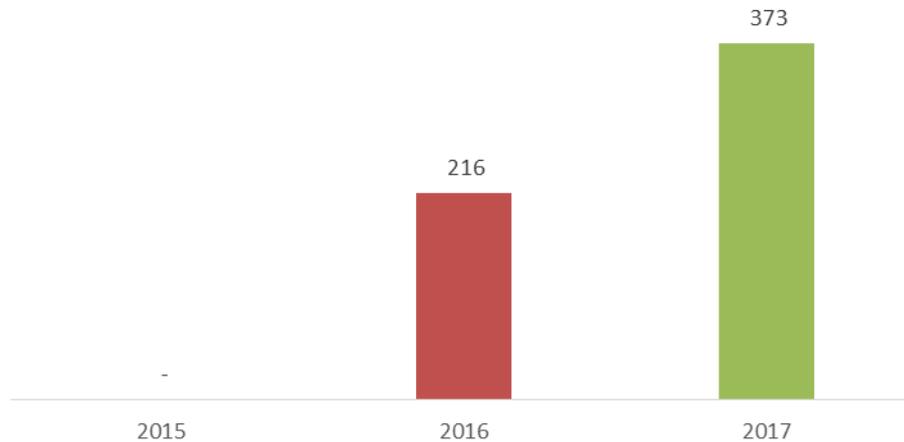
Indikator kinerja persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP telah terealisasi sebesar 69% atau sejumlah 589 sekolah dari target 40% atau 342 sekolah dengan persentase capaian 172%. Total jumlah sekolah SMA di provinsi Jateng sebanyak 854 sekolah.

Tren Kenaikan jumlah SMA yang disupervisi dan difasilitasi (komulatif)



Pada tahun 2016 realisasi indikator persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP adalah 216 sekolah. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 373 sekolah. Ini berarti ada peningkatan sejumlah 157 sekolah sebagaimana dalam gambar di bawah ini:

Grafik capaian tahunan SMA yang disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

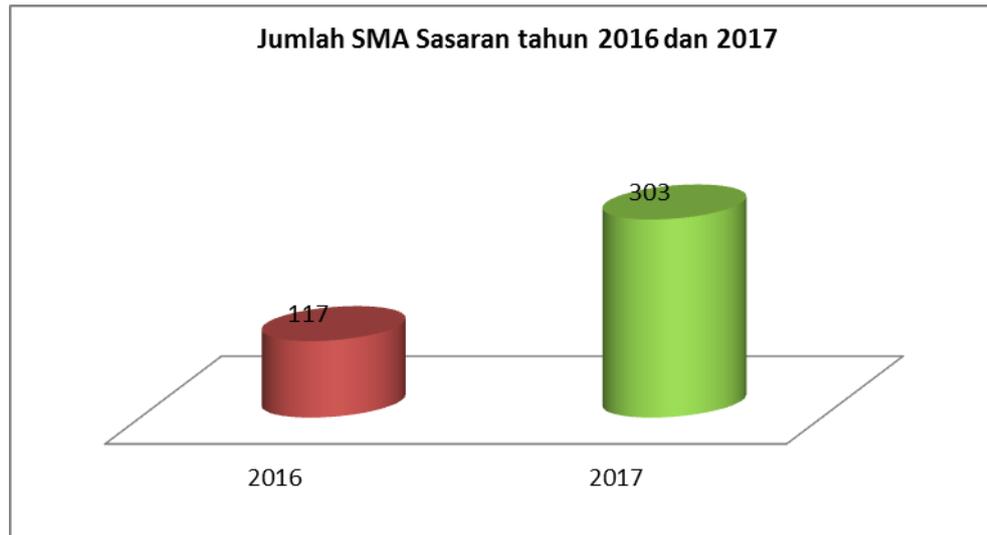


Capaian realisasi tahun 2017 sebanyak 373 sekolah tersebut ditunjang dengan beberapa program/kegiatan yaitu :

- a) realisasi program sekolah model sebanyak 70 sekolah;
- b) fasilitasi pelatihan dan pendampingan kurikulum tahun 2016 sebanyak 303 sekolah; dan
- c) fungsi koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini dinas pendidikan dan dinas pendidikan kabupaten/kota yang berjalan dengan baik.

Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2013 telah menetapkan pentahapan implementasi Kurikulum 2013 sampai dengan tahun 2019/2020. Berdasarkan tahapan implementasi yang sudah direncanakan, pada tahun pelajaran 2016/2017, jumlah SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013 sebanyak 117, sedangkan pada tahun 2017/2018 akan diperbanyak menjadi 60% dengan tambahan sebanyak 303 SMA yang tersebar 31 Kabupaten/Kota. Jika dibandingkan tahun 2016 jumlah sekolah sasaran Kurikulum 2013 mengalami kenaikan dari 117 menjadi 303 yang tertuang dalam gambar berikut.



Sejalan dengan aturan pemerintah mengenai perpindahan penanggungjawab sekolah menengah atas pada pemerintah provinsi, maka dalam pelaksanaan implementasi Kurikulum 2013 LPMP Jawa Tengah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan BPPMK seluruh Wilayah di Jawa Tengah bahkan dengan MKKS.

Urutan kegiatan Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMA terdiri dari Bimbingan Teknis Instruktur Kurikulum 2013 Kabupaten/Kota Jenjang SMA, Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 bagi Guru sasaran Jenjang SMA, Sosialisasi Pelaksanaan Kurikulum dengan Kabupaten/Kota, Sosialisasi dan Penandatanganan MoU Pemberian Bantuan Bimtek Guru Sasaran Kurikulum 2013, *Capacity Building* bagi narasumber, Pemberian Bantuan Pelaksanaan Kurikulum 2013.

Berikut adalah keterlaksanaan Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMA :

a) Sosialisasi Pelaksanaan Kurikulum 2013 dengan Kab/Kota Jenjang SMA.

Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan pada awal tahun dengan mengundang unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, BPPMK semua wilayah, Ketua MKKS SMA Kab/Kota dan operator sekolah. Jumlah peserta yang diundang pada kegiatan ini sebanyak 77 orang, sedangkan yang hadir sebanyak 76 orang.

Hasil yang didapatkan dari kegiatan ini adalah terbentuknya sekolah yang akan menjadi Tempat Pelaksanaan Kegiatan (TPK) pada tiap Kab/Kota yang ditentukan oleh Ketua MKKS SMA Kab/Kota dan data guru yang

tervalidasi jumlah dan mata pelajarannya yang akan menjadi peserta pada kegiatan Bimtek Guru Sasaran. Validasi guru sasaran dengan mata pelajaran yang diampu sangat penting karena akan digunakan untuk pendistribusian modul yang akan diberikan pada saat Bimtek Kurikulum 2013 bagi Guru Sasaran.

- b) Sosialisasi dan Penandatanganan MoU Pemberian Bantuan Bimtek Guru Sasaran Kurikulum 2013.

Tujuan kegiatan ini adalah agar seluruh rangkaian kegiatan Bimtek Kurikulum 2013 bagi Guru Sasaran dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal. Jumlah peserta yang diundang pada kegiatan ini sebanyak 124 orang, sedangkan yang hadir sebanyak 120 orang.

- c) *Capacity Building* bagi Narasumber

Pelaksanaan *Capacity Building* bagi narasumber dilaksanakan setelah Bimtek penyegaran Narasumber yang dilaksanakan di tingkat pusat. Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan para narasumber dan merumuskan strategi Bimtek Instruktur Kurikulum 2013 Kab/Kota dan Guru Sasaran.

Pada kegiatan *capacity building* ini diharapkan peserta untuk bisa memahami strategi Bimbingan Teknis dan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 dan melakukan sinkronisasi materi dan perangkat Bimtek Penyegaran Instruktur Kabupaten/Kota dan Guru Sasaran Kurikulum 2013 Jenjang SMA.

Selain itu, kegiatan ini juga membuat strategi pelaksanaan kegiatan pendampingan guru sasaran. Peserta yang diundang adalah Instruktur Provinsi, dan Fungsional Umum LPMP Jawa Tengah sebanyak 70 orang sedangkan yang hadir sebanyak 68 orang.



Instruktur Provinsi sedang berdiskusi dan menyiapkan bahan untuk kegiatan Bimtek Kurikulum 2013 bagi Guru Sasaran

d) Bimbingan Teknis Instruktur Kurikulum 2013 Kabupaten/Kota Jenjang SMA.

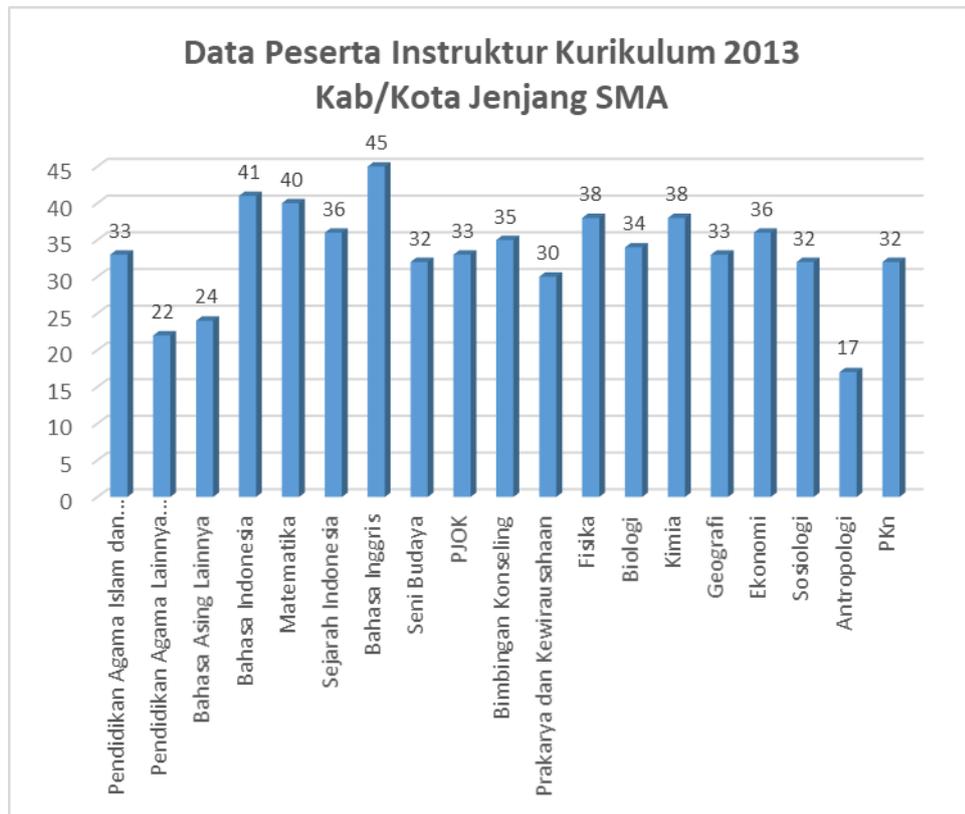
Kegiatan Bimtek Instruktur Kurikulum 2013 Kabupaten/Kota jenjang SMA ini merupakan kegiatan yang menyegarkan guru-guru yang telah menjadi Instruktur Kurikulum 2013 kab/kota tahun lalu

Jumlah peserta Bimtek Instruktur Kab/Kota yang diundang sebanyak 640 orang, seperti jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Kurikulum 2013 pada tahun 2016. Beberapa Instruktur Kab/Kota mengundurkan diri dengan berbagai alasan, sehingga Instruktur Kab/Kota digantikan oleh guru sasaran yang mempunyai kompetensi yang baik untuk diikuti kegiatan Bimtek Instruktur Kurikulum 2013 Kab/Kota tahun 2017. Adapun rekap kehadiran peserta pada kegiatan tersebut terekap pada tabel berikut ini:

REKAPITULASI BIMTEK INSTRUKTUR KURIKULUM 2013 KAB/KOTA JENJANG SMA TAHUN 2017

Jenjang	Instruktur Kabupaten/kota			%
	Kuota	Hadir	Tidak Hadir	
SMA	640	631	9	98,59

Jumlah peserta yang hadir pada tiap mata pelajaran dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

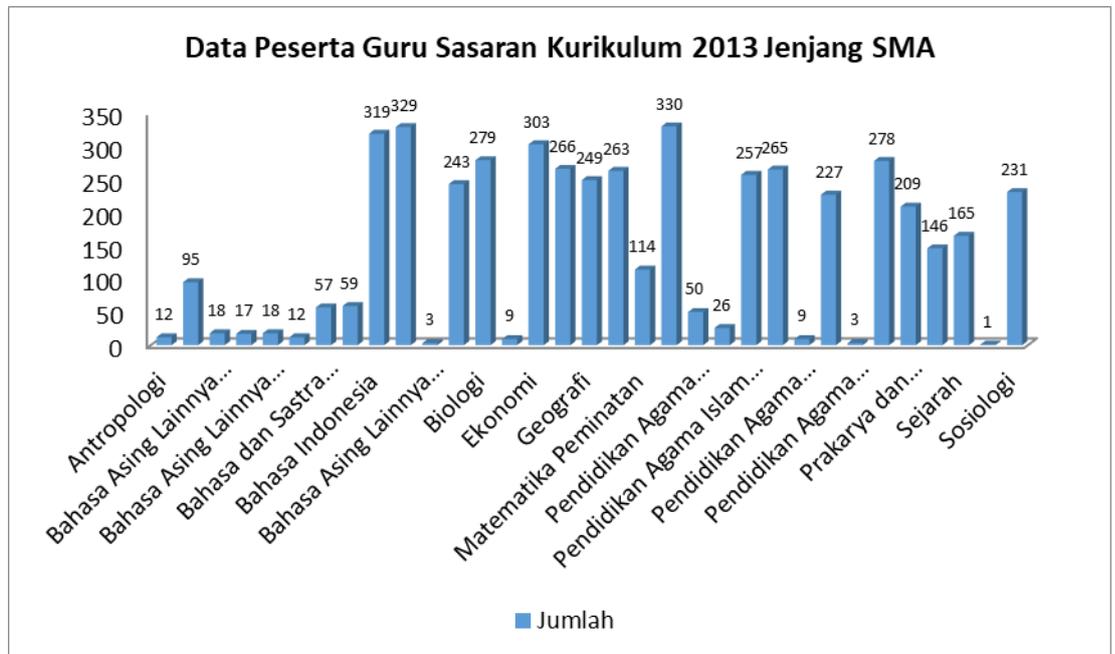


- e) Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 bagi Guru sasaran Jenjang SMA. Kegiatan Bimtek ini diperuntukkan bagi seluruh guru yang mengampu pada kelas X pada seluruh sekolah sasaran tahun 2017. Terdapat 23 (dua puluh tiga) mata pelajaran yang dilatihkan pada kegiatan ini. Pelaksanaan kegiatan Bimtek dilaksanakan di 39 Tempat Pelaksanaan Kegiatan (TPK) pada 31 Kab/Kota. Adapun rekap kehadiran peserta kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.17 berikut.

**REKAPITULASI BIMBINGAN TEKNIS KURIKULUM 2013
BAGI GURU SASARAN JENJANG SMA TAHUN 2017**

Jenjang	Guru Sasaran			%
	Kuota	Hadir	Tidak Hadir	
SMA	5075	4862	213	95,80

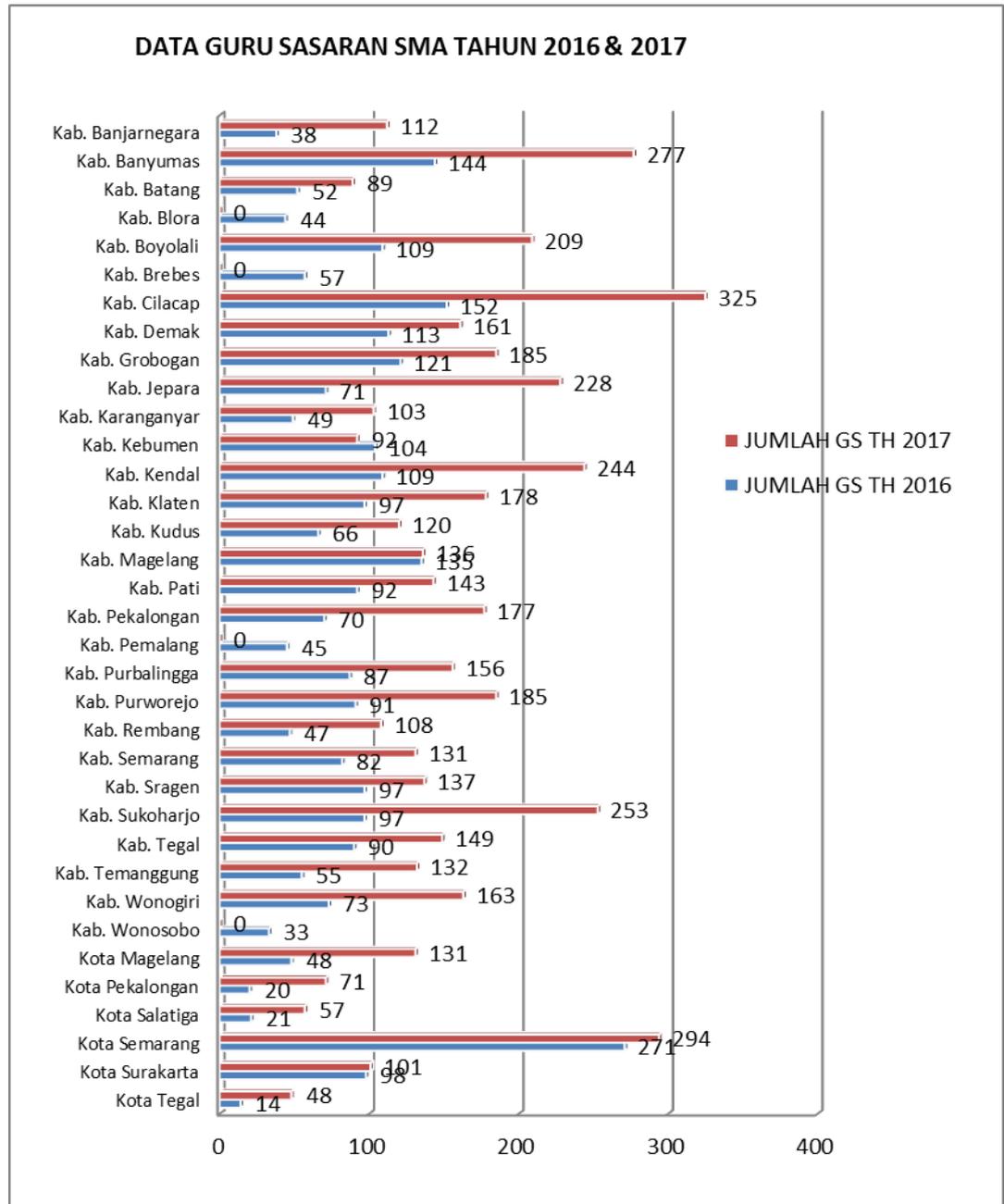
Jumlah peserta yang hadir pada tiap mata pelajaran dapat dilihat dalam gambar 3.17 sebagai berikut.



Secara keseluruhan capaian pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 jenjang SMA untuk Bimtek Instruktur Kurikulum 2013 Kab/Kota pada tahun 2017 adalah 98,59%, dan untuk Bimtek Kurikulum 2013 bagi Guru Sasaran pada tahun 2017 sebesar 95,86%. Ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh:

1. Jumlah guru pada sekolah sasaran memang terbatas, hal ini disebabkan oleh sekolah sasaran adalah sekolah swasta yang jumlah siswanya juga sangat terbatas.
2. Kegiatan Bimtek dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan akreditasi sekolah. Sehingga sebagian guru tidak diijinkan oleh Kepala Sekolah untuk meninggalkan sekolah

Sebaran guru sasaran Kurikulum 2013 pada tahun 2016 dan 2017 terdapat pada grafik dibawah ini :



f) Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pemberian Bantuan Pemerintah TPK Jenjang SMA

Tujuan dari diselenggarakannya kegiatan tersebut adalah untuk menyediakan laporan dan hasil verifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh SMA penerima Bantuan Pemerintah kegiatan Bimtek Kurikulum 2013 bagi Guru Sasaran Tahun 2017. Jumlah peserta yang diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut adalah 84 orang. Jumlah peserta yang hadir adalah 84 orang, yang berasal dari 39 Kepala

Sekolah dan Bendahara SMA penerima Dana Bantah Bimtek Kurikulum 2013 dan Kasi SMA BPPMK seluruh wilayah di Jawa Tengah.

Kegiatan pemeriksaan Laporan Kegiatan pada Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pemberian Bantuan Pemerintah TPK



g) Sosialisasi dan Penandatanganan MoU Pemberian Bantuan Pendampingan Kurikulum 2013.

Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan sebelum kegiatan pendampingan Kurikulum dilaksanakan 76 Kepala Sekolah dan Bendahara dan KAsi SMA BPPMK semua wilayah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar seluruh rangkaian kegiatan Pendampingan Kurikulum 2013 bagi Guru Sasaran dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal. Jumlah peserta yang diundang pada kegiatan ini sebanyak 158 orang, sedangkan yang hadir sebanyak 156 orang.

Peserta sedang mereview proposal pada kegiatan Sosialisasi dan Penandatanganan MoU Pemberian Bantuan Pendampingan Kurikulum 2013



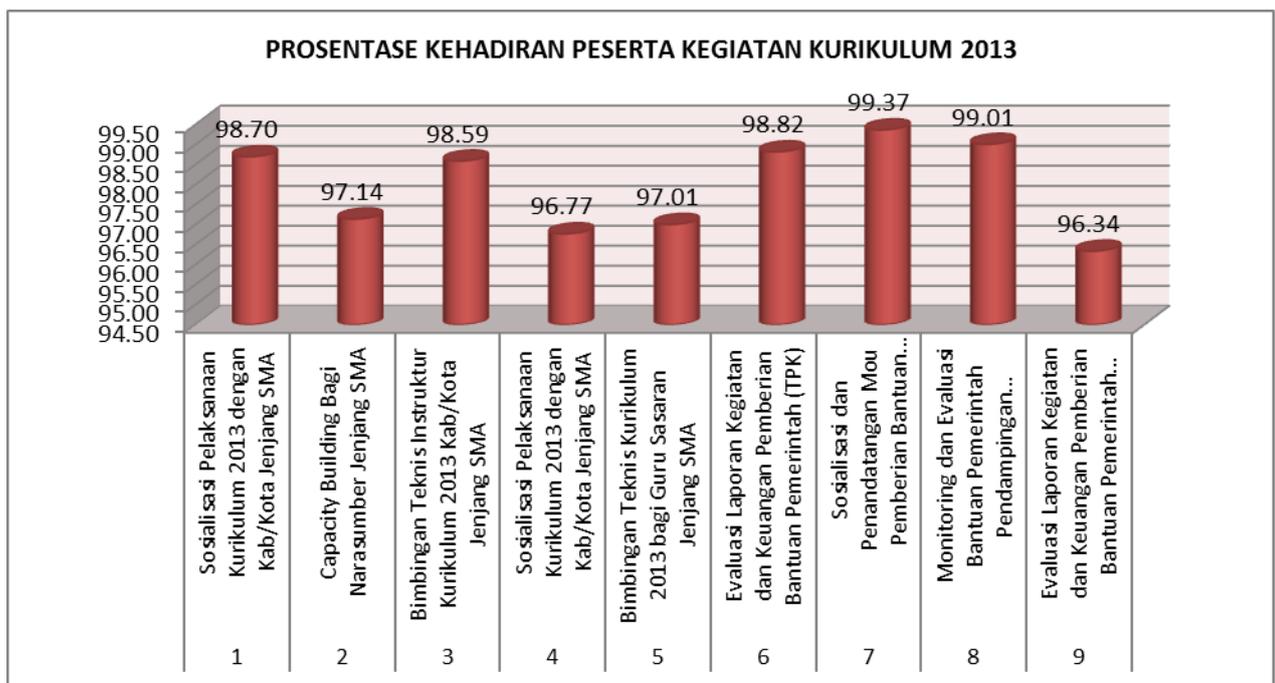
h) Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013

SMA sasaran pada tahun 2017 ini sebanyak 303 sekolah. Seluruh guru kelas X dari 303 sekolah tersebut telah mengikuti Bimtek Kurikulum 2013. Namun pada kegiatan pendampingan, SMA sasaran yang didampingi sebanyak 300 sekolah. Terdapat 3 sekolah yang tidak mempunyai siswa pada tahun ajaran 2017/2018, sehingga guru-guru pada 3 sekolah tersebut tidak bisa melaksanakan kegiatan pendampingan.

i) Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pemberian Bantuan Pemerintah bagi Sekolah Induk Klaster Jenjang SMA.

Jumlah peserta yang diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut adalah 82 orang. Jumlah peserta yang hadir adalah 79 orang, yang berasal dari 76 Kepala Sekolah SMA penerima Dana Bantah Pendampingan Kurikulum 2013 dan Kasi SMA BPPMK seluruh wilayah di Jawa Tengah.

Dari prosentase rangkain kegiatan dapat dilihat pada grafik berikut ini :



j) Hambatan dan Kendala

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi kurikulum 2013 jenjang SMA adalah untuk kegiatan Bimtek Instruktur Kurikulum 2013 Kabupaten/Kota (IK) dan Guru Sasaran (GS) antara lain jumlah guru sasaran berkurang dari rancangan awal disebabkan sekolah sasaran adalah sekolah swasta yang hanya memiliki siswa sedikit, Instruktur Kab/Kota tahun 2016 menolak untuk menjadi IK pada tahun 2017 dengan berbagai macam alasan, jumlah jam dalam kegiatan Bimtek Instruktur Kurikulum Kab/Kota lebih sedikit dibanding jumlah jam pada kegiatan Bimtek Guru Sasaran dan waktu pelaksanaan kegiatan Bimtek Guru Sasaran bersamaan dengan waktu akreditasi sekolah.

k) Langkah antisipasi yang dilakukan ke depan

Langkah antisipasi yang dilakukan ke depan terkait dengan implementasi kurikulum 2013 jenjang SMA pada kegiatan Bimtek Instruktur Kurikulum Kabupaten/Kota (IK) dan Guru Sasaran (GS) adalah melibatkan LPMP dan penanggungjawab sekolah pada tingkat Provinsi dalam menyusun data guru pada sekolah sasaran, mengganti IK dengan GS yang mengikuti kegiatan pada tahun 2016 yang memiliki kompetensi yang unggul seperti IK, dengan melihat nilai akhir kegiatan Pelatihan Guru Sasaran tahun 2016, memberi tambahan penguatan dan strategi pada IK ketika menjadi narasumber pada kegiatan Bimtek Guru Sasaran, dan diupayakan kegiatan Bimtek menyesuaikan jadwal sekolah.

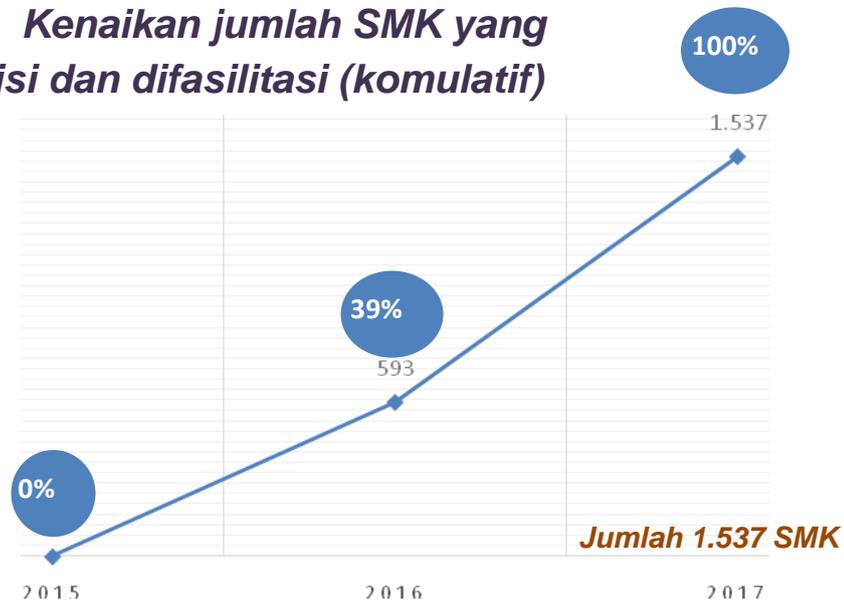


IKK #12 “Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP”

Realisasi 2016	Tahun 2017			Target Renstra 2019	Capaian Terhadap Renstra 2019
	Target	Realisasi	% Capaian		
39%	40%	100%	250	80%	125%

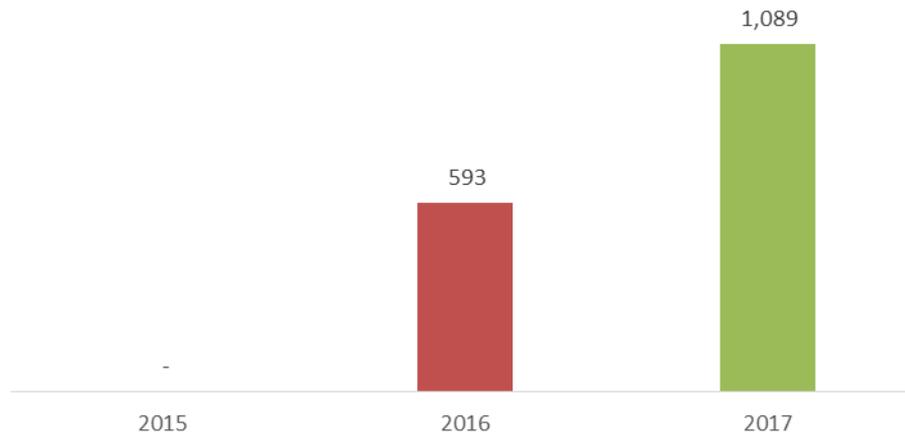
Indikator kinerja persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP telah terealisasi sebesar 100 % atau sejumlah 1.537sekolah dari target 40% atau 615 sekolah, dengan persentase capaian 250%. Total jumlah sekolah SMK di Provinsi Jateng sendiri sebanyak 1.537 sekolah.

Tren Kenaikan jumlah SMK yang disupervisi dan difasilitasi (komulatif)



Pada tahun 2016 realisasi indikator persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP adalah 593 sekolah. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 1.089 sekolah. Ini berarti ada peningkatan sejumlah 496 sekolah sebagaimana dalam grafik dibawah ini:

Grafik capaian tahunan SMK yang disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP



Capaian realisasi tahun 2017 sebanyak 1089 sekolah tersebut ditunjang dengan beberapa program/kegiatan yaitu :

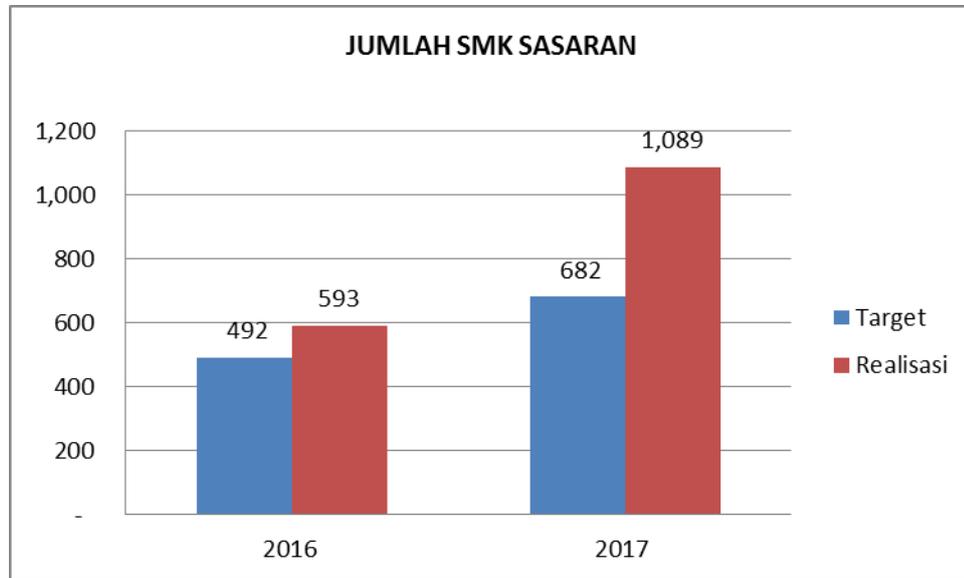
- a) realisasi program sekolah model sebanyak 71 sekolah;
- b) fasilitasi pelatihan dan pendampingan kurikulum tahun 2017 sebanyak 1.019 sekolah;
- c) kecukupan anggaran untuk melakukan kegiatan fasilitasi di sekolah jenjang SMK; serta
- d) fungsi koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini dinas pendidikan dan dinas pendidikan kabupaten/kota yang berjalan dengan baik.

Capaian Realisasi tersebut pada pelaksanaannya ditunjang dengan beberapa kegiatan, yaitu :

↳ **Implementasi Kurikulum 2013 jenjang SMK**

Jumlah SMK yang menjadi sasaran Implementasi Kurikulum 2013 sebanyak 682 SMK, hal ini meningkat dibanding tahun 2016 yang jumlah sarannya 492 SMK. Realisasi Implementasi Kurikulum 2013 pada Tahun 2017 sebanyak 1019 SMK, dengan persentase pencapaian sebesar 149,41%. Peningkatan jumlah sasaran SMK menjadi sekitar 1,5 kali lipat target semula dikarenakan permintaan secara lisan dari Kasuditkur SMK pada saat kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Implementasi Kurikulum di Pusdiklat Pegawai Kemdikbud, tanggal

6-8 Maret 2017 agar implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SMK, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, pada Tahun 2017 bisa 100%. Berikut grafik perbandingan target dan realisasi SMK Sasaran Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2016 dan Tahun 2017.



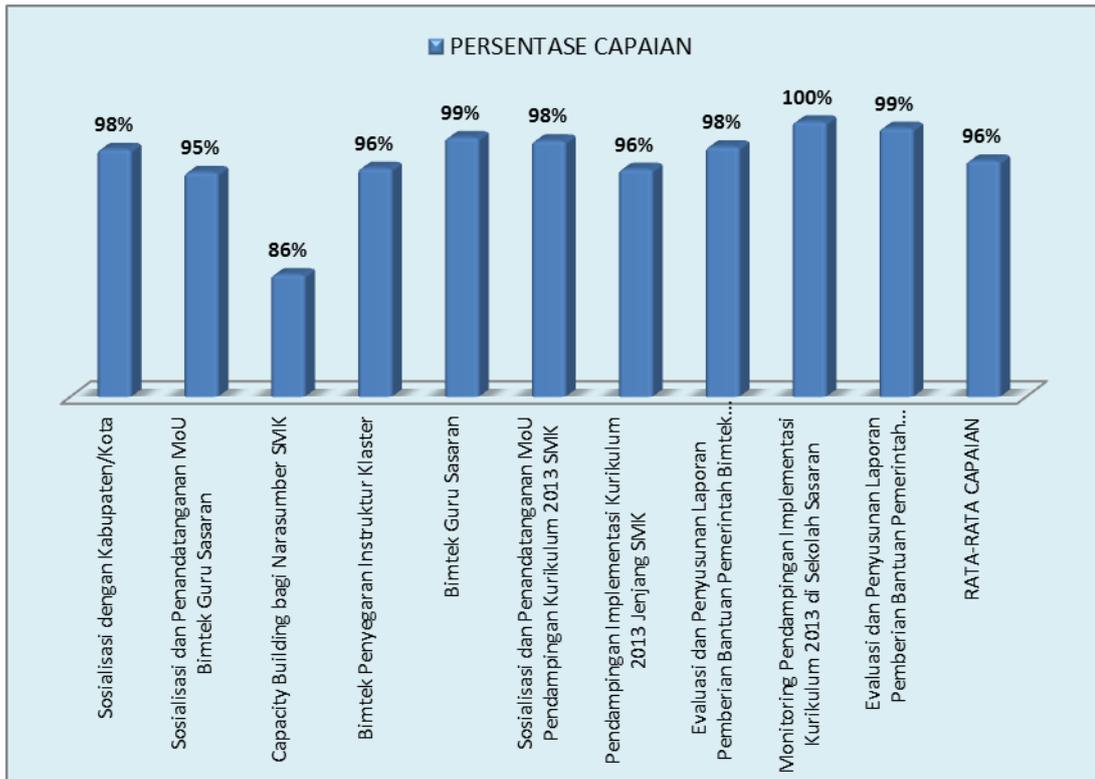
Grafik Perbandingan Jumlah Smk Sasaran Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2016 Dan 2017

Kegiatan Implementasi Kurikulum 2013 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut. Diawali dengan Sosialisasi Pelaksanaan Kurikulum 2013 Jenjang SMK dengan Kabupaten/Kota, kegiatan selanjutnya adalah Pemberian Bantuan Bimtek Kurikulum 2013 bagi Guru Sasaran, *Capacity Building* bagi Narasumber, Bimtek Tim Pengembang Kurikulum 2013 Jenjang SMK, Bimtek Kurikulum 2013 bagi Guru Sasaran, Pemberian Bantuan Pendampingan Kurikulum 2013, Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Jenjang SMK serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah. Sasaran dan Realisasi Kegiatan Implementasi Kurikulum 2013 yang dilaksanakan oleh LPMP Jawa Tengah pada Tahun 2017 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel Sasaran Dan Realisasi Kegiatan
Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2017**

NO	JUDUL KEGIATAN	SASARAN	REALISASI	SELISIH
1	Sosialisasi Pelaksanaan Kurikulum 2013 Jenjang SMK dengan Kabupaten/Kota	80	78	2
2	Sosialisasi dan Penandatanganan MoU Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Kurikulum 2013 SMK bagi Guru Sasaran	196	187	9
3	<i>Capacity Building</i> bagi Narasumber SMK	72	62	10
4	Bimtek Penyegaran Instruktur Klaster Kurikulum 2013 Jenjang SMK	1656	1586	70
5	Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan di TPK	14,425	14,218	207
6	Sosialisasi dan Penandatanganan <i>MoU</i> Pemberian Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 SMK	347	341	6
7	Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SMK	1019	975	44
8	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pemberian Bantuan Pemerintah Bimtek Kurikulum 2013 Guru Sasaran Jenjang SMK	132	129	3
9	Monitoring Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Sasaran	500	500	0
10	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pemberian Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 Jenjang SMK	170	169	1

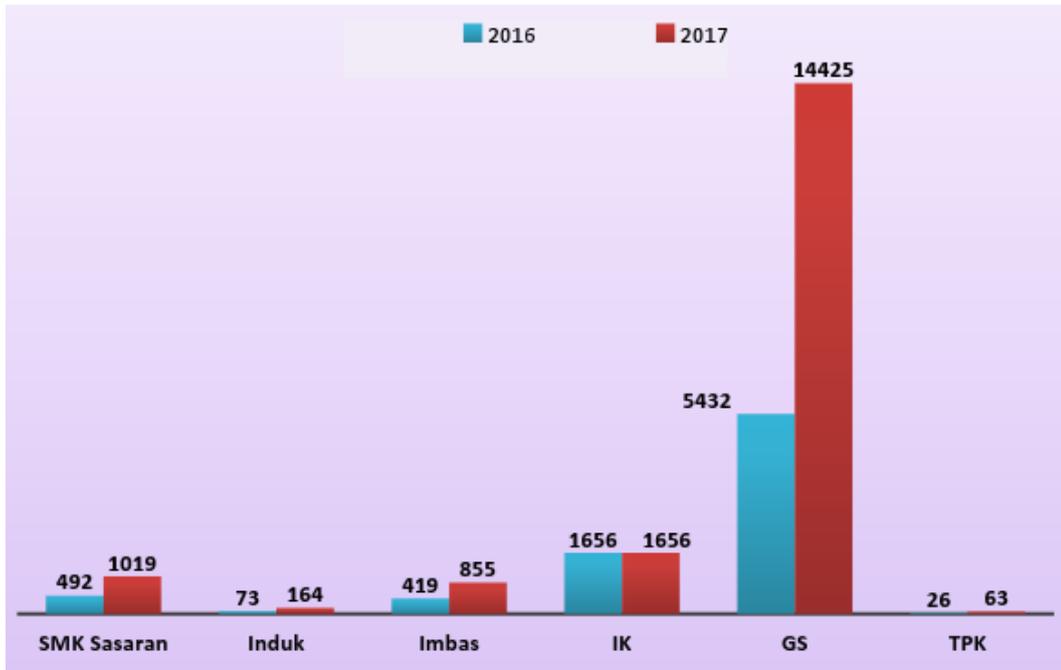
Dari data tersebut dapat dihitung persentase capaian setiap rangkaian kegiatan Kurikulum 2013 berdasarkan realisasi jumlah peserta yang mengikuti kegiatan dibagi dengan jumlah peserta sasaran kegiatan. Persentase capaian kegiatan Kurikulum 2013 disajikan dalam grafik sebagai berikut.



GRAFIK PERSENTASE CAPAIAN KEGIATAN KURIKULUM 2013 TAHUN 2017

Untuk memberi gambaran tentang setiap rangkaian kegiatan implementasi Kurikulum 2013 di Provinsi Jawa Tengah, berikut uraian singkat tentang pelaksanaan masing-masing kegiatan.

- a) Sosialisasi Pelaksanaan Kurikulum 2013 Jenjang SMK dengan Kabupaten/Kota
Kegiatan sosialisasi diikuti oleh perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kasi Kurikulum SMK dan Kasi SMK BPPMK 6 Wilayah, Ketua MKKS Provinsi Jawa Tengah, Ketua MKKS dan Operator dari 35 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah, serta Pengolah Data LPMP Jawa Tengah. Jumlah peserta yang diundang 80 orang, sedangkan yang hadir sebanyak 78 orang. Hasil kegiatan berupa data SMK Sasaran, SMK Induk Klaster dan SMK Imbas, data Instruktur Kabupaten/Kota/Klaster (IK), data Guru Sasaran (GS), serta data SMK yang ditunjuk sebagai TPK Bimtek Kurikulum 2013 Bagi GS.



GRAFIK JUMLAH SMK SASARAN, INDUK KLASTER, IMBAS, IK , GS DAN TPK IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 TAHUN 2016-2017

b) Pemberian Bantuan Bimtek Kurikulum 2013 bagi Guru Sasaran

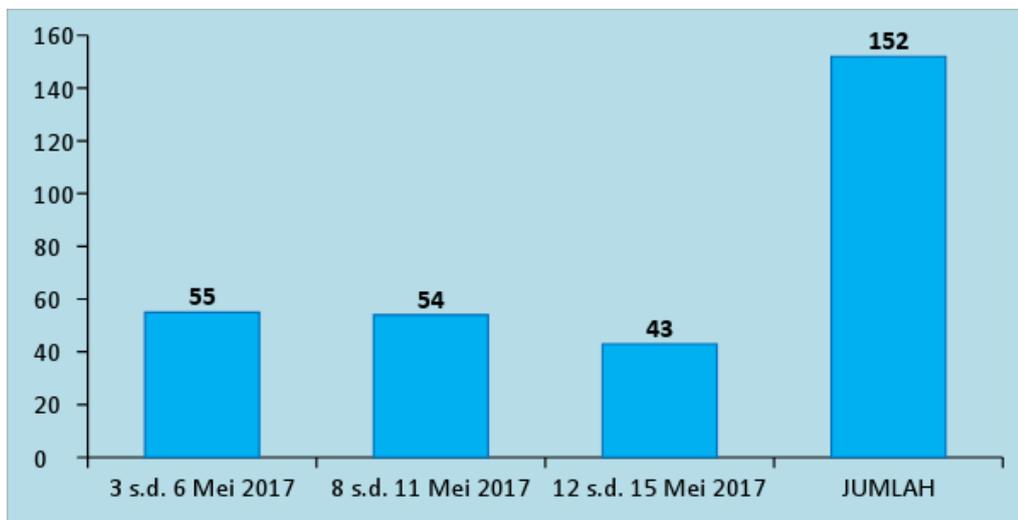
Kegiatan Pemberian Bantuan Bimtek Kurikulum 2013 bagi Guru Sasaran diselenggarakan dengan judul Sosialisasi dan Penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) Pemberian Bantuan Bimtek Kurikulum 2013 Bagi Guru Sasaran Jenjang SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017. Kegiatan Sosialisasi dan Penandatanganan MoU Bimtek diikuti oleh perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kasi Kurikulum SMK dan Kasi SMK BPPMK 6 Wilayah, serta Kepala Sekolah, Bendahara dan Operator SMK 63 TPK dari 34 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten yang tidak menyelenggarakan Bimtek Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Guru Sasaran adalah Kabupaten Pemalang karena SMK-nya sudah tuntas (100%) implementasi Kurikulum 2013 pada tahun 2016. Jumlah peserta yang diundang dalam kegiatan Sosialisasi dan Penandatanganan MoU Bimtek sebanyak 196 orang, sedangkan yang hadir dalam kegiatan tersebut sebanyak 187 orang.

Hasil kegiatan tersebut adalah rekapitulasi data jumlah SMK Sasaran, jumlah guru sasaran dan jumlah kelas per TPK. Dari hasil rekapitulasi dapat diketahui bahwa data jumlah SMK yang menjadi bimtek sebanyak 1.448 SMK, sedangkan jumlah SMK Sasaran Kurikulum 2013 hanya 1.019 SMK. Perbedaan jumlah

SMK sasaran tersebut dikarenakan untuk kabupaten/kota dengan TPK lebih dari 1, maka pembagian sasaran pesertanya berdasarkan mata pelajaran atau berdasarkan kedekatan sekolah. Apabila berdasarkan mata pelajaran, maka untuk mata pelajaran tertentu kegiatan bimteknya menjadi 1 (satu) TPK, dan mata pelajaran yang lain di TPK yang berbeda. Akibatnya sekolah sasaran menjadi terdata 2 (dua) kali karena meski TPKnya berbeda, tetapi sekolah sasarnya sama. Sebaliknya, jika berdasarkan mata pelajaran, maka TPK tersebut menyelenggarakan bimtek untuk 12 mata pelajaran, guru sasaran peserta bimtek berasal dari sekolah sasaran yang sama.

c) *Capacity Building* bagi Narasumber

Jumlah peserta yang diundang sebanyak 72 orang, yang terdiri dari Narasumber Nasional, Instruktur Nasional, dan Instruktur Provinsi. Sedangkan yang hadir dalam kegiatan tersebut sebanyak 62 orang. Hasil utama kegiatan tersebut jadwal kegiatan.



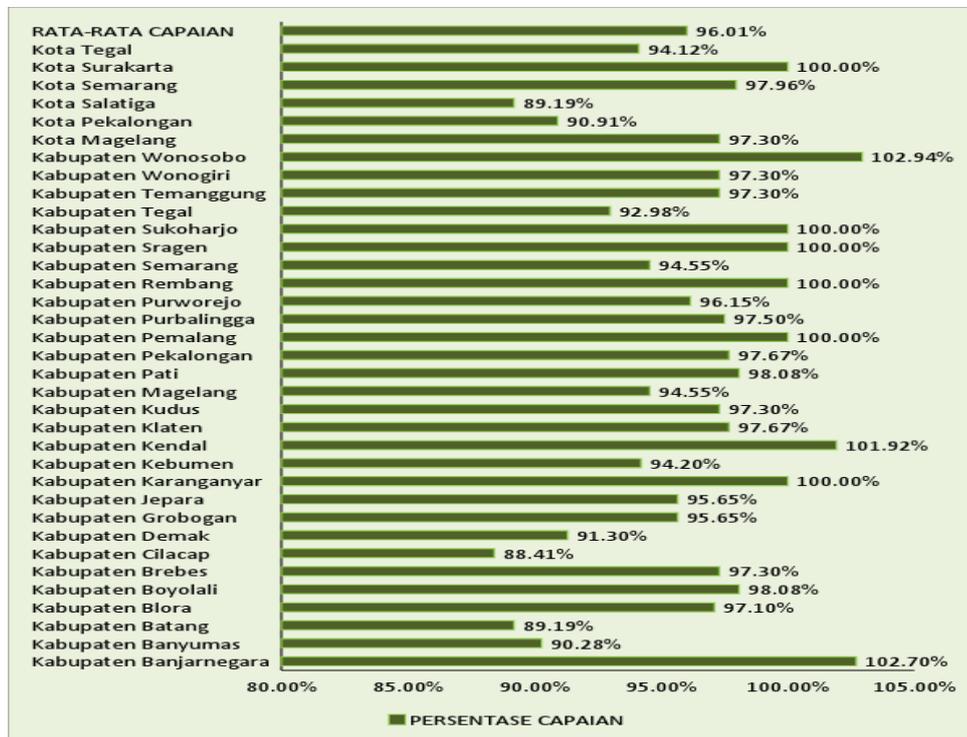
GRAFIK KEBUTUHAN NARASUMBER PER TANGGAL KEGIATAN
BIMTEK PENYEGARAN INSTRUKTUR KLASTER KURIKULUM 2013 JENJANG SMK
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017

d) Bimtek Tim Pengembang Kurikulum 2013 Jenjang SMK

Terdapat 12 mata pelajaran yang menjadi sasaran bimtek, yaitu Agama dan Budi Pekerti, PPKn, Sejarah, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PJOK, Seni budaya, Bimbingan Konseling serta mata pelajaran peminatan bidang/program/ kompetensi keahlian kelompok C, yaitu C1, C2 dan C3. Mata pelajaran Kewirausahaan yang pada tahun 2016 menjadi mata pelajaran yang

berdiri sendiri, maka pada tahun 2017 digabungkan dengan mata pelajaran kelompok C.

Jumlah peserta yang diundang sebanyak 1.656 orang sedangkan yang hadir dalam kegiatan tersebut sebanyak 1.586 orang dan tidak hadir sebanyak 70 orang.



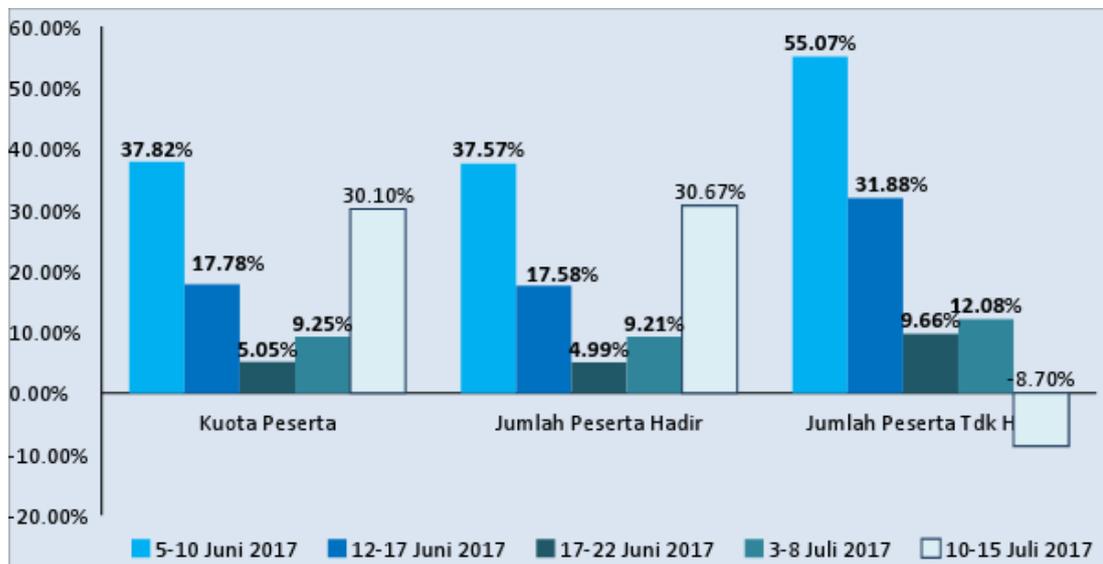
GRAFIK PERSENTASE CAPAIAN KEGIATAN BIMTEK PENYEGARAN INSTRUKTUR
KLASTER KURIKULUM 2013 SMK PER KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017

e) Bimtek Kurikulum 2013 bagi Guru Sasaran.

Kegiatan Bimtek Kurikulum 2013 bagi Guru Sasaran tersebut diselenggarakan dengan judul Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan di TPK. Tujuan dari diselenggarakannya kegiatan tersebut adalah meningkatkan kompetensi guru sasaran, agar dapat mengimplementasikan Kurikulum 2013 dengan baik, mulai dari tahapan merencanakan, melaksanakan, pembelajaran, dan mengevaluasi pencapaian kompetensi peserta didik. Jumlah guru yang menjadi sasaran bimtek sebanyak 14.425 orang, sedangkan guru sasaran yang hadir dalam kegiatan tersebut sebanyak 14.218 orang dan tidak hadir sebanyak 207 orang. Gambaran tentang realisasi peserta kegiatan tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel
REALISASI JUMLAH PESERTA PER TANGGAL KEGIATAN
BIMTEK IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 SMK DI TPK
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017

No	Tanggal Bimtek GS	Jumlah Kab/Kota	Jumlah TPK	Kuota Peserta	Jumlah Peserta Hadir	Jumlah Peserta Tdk Hadir
1	5-10 Juni 2017	13	25	5455	5341	114
2	12-17 Juni 2017	9	12	2565	2499	66
3	17-22 Juni 2017	3	3	729	709	20
4	3-8 Juli 2017	6	6	1334	1309	25
5	10-15 Juli 2017	10	19	4342	4360	-18
J U M L A H		41	65	14425	14218	207



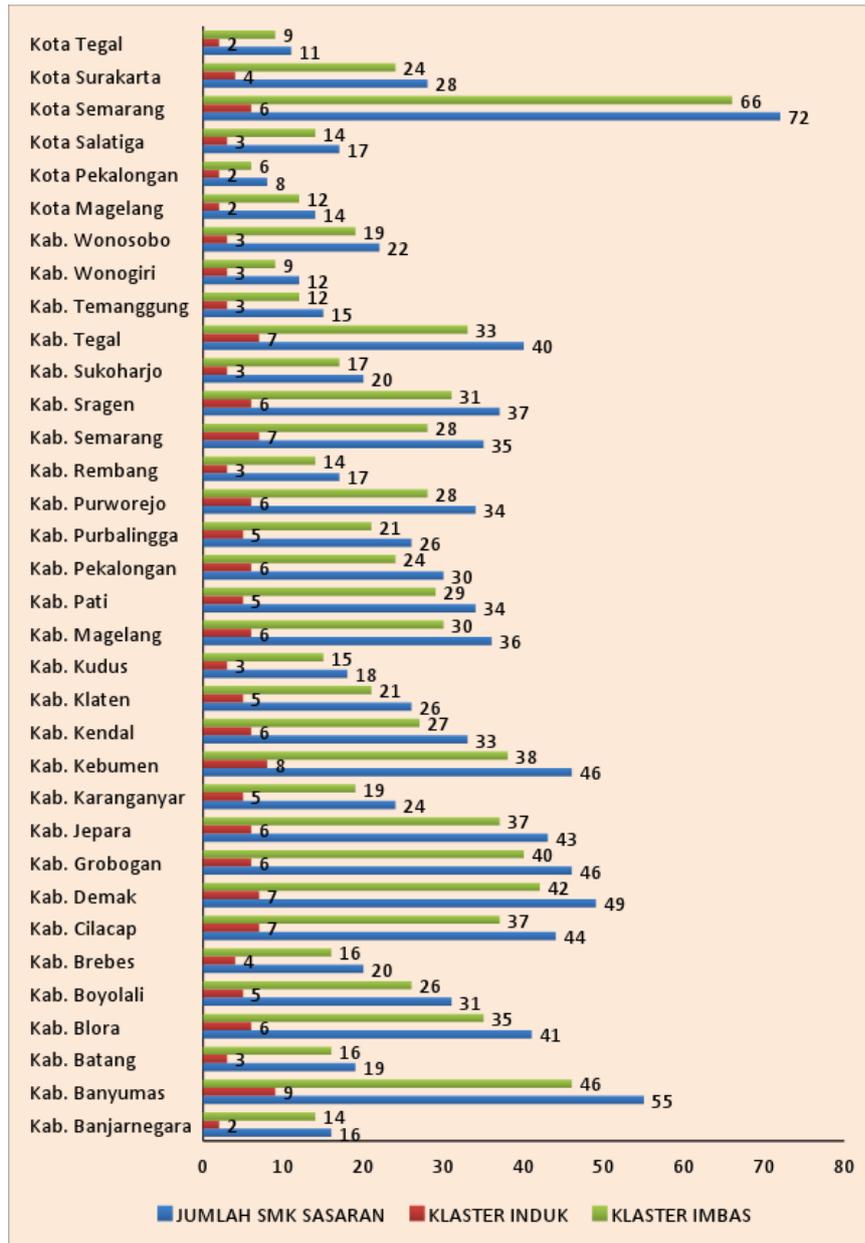
GRAFIK PROSENTASE REALISASI JUMLAH PESERTA GURU SASARAN
BIMTEK IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 SMK DI TPK
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017

f) Pemberian Bantuan Pendampingan Kurikulum 2013

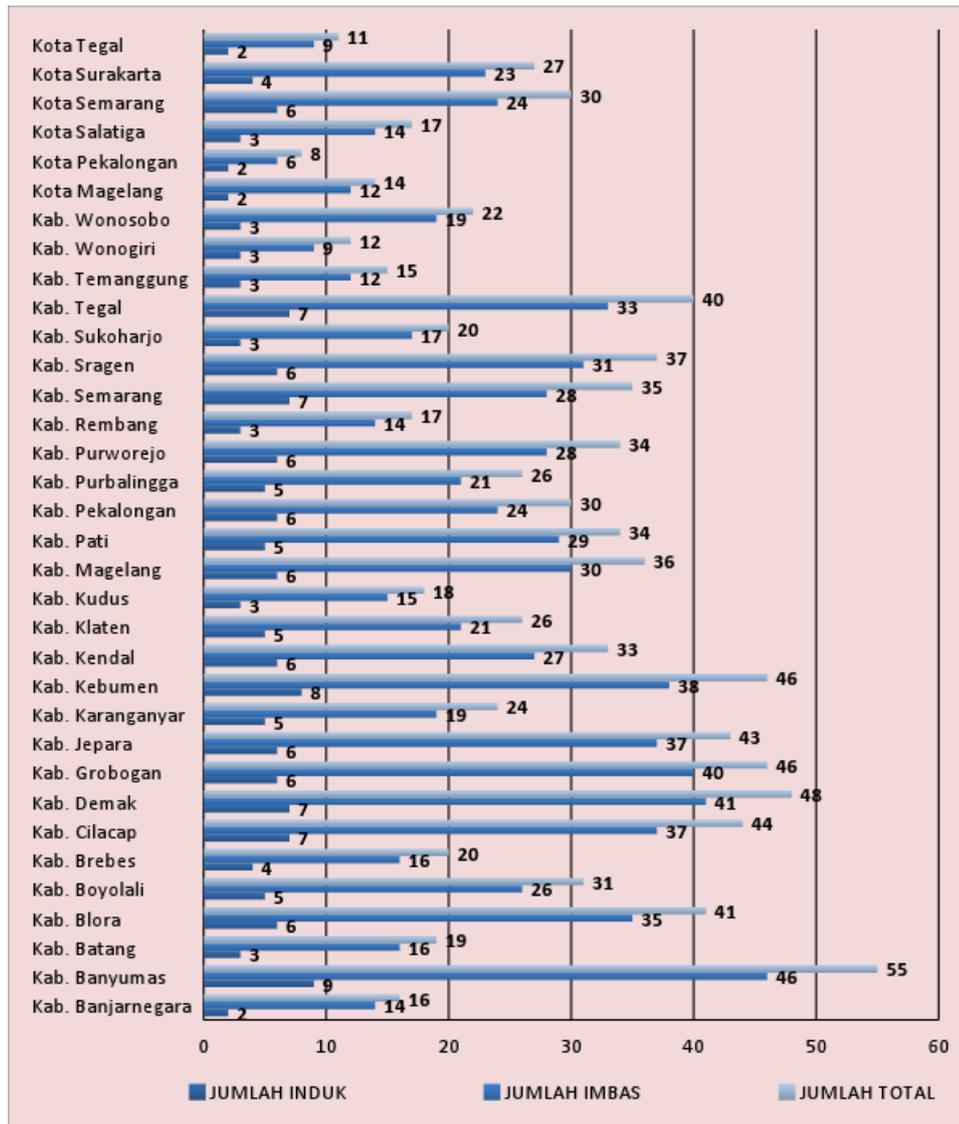
Kegiatan Pemberian Bantuan Pendampingan Kurikulum 2013 diselenggarakan dengan judul Sosialisasi dan Penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*). Tujuan utama dari diselenggarakannya Sosialisasi dan Penandatanganan MoU Pemberian Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 SMK adalah untuk memfasilitasi dan melegitimasi penyaluran dana bantuan pelaksanaan pendampingan implementasi Kurikulum 2013.

Penerima dana bantuan adalah Sekolah Sasaran yang ditetapkan sebagai SMK Pelaksana Kurikulum 2013 tahun 2017. Dana bantuan tersebut disalurkan melalui SMK yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai Induk Klaster Pendampingan

Peserta kegiatan Sosialisasi dan Penandatanganan MoU Pendampingan adalah perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabid SMK dan Kepala BPPMK 6 Wilayah, Ketua MKKS Provinsi Jawa Tengah, Ketua MKKS dari 34 Kabupaten/Kota, 164 Kepala Sekolah Induk Klaster, dan 141 Bendahara Induk Klaster. Jumlah total peserta yang diundang dalam kegiatan Sosialisasi dan Penandatanganan MoU sebanyak 347 orang, sedangkan yang hadir dalam kegiatan tersebut sebanyak 341 orang. Karena Kabupaten Pemalang sudah 100% implementasi Kurikulum 2013 pada tahun 2016, maka kabupaten tersebut tidak diikutkan dalam kegiatan pendampingan Kurikulum 2013 tahun 2017. Distribusi SMK Sasaran, Induk Klaster dan Imbas Implementasi Kurikulum 2013 disajikan dalam grafik sebagai berikut.



GRAFIK DISTRIBUSI SMK SASARAN, INDUK KLASTER DAN IMBAS PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 SMK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017



GRAFIK JUMLAH SMK SASARAN, INDUK KLAS TER DAN IMBAS PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 SMK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa antara kuota dengan realisasi berdasarkan MoU Pendampingan, terdapat selisih 44 SMK, dengan rincian 1 SMK dari Kab. Demak, 1 SMK dari Kota Surakarta dan 42 SMK dari Kota Semarang. Alasan berkurangnya sasaran pendampingan tersebut adalah karena sekolah sudah tidak beroperasi lagi/TUTUP (Demak, Kota Semarang dan Kota Surakarta), serta SMK tersebut ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 secara Mandiri (Kota Semarang).

g) Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 di Sekolah Sasaran

Tujuan kegiatan pendampingan adalah *pertama*, memberi penguatan kepada guru dan kepala sekolah, agar dapat melaksanakan Kurikulum 2013 dengan baik, mulai dari tahapan merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi pencapaian kompetensi peserta didik. *Kedua*, memastikan satuan pendidikan dapat memahami dan melaksanakan Kurikulum 2013 di sekolah.

Pelaksanaan kegiatan pendampingan tersebut dibiayai menggunakan dana bantuan pemerintah, yang disalurkan oleh LPMP Jawa Tengah kepada SMK Induk Klaster sebagai koordinator dan pengelola kegiatan pendampingan di sekolah sasaran yang menjadi anggotanya. Dana bantuan yang diberikan sebesar Rp. 7.000.000,00 (*Tujuh Juta Rupiah*) per sekolah sasaran tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan Rapat Koordinasi, 2 kali *In Service* (IN-1 dan IN-2), sekali *On Service* (ON-1), serta penyusunan laporan.

Kegiatan pendampingan dilaksanakan oleh 164 SMK Induk Klaster dan 811 SMK Imbas di 34 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Berikut data jumlah SMK Sasaran Pendampingan, SMK Induk Klaster dan SMK Imbas di 34 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

h) Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah dilaksanakan menjadi 3 (tiga) kegiatan. *Pertama*, Evaluasi Laporan Kegiatan dan Keuangan Bantuan Pemerintah untuk Bimtek. *Kedua*, Monitoring Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Sasaran. *Ketiga*, Evaluasi Laporan Kegiatan dan Keuangan Bantuan Pemerintah untuk Pendampingan.

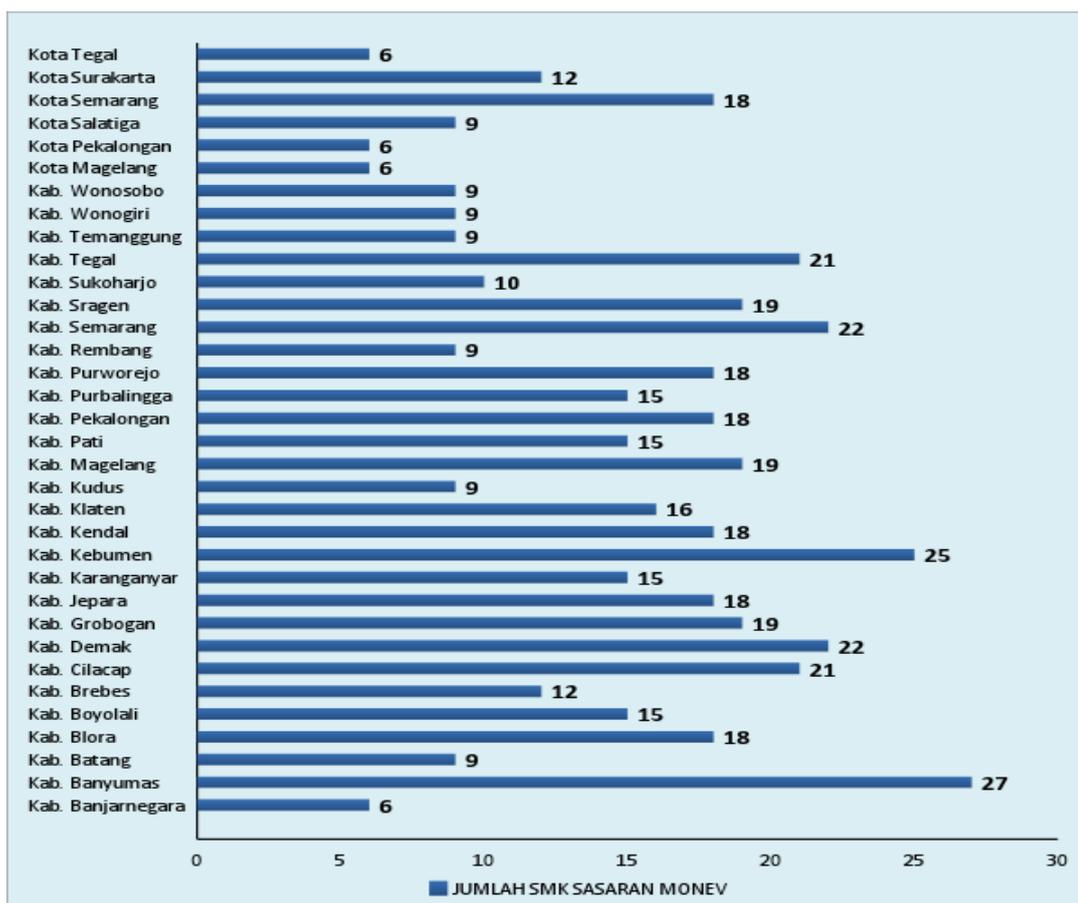
i) Evaluasi Laporan Kegiatan dan Keuangan Bantuan Pemerintah untuk Bimtek

Tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut adalah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan laporan pertanggungjawaban dana bantuan pemerintah yang telah disusun oleh SMK yang menjadi TPK Bimtek, baik laporan pelaksanaan kegiatan maupun laporan pertanggungjawaban keuangan.

Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pemberian Bantuan Pemerintah Bimtek diikuti oleh perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kasi SMK BPPMK 6 Wilayah, serta Kepala Sekolah, Bendahara dan Operator SMK 63 TPK dari 34 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah.

Jumlah peserta yang diundang dalam kegiatan tersebut sebanyak 132 orang, sedangkan yang hadir dalam kegiatan tersebut sebanyak 129 orang. Hasil kegiatan tersebut terevaluasi dan terverifikasinya laporan pertanggungjawaban dana bantah yang telah disusun oleh 63 SMK TPK Bimtek, baik laporan pelaksanaan kegiatan maupun laporan pertanggungjawaban keuangan.

- j) Monitoring Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Sasaran LPMP Jawa Tengah melaksanakan monitoring ke SMK Sasaran Pendampingan secara sampling. Dari 975 SMK Sasaran, yang dimonitoring sebanyak 500 SMK, terdiri dari 164 SMK Induk Klaster dan 336 SMK Imbas.



GRAFIK DISTRIBUSI SASARAN MONITORING
PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 SMK
PER KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017

- k) Evaluasi Laporan Kegiatan dan Keuangan Bantuan Pemerintah untuk Pendampingan

Tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut adalah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan laporan pertanggungjawaban dana bantah yang telah disusun oleh

SMK Induk Klaster Pendampingan, baik laporan pelaksanaan kegiatan maupun laporan pertanggungjawaban keuangan. Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan tersebut diikuti oleh perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kasi SMK BPPMK 6 Wilayah, serta 164 Kepala Sekolah SMK Induk Klaster dari 34 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah. Jumlah peserta yang diundang dalam kegiatan tersebut sebanyak 170 orang, sedangkan yang hadir dalam kegiatan tersebut sebanyak 169 orang. Hasil kegiatan tersebut terevaluasi dan terverifikasinya laporan pertanggungjawaban dana bantuan yang telah disusun oleh 164 SMK Induk Klaster, baik laporan pelaksanaan kegiatan maupun laporan pertanggungjawaban keuangan.

1) Hambatan dan Kendala

Beberapa hambatan utama yang muncul selama penyelenggaraan kegiatan Kurikulum 2013 Tahun 2017 adalah:

1. Data SMK (jumlah SMK, SMK berstatus Pelaksana dan SMK yang Belum Melaksanakan Kurikulum 2013) yang tidak sama antara data yang dimiliki oleh LPMP Jawa Tengah dengan data yang diperoleh dari Kemdikbud.
2. Ada beberapa SMK yang dilaporkan oleh MKKS sudah tidak beroperasi lagi atau mulai Tahun Ajaran 2017/2018 sudah tidak menerima siswa baru/tidak memiliki siswa kelas X sehingga tidak dijadikan sasaran pendampingan. Akan tetapi di Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 356/KEP/D/KR/2017 ditetapkan sebagai Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013
3. Ada beberapa SMK yang diusulkan oleh MKKS menjadi sasaran pendampingan tetapi ternyata ditetapkan sebagai Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Mandiri berdasarkan Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 355/KEP/D/KR/2017
4. Instruktur Klaster yang diusulkan menjadi Tim Calon Pengembang Kurikulum/fasilitator Bimtek sedang mengikuti kegiatan Keahlian Ganda
5. Rencana jadwal kegiatan Bimtek berbarengan dengan kegiatan akreditasi, UKK, penerimaan raport, penerimaan peserta didik baru, puasa, libur sekolah dan libur hari raya
6. Permasalahan yang muncul di masing-masing kabupaten/kota yang berbeda-beda sehingga harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian

berdasarkan pedoman yang ada sedangkan Pedoman Pelaksanaan Kurikulum 2013 Tahun 2017, khususnya Pedoman Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 yang disusun oleh Direktorat PSMK, tidak tersedia dengan lengkap.

m) Langkah antisipasi ke depan

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut adalah:

1. Sinkronisasi dan validasi data SMK (jumlah SMK, SMK berstatus Pelaksana dan SMK yang Belum Melaksanakan Kurikulum 2013) antara data yang dimiliki oleh MKKS Kabupaten/Kota dan LPMP Jawa Tengah dengan data yang diperoleh dari Kemdikbud.
2. Dilakukan perubahan klaster pendampingan dengan memasukkan SMK sesuai dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 356/KEP/D/KR/2017 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013
3. Dilakukan perubahan klaster pendampingan dengan mengeluarkan SMK yang ditetapkan sebagai Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Mandiri agar sesuai dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 355/KEP/D/KR/2017
4. Berkoordinasi dengan MKKS Kabupaten/Kota dan Kepala Sekolah untuk mencari pengganti dari data Guru Sasaran yang telah mengikuti pelatihan Kurikulum 2013 pada tahun sebelumnya dan dinyatakan LULUS.
5. Menyusun ulang jadwal kegiatan Bimtek berdasarkan kesepakatan dengan MKKS dan Kepala SMK yang menjadi TPK Bimtek
6. Direktorat Jenderal Dikdasmen, khususnya Direktorat PSMK, perlu membuat pedoman penyelenggaraan yang baku mengenai penyelenggaraan fasilitasi sebelum program fasilitasi berjalan, sehingga perubahan saat kegiatan berlangsung dapat diminimalkan.

n) Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan di tahun 2017, rekomendasi yang diusulkan untuk menyelenggarakan program fasilitasi di tahun 2018 adalah:

1. Sinkronisasi dan validasi data SMK lebih awal antara Kabupaten/Kota, LPMP Jawa Tengah dan Dirjen Dikdasmen

2. Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 dan Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum 2013 Mandiri ditetapkan dengan mempertimbangkan usulan/masukan dari daerah berdasarkan hasil validasi data.
3. Pelaksanaan kegiatan Kurikulum 2013 agar mempertimbangkan jadwal kegiatan sekolah (KBM, Akreditasi, UKK, Penerimaan Raport, Penerimaan Peserta Didik Baru, kegiatan keagamaan, dan libur sekolah)
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen, khususnya Direktorat PSMK, perlumenyusun pedoman penyelenggaraan Kurikulum 2013 yang baku dan jelas seawal mungkin sehingga perubahan saat kegiatan berlangsung dapat diminimalkan.

Selain delapan indikator kinerja yang telah dimasukkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala LPMP Jawa Tengah dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah terdapat kegiatan penunjang berupa dukungan manajemen dan tata kelola pelaksanaan tugas penjaminan mutu pendidikan dengan beberapa output sebagai berikut.

1. Layanan dukungan Manajemen
2. Layanan Internal (overhead)
3. Layanan Perkantoran

Yang dapat ditunjukkan dengan tabel dibawah ini.

NO	OUTPUT	SASARAN OUTPUT		REALISASI OUTPUT		PAGU RKAKL-DIPA	REALISASI-DIPA	%
		VOL	SAT	VOL	SAT			
1	Layanan Dukungan Manajemen	4	Layanan	4	Layanan	1.412.054.000	1.306.811.670	92,55
2	Layanan Internal (Overhead)	3	Layanan	3	layanan	1.000.332.000	997.045.320	99,67
3	Layanan Perkantoran	12	Bulan	12	Bulan	16.992.422.000	15.722.788.933	92,53

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran LPMP Jawa Tengah pada Per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 174.917.216.587 dan dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp 1.266.183.562

sehingga realisasi Anggarannya adalah Rp173.651.033.025,00 atau 98,79% persen dari anggaran sebesar Rp177.052.350.000,00.

sasaran strategis “Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan” memiliki anggaran sebesar Rp. 157.647.542.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 157.191.592.668 ,- atau sebesar 99,71% yang terdistribusi seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel Penyerapan Anggaran Per Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu Pendidikannya	6.585.645.000,-	6.349.811.500,-	96,42%
	1 Persentase SD yang telah dipetakan mutunya			
	2 Persentase SD yang meningkat indeks efektifitasnya Output : <i>SD yang terpetakan Mutu Pendidikannya</i>			
	3 Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya			
	4 Persentase SMP yang meningkat indeks efektifitasnya Output : <i>SMP yang terpetakan Mutu Pendidikannya</i>			
	5 Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya			
	6 Persentase SMA yang meningkat indeks efektifitasnya Output : <i>SMA yang terpetakan Mutu Pendidikannya</i>			
	7 Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya			
8 Persentase SMK yang meningkat indeks efektifitasnya Output : <i>SMK yang terpetakan Mutu Pendidikannya</i>				

Persentase Satuan Pendidikan yang telah di fasilitasi berdasarkan 8 SNP				
9	Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : <i>SD yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP</i> <i>SD yang melaksanakan kurikulum 2013</i>			
10	Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : <i>SMP yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP</i> <i>SMP yang melaksanakan kurikulum 2013</i>	151.061.897.000,-	150.841.781.168,-	99,85%
11	Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : <i>SMA yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP</i> <i>SMA yang melaksanakan kurikulum 2013</i>			
12	Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : <i>SMK yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP</i> <i>SMK yang melaksanakan kurikulum 2013</i>			

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Persentase Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu Pendidikannya dari target Rp. 6.585.645.000,- telah terealisasi Rp 6.349.811.500,-dengan capaian 96,42%
2. Persentase Satuan Pendidikan yang telah di fasilitasi berdasarkan 8 SNP dari target Rp. 151.061.897.000 telah terealisasi sebesar Rp 150.841.781.168,00 dengan prosentase capaian 99,85%.

Selain dua sasaran strategis di atas LPMP Jawa Tengah mendapatkan anggaran berupa pengelolaan manajemen dan tata kelola pelaksanaan tugas penjaminan mutu

pendidikan yang didukung oleh beberapa *output* sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

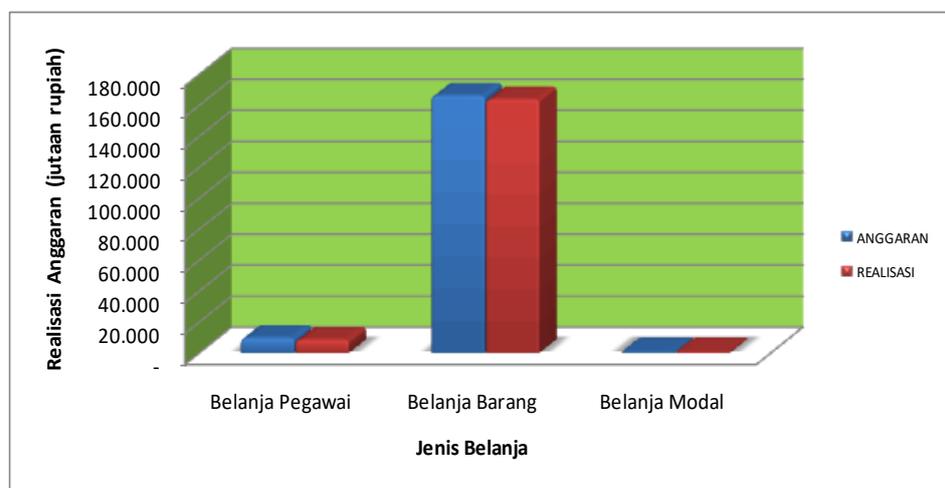
KODE OUTPUT	OUTPUT	PAGU RKAKL-DIPA	REALISASI-DIPA	%
5630.950	Layanan Dukungan Manajemen	1.412.054.000	1.306.811.670	92,55
5630.951	Layanan Internal (Overhead)	1.000.332.000	997.045.320	99,67
5630.994	Layanan Perkantoran	16.992.422.000	15.722.788.933	92,53

Selanjutnya alokasi anggaran unit kerja di lingkungan LPMP Jawa Tengah di manapagu anggaran LPMP Jawa Tengah dalam DIPA tahun 2017 dibagi dalam 3 (tiga) pos pengeluaran belanja, yaitu: (1) Belanja Pegawai, (2) Belanja Barang, dan (3) Belanja Modal. Pos pengeluaran belanja Pegawai yaitu pos yang dikhususkan untuk belanja pegawai, seperti gaji dan tunjangan. Pos pengeluaran belanja Barang meliputi belanja operasional, non operasional, jasa, perjalanan dinas. Pos pengeluaran belanja Modal meliputi kegiatan pengadaan sarana prasarana yang merupakan aset tetap.

Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

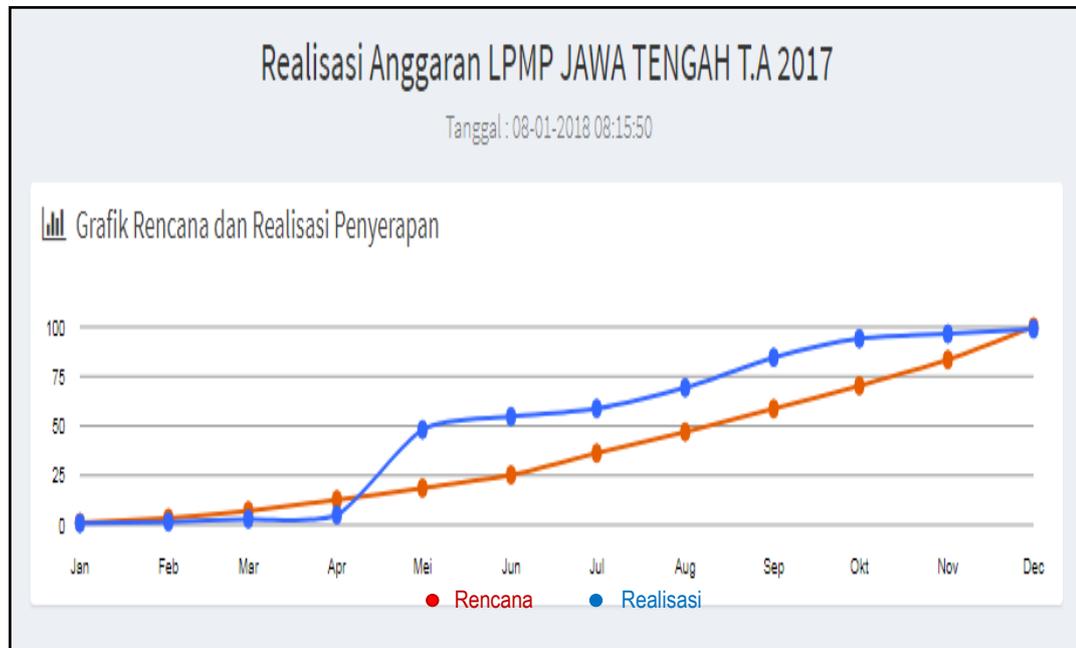
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

(dalam jutaan rupiah)



Grafik Komposisi Anggaran dan Belanja per 31 Desember 2017

Grafik Realisasi Anggaran LPMP Jawa Tengah Berdasarkan Aplikasi SimKeu Kemdikbud tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :



Grafik Realisasi Anggaran LPMP Jawa Tengah per 31 Desember 2017

Secara persentase, realisasi belanja LPMP Jawa Tengah yang sebesar 98,79% berada di bawah target kontrak kinerja Tahun 2017 sebesar 100% (berdasarkan data Simkeu Kemdikbud Tahun 2017). Hal ini disebabkan karena :

1. Adanya efisiensi anggaran pada pelaksanaan kegiatan.
2. Pada kegiatan Diklat Kurikulum 2013 sebagian besar pelaksanaan kegiatan di luar kantor, sehingga frekwensi Dinas Luar pegawai LPMP Jawa Tengah Cukup Tinggi. Hal ini menyebabkan penurunan penyerapan Belanja Uang Makan PNS.
3. Selain itu selama tahun 2017 terdapat 4 orang pegawai yang memasuki masa purna tugas, serta 1 orang meninggal dunia, sehingga mengurai penyerapan belanja pegawai.

Pada tahun 2017, LPMP Jawa Tengah memiliki DIPA dengan dokumen NOMOR : SP DIPA- 023.03.2.419519/2017 tanggal 7 Desember 2017 dengan pagu sebesar Rp201.430.549.000. Sampai dengan 31 Desember 2017 telah terdapat 9 kali revisi.

Pada Tahun 2017 terdapat **efisiensi anggaran yang sebesar Rp. 210.192.000,00** yang digunakan untuk kegiatan yang terkait tugas dan Fungsi LPMP yaitu digunakan untuk kegiatan supervisi kurikulum 2013.

Dari keseluruhan Laporan Akuntabilitas Kinerja LPMP Jawa Tengah, baik penyerapan anggaran maupun fisik pada tahun 2017 perkembangannya dapat dilihat dari Format B19.Informasi Laporan B.19 secara konsisten telah dilaporkan ke Bagian Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Ditjen Dikdasmen melalui Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPMP Jawa Tengah tahun 2017 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan LPMP Jawa Tengah kepada semua elemen masyarakat yang menjadi *stakeholders* dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa LPMP Jawa Tengah telah merealisasikan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2017 untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah. Hal ini didukung fakta bahwa kinerja LPMP Jawa Tengah berhasil merealisasikan semua output dari kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis LPMP Jawa Tengah.

Adapun capaian kinerja LPMP Jawa Tengah memfokuskan pada rencana pencapaian sasaran strategis yaitu meningkatnya penjaminan mutu pendidikan diseluruh jenjang pendidikan di Provinsi Jawa Tengah dengan hasil capaian kinerja yang diukur berdasarkan perjanjian kinerja.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokoknya LPMP Jawa Tengah pada tahun 2016 mendapatkan anggaran yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sebesar Rp. 177,052.350.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 175.218.238.591,- atau sebesar 98,96%.

Sehubungan tentang capaian kinerja tahun 2017, berikut ini adalah beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. LPMP Jawa Tengah Tidak memiliki akses untuk pengelolaan data PMP sehingga LPMP tidak bisa membantu sekolah dalam mendalami akar masalah untuk membuat rekomendasi tingkat sekolah, kabupaten/kota maupun Provinsi.
2. Mayoritas sekolah membebankan pengentrian data mutu hanya pada operator sekolah sehingga faktor jumlah instrumen yang banyak menyebabkan kelelahan

dan kejemuan dalam entri data sehingga memungkinkan hasilnya tidak sama dengan isi instrumen manual.

3. Dijumpai banyak sekolah yang menggunakan aplikasi “faster” untuk mengentri data mutu sehingga isian data menjadi tidak valid
4. Adanya keterlambatan dalam menampilkan rapor peta mutu oleh satgas PMP sehingga LPMP harus memundurkan jadwal pelaksanaan kegiatan penyusunan peta mutu, analisis data mutu, penyusunan rekomendasi mutu dan desiminasi hasil pemetaan mutu.
5. Kegiatan Bimtek GS (yang dilaksanakan di TPK), waktunya bersamaan dengan akreditasi sekolah, penerimaan peserta didik baru, sehingga prosentase GS yang tidak hadir menjadi cukup besar.
6. Sebaran IK yang ada tidak lagi sesuai dengan sekolah yang baru sehingga kesulitan dalam komunikasi dengan IK.
7. Penandatanganan MOU Sekolah Model tahun 2017 belum mengundang struktural dinas pendidikan kabupaten/kota dan BP2MK sehingga proposal belum disahkan saat penandatanganan MoU.

Dari beberapa permasalahan di atas, ada beberapa rekomendasi yang diusulkan ditahun 2018 agar kegiatan selanjutnya dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Berikut adalah rekomendasi yang kami usulkan:

1. LPMP Jawa Tengah mengusulkan kepada pusat agar memberikan akses dalam pengelolaan data Mutu
2. Menekankan kepada sekolah melalui pengawas agar pengentrian data mutu dilakukan oleh setiap responden dan penjadwalan entri data oleh setiap responden
3. Pengawas Sekolah perlu memahami pimpinan sekolah tentang pentingnya data mutu
4. LPMP Jawa Tengah mengusulkan agar simplifikasi instrumen pemetaan dengan mengurangi jumlah pertanyaan dengan cara menggabungkan pertanyaan-pertanyaan sejenis dalam satu variabel.

5. LPMP Jawa Tengah mengusulkan agar satgas pusat menyusun milestones pelaksanaan peta mutu hingga presentasi datanya menyesuaikan dengan jadwal yang ada di LPMP dan Satgas menaati milestones yang disusun tersebut.
6. Jadwal kegiatan Bimtek diupayakan tidak bersamaan dengan pelaksanaan UN, dan PPDB, Ujian kenaikan kelas dan akreditasi sekolah
7. Pendataan IK dan penugasan IK memperhatikan letak geografis dan pengantian IK memperhatikan syarat yang sudah ditentukan.
8. Pendandatanganan MoU sekolah model perlu mengundang pejabat struktural dari kabupaten/kota dan BP2MK.

Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2017 merupakan landasan yang kuat bagi LPMP Jawa Tengah untuk melaksanakan program-program pada tahun berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar program-program pada masa yang akan datang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal penting lainnya LPMP Jawa Tengah harus menetapkan langkah strategis, seperti: berkesinambungan, perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam reformasi pendidikan untuk menjawab tantangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di era persaingan global.



LAMPIRAN

Lampiran 1. PK Awal Tahun 2017



Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Kepala LPMP Provinsi Jawa Tengah Dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

TUGAS

Melaksanakan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

FUNGSI

1. Pemetaan Mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah
2. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan
3. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam menjamin mutu pendidikan
4. Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional
5. Pengembangan dan Pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional
6. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah
7. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP

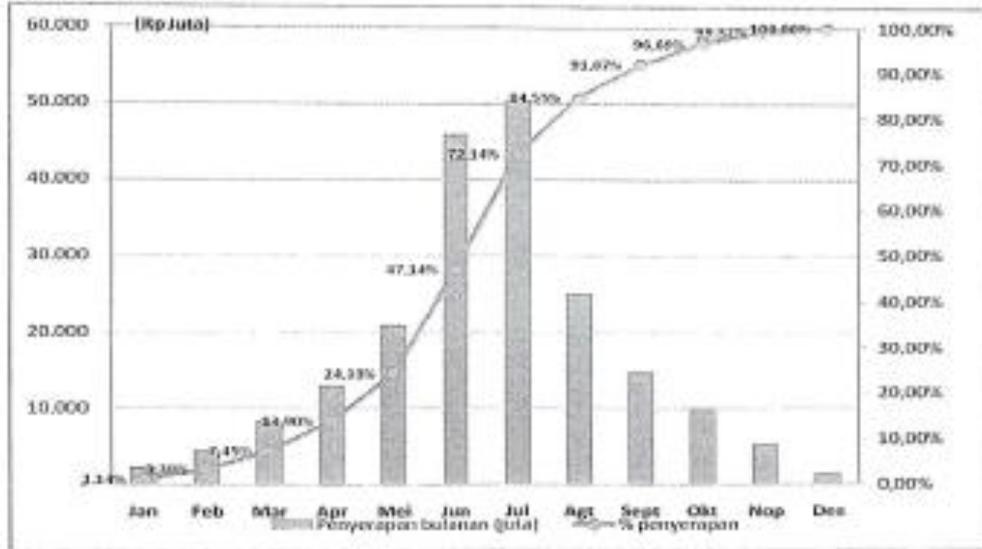
TARGET CAPAIAN

PROGRAM : Pendidikan Dasar dan Menengah

KEGIATAN : Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu Pendidikannya	SD, SMP, SMA, SMK	7.554.066.000,00	
	1	Persentase SD yang telah dipetakan mutunya	100%	5.835.968.000,00
		Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya	40%	
		Output : SD yang terpetakan Mutu Pendidikannya	19.100 SD	
	2	Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya	100%	987.531.000,00
		Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	60%	
		Output : SMP yang terpetakan Mutu Pendidikannya	3.232 SMP	
	3	Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya	100%	260.937.000,00
		Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	60%	
		Output : SMA yang terpetakan Mutu Pendidikannya	854 SMA	
	4	Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya	80%	469.630.000,00
		Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya	45%	
		Output : SMK yang terpetakan Mutu Pendidikannya	1.537 SMK	

Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2017 LPMP Provinsi Jawa Tengah



No	KOMPONEN	Dalam jutaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Oktr	Nov	Des
1	Penyerapan bulanan (Juta)	2.280	4.560	8.200	13.000	21.000	45.800	90.380	25.000	14.750	9.707	5.300	1.303
2	Penyerapan kumulatif (Juta)	2.280	6.840	15.040	28.040	49.040	94.840	145.220	170.220	185.080	194.787	200.087	201.430
3	% penyerapan	1,14%	3,30%	7,45%	13,80%	24,33%	47,14%	72,14%	84,50%	91,67%	95,66%	99,32%	100,00%

EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal Dikdasmen,

Hamid Muhammad

Jakarta, 10 Januari 2017
Kepala LPMP Provinsi Jawa Tengah

Lampiran 2. Revisi PK Tahun 2017



**Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Kepala LPMP Provinsi Jawa Tengah
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah**

TUGAS

Melaksanakan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

FUNGSI

1. Pemetaan Mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah
2. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan
3. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam menjamin mutu pendidikan
4. Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional
5. Pengembangan dan Pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional
6. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah
7. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP

TARGET CAPAIAN

PROGRAM : Pendidikan Dasar dan Menengah

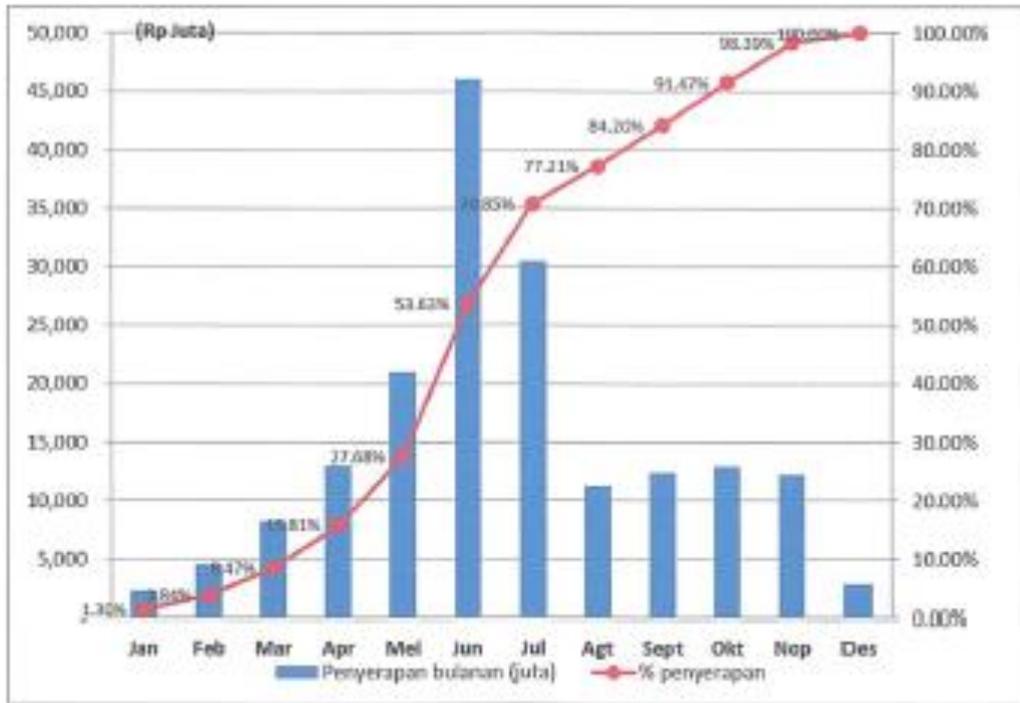
KEGIATAN : Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu Pendidikannya	SD, SMP, SMA, SMK	6.585.645.000,00
	1 Persentase SD yang telah dipetakan mutunya	100%	
	2 Persentase SD yang meningkat	40%	
	indeks efektivitasnya		
	Output : SD yang terpetakan Mutu Pendidikannya	19.100 SD	
	3 Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya	100%	
	4 Prosentase SMP yang meningkat	60%	
	indeks efektivitasnya		
	Output : SMP yang terpetakan Mutu Pendidikannya	3.232 SMP	
	5 Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya	100%	
6 Prosentase SMA yang meningkat	60%		
indeks efektivitasnya			
Output : SMA yang terpetakan Mutu Pendidikannya	854 SMA		
7 Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya	80%		
8 Prosentase SMK yang meningkat	45%		
indeks efektivitasnya			
Output : SMK yang terpetakan Mutu Pendidikannya	1.537 SMK		

Persentase Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP		SD, SMP, SMA, SMK	151.061.097.000,00
9	Persentase SD yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	40%	
	Output : SD yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	350 SD	
	SD yang melaksanakan kurikulum 2013	6823 SD	
10	Persentase SMP yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	40%	
	Output : SMP yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	315 SMP	
	SMP yang melaksanakan kurikulum 2013	1211 SMP	
11	Persentase SMA yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	40%	
	Output : SMA yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	105 SMA	
	SMA yang melaksanakan kurikulum 2013	303 SMA	
12	Persentase SMK yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	40%	
	Output : SMK yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	70 SMK	
	SMK yang melaksanakan kurikulum 2013	682 SMK	

Jumlah alokasi anggaran untuk kegiatan Peningkatan Layanan Pengembangan Mutu Pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan adalah sebesar Rp. 177.052.350.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh milyar lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2017 LPMP Provinsi Jawa Tengah



Dalam jutaan

No	Komponen	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nop	Des
1.	Penyerapan bulanan (juta)	2.300	4.500	8.200	13.000	21.000	45.900	30.500	11.200	12.371	12.879	12.250	2.882
2.	Penyerapan kumulatif (juta)	2.300	6.800	15.000	28.000	49.000	94.900	125.400	136.600	148.971	161.850	174.100	177.000
3.	% penyerapan	1,30%	2,64%	4,81%	15,02%	27,68%	53,82%	70,85%	77,21%	84,20%	91,47%	98,30%	100,00%

EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal Dikdasmen,



Hamid Muhammad



Lampiran 3. Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Realisasi				
				Kinerja	%	Anggaran	%	
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu Pendidikannya		24,723	6,585,645,000	24,723	100%	6,349,811,500	96,42%
	1	Persentase SD yang telah dipetakan mutunya	100%		100%	100%		
	2	Persentase SD yang meningkat indeks efektifitasnya Output : <i>SD yang terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	40%	19,100 SD	99.30%	248.25%	19,100	100%
	3	Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya	100%		100%	100%		
	4	Persentase SMP yang meningkat indeks efektifitasnya Output : <i>SMP yang terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	60%	3,232 SMP	97.90%	163.17%	3,232	100%
	5	Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya	100%		100%	100%		
	6	Persentase SMA yang meningkat indeks efektifitasnya Output : <i>SMA yang terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	60%	854 SMA	98.30%	163.83%	854	100%
	7	Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya	80%		100%	125%		
	8	Persentase SMK yang meningkat indeks efektifitasnya Output : <i>SMK yang terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	45%	1,537 SMK	97.90%	217.56%	1,537	100%
	Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP		9,860 SD,SMP, SMA,SMK	151,061,897,000	10,330	104.77%	150,841,781,168	99,85
	9	Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : <i>SD yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP</i> <i>SD yang melaksanakan kurikulum 2013</i>	40%	494 SD 6,823 SD	88%	220%	585 6,823	118.42% 100%
	10	Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : <i>SMP yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP</i> <i>SMP yang melaksanakan kurikulum 2013</i>	40%	207 SMP 1,211 SMP	79%	197%	249 1,211	120.29% 100.00%

11	Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	40%		69%	172%	
	Output : SMA yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	70 SMA		70	100%	
	<i>SMA yang melaksanakan kurikulum 2013</i>	303 SMA		303	100%	
12	Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	40%		100%	250%	
	Output : SMK yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	70 SMK		70	100.00 %	
	<i>SMK yang melaksanakan kurikulum 2013</i>	682 SMK		1019	149.41 %	

Lampiran 4. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program / Kegiatan

Dana DIPA : Rp 177,052,350,000
 Realisasi : Rp 175,218,238,591
 Keuangan : 98.96%
 Fiskal : 100.00%

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
 Bulan: Desember 2017

Formulir : B.19
 Nama Satker : LPMP JAWA TENGAH

Kode	Uraian	Sasaran		Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Belanja Bansos		Total		Blokir	
		Satuan	Capaian %	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi		%
419519-03	URUP JAWA TENGAH DITEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH			9,778,448,000	8,631,451,948	166,273,570,000	165,589,741,323	1,000,332,000	997,045,320	0	0	177,052,350,000	175,218,238,591	98.96	1,834,111,409
03.06	Program Pendidikan Dasar dan Menengah			9,778,448,000	8,631,451,948	166,273,570,000	165,589,741,323	1,000,332,000	997,045,320	0	0	177,052,350,000	175,218,238,591	98.96	1,834,111,409
5630	Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan			9,778,448,000	8,631,451,948	166,273,570,000	165,589,741,323	1,000,332,000	997,045,320	0	0	177,052,350,000	175,218,238,591	98.96	1,834,111,409
5630.001	Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya	Sekolah	24,723	24,723	100	6,585,645,000	6,349,811,500	0	0	0	0	6,585,645,000	6,349,811,500	96.42	235,833,500
5630.001.001	Sekolah Yang Terverifikasi Data Mutunya			0	0	5,976,976,000	5,805,377,350	0	0	0	0	5,976,976,000	5,805,377,350	97.13	171,598,650
051	Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan			0	0	166,719,000	166,489,100	0	0	0	0	166,719,000	166,489,100	99.86	229,900
051.A	Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan			0	0	160,139,000	160,021,100	0	0	0	0	160,139,000	160,021,100	99.93	117,900
051.B	Sosialisasi dalam pelaksanaan wilayah bebas korupsi			0	0	6,580,000	6,468,000	0	0	0	0	6,580,000	6,468,000	98.3	112,000
052	Bimtek Fasilitator Daerah Pengumpulan Data			0	0	28,974,000	28,914,000	0	0	0	0	28,974,000	28,914,000	99.79	60,000
052.A	BIMBINGAN TEKNIS FASUISATOR DAERAH PENGUMPULAN DATA			0	0	28,974,000	28,914,000	0	0	0	0	28,974,000	28,914,000	99.79	60,000
055	Bimbingan Teknis Pengawas			0	0	3,098,492,000	3,098,435,750	0	0	0	0	3,098,492,000	3,098,435,750	100	56,250
055.A	tanggap sub komponen			0	0	3,098,492,000	3,098,435,750	0	0	0	0	3,098,492,000	3,098,435,750	100	56,250
056	Pelaksanaan Pengumpulan Data			0	0	2,442,231,000	2,380,271,000	0	0	0	0	2,442,231,000	2,380,271,000	97.87	61,960,000
056.A	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA			0	0	2,304,340,000	2,252,380,000	0	0	0	0	2,304,340,000	2,252,380,000	97.75	51,960,000
056.B	PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL SMA/SMK			0	0	137,891,000	137,891,000	0	0	0	0	137,891,000	137,891,000	100	0
057	Verifikasi dan Validasi			0	0	240,560,000	121,267,500	0	0	0	0	240,560,000	121,267,500	50.41	119,292,500
057.A	Verifikasi dan Validasi			0	0	94,445,000	94,413,000	0	0	0	0	94,445,000	94,413,000	99.97	32,000
057.B	Verifikasi dan Validasi Guru ke LPTK			0	0	26,860,000	26,854,500	0	0	0	0	26,860,000	26,854,500	99.98	5,500
057.C	Benchmarking Penjaminan Mutu Pendidikan ke Surabaya, Malang, dan NTT			0	0	119,255,000	0	0	0	0	0	119,255,000	0	0	119,255,000
5630.001.002	Sekolah Terpetakan Mutu Pendidikan			0	0	608,669,000	544,434,150	0	0	0	0	608,669,000	544,434,150	89.45	64,234,850
051	Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data Mutu			0	0	116,910,000	102,955,250	0	0	0	0	116,910,000	102,955,250	88.06	13,954,750
051.A	PENYUSUNAN PETA MUTU DAN PENGOLAHAN DATA MUTU			0	0	116,910,000	102,955,250	0	0	0	0	116,910,000	102,955,250	88.06	13,954,750
052	Analisis Data Mutu			0	0	166,132,000	163,356,000	0	0	0	0	166,132,000	163,356,000	98.33	2,776,000
052.A	ANALISIS DATA MUTU			0	0	166,132,000	163,356,000	0	0	0	0	166,132,000	163,356,000	98.33	2,776,000
053	Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu			0	0	81,197,000	80,203,250	0	0	0	0	81,197,000	80,203,250	98.78	993,750
053.A	Tanggap sub komponen			0	0	81,197,000	80,203,250	0	0	0	0	81,197,000	80,203,250	98.78	993,750
054	Diseminasi Pemetaan Mutu			0	0	244,430,000	197,919,650	0	0	0	0	244,430,000	197,919,650	80.97	46,510,350
054.A	tanggap sub komponen			0	0	244,430,000	197,919,650	0	0	0	0	244,430,000	197,919,650	80.97	46,510,350
5630.003	Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan SNP	Sekolah	841	841	100	14,509,058,000	14,235,148,760	0	0	0	0	14,509,058,000	14,235,148,760	98.11	273,909,240
5630.003.001	Sekolah Model Yang Difasilitasi			0	0	14,335,101,000	14,062,892,560	0	0	0	0	14,335,101,000	14,062,892,560	98.1	272,208,440
051	Verifikasi Sekolah Model			0	0	198,400,000	185,658,775	0	0	0	0	198,400,000	185,658,775	93.58	12,741,225

052.D	Penyusunan Instrumen dan Pengolahan Data Money Pemandangan										25,726,400	25,740,000	25,740,000	99.95	13,600	0
053	Asistensi dan Bantuan Pemerintah										54,753,587,000	54,680,669,872	54,680,669,872	99.87	72,917,128	0
053.A	Asistensi Bantuan Pemerintah										53,228,291,000	53,199,183,266	53,199,183,266	99.95	29,107,734	0
053.B	RAKOR IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 UNTUK SELURUH JENJANG PENDIDIKAN										145,892,500	145,902,000	145,892,500	99.99	9,500	0
053.C	EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANTUAN PEMERINTAH										225,328,500	225,332,000	225,328,500	100	3,500	0
053.D	Rapat Koordinasi/Penguatan Implementasi Kurikulum 2013 dan Penguatan Pendidikan Karakter										63,423,000	63,423,000	63,423,000	99.17	529,000	0
053.E	Honor Sekretaris Kurikulum 2013										325,950,000	325,950,000	325,950,000	99.94	195,000	0
053.F	EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANTUAN PEMERINTAH Pendampingan K13										634,270,000	634,270,000	634,270,000	93.94	38,433,500	0
053.G	Sosialisasi Hasil Supervisi Kurikulum 2013 dengan Kab/Kota										118,330,106	122,969,000	118,330,106	96.23	4,638,894	0
053.H	Workshop Penyusunan Program 2018										7,450,000	7,450,000	7,450,000	100	0	0
054	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah										839,943,750	837,943,750	837,943,750	99.86	1,213,250	0
054.A	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah										472,545,000	472,545,000	472,545,000	100	0	0
054.B	Monitoring dan Evaluasi Kurikulum 2013 Melalui Ujian Sekolah SD										46,210,000	46,210,000	46,210,000	99.79	95,000	0
054.C	Pendistribusian Sertifikat Kurikulum 2013 Dikdas										41,000,000	41,000,000	40,466,250	98.7	533,750	0
054.D	Pendistribusian Modul Kurikulum 2013 Tahun 2016										49,260,000	49,260,000	49,260,000	100	0	0
054.E	Pelaksanaan Supervisi Kurikulum 2013										210,192,000	209,802,500	209,802,500	99.81	389,500	0
054.F	Pendistribusian Sertifikat Kurikulum 2013 bagi Narasumber GS										19,950,000	19,950,000	19,755,000	99.02	195,000	0
054.G	SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013										32,471,557,239	32,471,557,239	32,471,557,239	100.69	-221,743,239	0
051	bimbingan teknis Tim Pengembangan Kurikulum 2013										2,000,162,000	2,000,162,000	1,983,779,250	99.18	16,382,750	0
051.A	BIMBINGAN TEKNIS PENYEGARAN TIM PENGEMBANG KURIKULUM 2013 JENJANG SMP										1,966,388,000	1,950,102,000	1,950,102,000	99.17	16,286,000	0
051.B	CAPACITY BUILDING BAGI NARASUMBER										33,774,000	33,774,000	33,677,250	99.71	96,750	0
052	Pendampingan/Selolah Pelaksana Kurikulum 2013										1,410,817,000	1,410,214,063	1,410,214,063	99.96	602,937	0
052.A	Sosialisasi dan Penandatanganan MoU Pemberian Bantuan pendampingan Kurikulum 2013 Guru Sasaran										248,730,000	248,722,000	248,722,000	100	8,000	0
052.B	Pendampingan Pelaksanaan Pendampingan Kurikulum 2013 Guru Sasaran										659,300,000	658,885,688	658,885,688	99.94	414,312	0
052.C	SOSIALISASI DAN PENDANDA TANGANAN MOU BANTUAN PEMERINTAH PENDAMPINGAN K13										502,787,000	502,606,375	502,606,375	99.96	180,625	0
053	Asistensi dan Bantuan Pemerintah										28,527,315,000	28,767,248,281	28,767,248,281	100.84	-239,933,281	0
053.A	Asistensi Pemberian bantuan K13										27,816,927,000	28,102,075,781	28,102,075,781	101.03	-285,148,781	0
053.B	KOORDINASI PELAKSANAAN PELATIHAN KURIKULUM 2013 DENGAN KABUPATEN/KOTA										58,850,000	58,836,250	58,836,250	99.98	13,750	0
053.C	EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BANTUAN PEMERINTAH										128,816,000	127,464,250	127,464,250	98.95	1,351,750	0

052.B	Pendampingan pelaksanaan Bimtek Guru Sasaran									468,345,766	468,345,766	99.98	74,234	0
052.C	SOSIALISASI DAN PENANDATANGANAN MOU BANTUAN PEMERINTAH PENDAMPINGAN K13									264,876,000	264,876,000	100	0	0
053	Asistensi dan Bantuan Pemerintah									26,247,648,401	26,247,648,401	99.79	54,935,599	0
053.A	Asistensi dan Bantuan Pemerintah									25,980,987,901	25,980,987,901	99.86	36,805,699	0
053.B	Sosialisasi Pelaksanaan Kurikulum 2013 Dengan Dinas Kab/kota									64,102,250	64,102,250	99.86	87,750	0
053.C	EVALUASIDAN PENYUSUNAN LAPORAN BANTUAN PEMERINTAH									65,559,250	65,559,250	100	2,750	0
053.D	EVALUASIDAN PENYUSUNAN LAPORAN BANTUAN PEMERINTAH PENDAMPINGAN K13									136,999,000	136,999,000	88.36	18,040,000	0
054	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah									318,860,000	318,860,000	100	0	0
054.A	tanpa sub komponen									318,860,000	318,860,000	100	0	0
5630.950.001	Layanan Dukungan Manajemen	Layanan	4	4	100					1,412,054,000	1,306,811,670	92.55	105,242,330	0
051	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran									161,985,000	99,528,200	61.44	62,456,800	0
051.B	RAPAT PERSAJAPAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2017									17,972,000	17,972,000	100	0	0
051.C	PENDAMPINGAN PELAKSANAAN ANGGARAN 2017 DENGAN BPKP Tengah									585,000	585,000	1.99	28,835,000	0
051.D	Review Rencana Strategis LPMP Jawa Tengah									24,401,200	24,401,200	94.3	1,473,800	0
051.F	CAPACITY BUILDING PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI									17,000,000	17,000,000	100	0	0
051.G	Mengelola Laman LPMP Jateng									6,000,000	6,000,000	100	0	0
051.H	Rapat Pembentukan Tim Efektif, Data Sarana Prasarana, rancangan awal SIM, Paudhu)									8,020,000	8,020,000	0	8,020,000	0
051.I	Studi Kajian Ke Institusi Layanan Sejenis (PP Paudhu)									8,800,000	8,800,000	0	8,800,000	0
051.J	Penyusunan Desain, SIM, dan Uji coba SIM									43,858,000	28,650,000	65.32	15,208,000	0
051.K	Review POS LPMP Jateng									3,435,000	3,435,000	98.71	45,000	0
051.L	Entry Meeting BPK di LPMP Jateng									1,485,000	1,485,000	95.19	75,000	0
054	Pengelolaan Ketertunaan									270,141,100	270,141,100	99.99	1,654,900	0
054.A	WORKSHOP PENYUSUNAN e SKP									271,796,000	270,141,100	99.99	1,654,900	0
057	Layanan Kemitraan di bidang Penjaminan Mutu Pendidikan									978,273,000	937,142,370	95.8	41,130,630	0
057.B	BIMBINGAN TEKNIS PENGEMBANGAN TIM PMP DAERAH									374,110,000	372,636,400	99.61	1,473,600	0
057.C	EVALUASI PENINGKATAN MUTU KUALITAS SDM PMP									91,496,000	55,216,750	60.35	36,279,250	0
057.D	KOORDINASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017									512,667,000	509,289,220	99.34	3,377,780	0
5630.951.001	Layanan Internal (Overhead)	Layanan	3	3	100					1,000,332,000	997,045,320	99.67	3,286,680	0
995	Layanan Internal									1,000,332,000	997,045,320	99.67	3,286,680	0
995.A	Pengadaan Kendaraan Bermotor tanpa sub komponen									388,000,000	387,800,000	99.95	200,000	0
996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi									324,000,000	323,641,320	99.89	358,680	0
996.A	tanpa sub komponen									324,000,000	323,641,320	99.89	358,680	0
997	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran									288,332,000	285,604,000	99.05	2,728,000	0
997.A	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran									288,332,000	285,604,000	99.05	2,728,000	0

5630.994	Layanan perkantoran	Bulan	12	12	100	9.778.448.000	8.631.451.948	7.213.974.000	7.091.336.985	0	0	0	0	0	16.992.422.000	15.722.788.933	92.53	1.269.633.067	0
5630.994.001	Layanan Perkantoran					9.778.448.000	8.631.451.948	7.213.974.000	7.091.336.985	0	0	0	0	0	16.992.422.000	15.722.788.933	92.53	1.269.633.067	0
001	Gaji dan Tunjangan					9.778.448.000	8.631.451.948	7.213.974.000	7.091.336.985	0	0	0	0	0	9.778.448.000	8.631.451.948	88.27	1.146.996.052	0
001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan					9.778.448.000	8.631.451.948	7.213.974.000	7.091.336.985	0	0	0	0	0	9.778.448.000	8.631.451.948	88.27	1.146.996.052	0
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor					0	0	2.738.028.000	2.736.859.887	0	0	0	0	0	2.738.028.000	2.736.859.887	99.96	1.168.113	0
002.A	Kebutuhan Sehari-hari Kantor					0	0	1.481.219.000	1.480.907.600	0	0	0	0	0	1.481.219.000	1.480.907.600	99.98	311.400	0
002.B	Langganan Daya dan Jasa					0	0	1.595.747.000	1.555.584.971	0	0	0	0	0	1.595.747.000	1.555.584.971	97.48	40.162.029	0
002.C	Pemeliharaan Kantor					0	0	2.738.028.000	2.736.859.887	0	0	0	0	0	2.738.028.000	2.736.859.887	99.96	1.168.113	0
002.D	Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor					0	0	1.398.980.000	1.317.984.527	0	0	0	0	0	1.398.980.000	1.317.984.527	94.21	80.995.473	0
	TOTAL					9.778.448.000	8.631.451.948	166.273.570.000	165.589.741.323	1.000.332.000	997.045.320	0	0	0	177.052.350.000	175.218.238.591	98.96	1.834.111.409	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPI DAN BUN
TAHUN 2017
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARALINGKAR : KEMENTERIAN PERSEKUTUAN DAN KEBUDUKHTYAN
 DESKON I : 03 DEJEN POKDOKORAN DASAR DAN BENEHGAH
 WILAYAHKOROPINSI : 0303 JAWA TENGAH
 SATUAN KERJA : 4199/03 LPMP JAWA TENGAH
 JENIS SATUAN KERJA : K3 KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LPIBIST 01
 Tanggal : 25 Januari 2018
 Halaman : 0
 Prog.id : h_10100000

KODE	LOKASI	ANGGARAN PEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TAHUN 04	JUMLAH RP/TAHUN 04	PERFORMAN 04	JUMLAH RP/04 TAHUN 04		
1	JUMLAH BELANJA (TRIMBANGI RAS) DAN TRIMBANGI RAS RAS	207.400.000.000	177.000.000.000	174.873.218.987	6	7	8	9	3.481.218.975
				174.873.218.987		1.200.000.000	173.673.218.987	84,79	

Lampiran 5. Jumlah Sekolah di Provinsi Jawa Tengah

No	PROVINSI	BENTUK PENDIDIKAN					
		SD	SMP	SLB	SMA	SMK	JML
Prop. Jawa Tengah		19,100	3,232	172	854	1,537	24,895
1	Kab. Banjarnegara	645	96	3	13	25	782
2	Kab. Banyumas	813	151	3	37	76	1080
3	Kab. Batang	456	71	1	15	27	570
4	Kab. Blora	598	89	4	22	55	768
5	Kab. Boyolali	600	91	11	32	42	776
6	Kab. Brebes	890	142	2	31	90	1155
7	Kab. Cilacap	1028	198	6	41	64	1337
8	Kab. Demak	491	82	2	34	56	665
9	Kab. Grobogan	820	138	4	36	56	1054
10	Kab. Jepara	599	86	1	22	48	756
11	Kab. Karanganyar	497	78	10	14	35	634
12	Kab. Kebumen	801	112	5	25	66	1009
13	Kab. Kendal	571	101	5	32	48	757
14	Kab. Klaten	774	109	12	28	55	978
15	Kab. Kudus	448	48	5	17	27	545
16	Kab. Magelang	604	127	3	35	44	813
17	Kab. Pati	675	83	3	25	44	830
18	Kab. Pekalongan	520	83	1	17	32	653
19	Kab. Pemasang	768	114	2	23	51	958
20	Kab. Purbalingga	465	77	1	16	31	590
21	Kab. Purworejo	523	90	3	23	43	682
22	Kab. Rembang	374	53	2	14	24	467
23	Kab. Semarang	509	96	7	25	43	680
24	Kab. Sragen	575	91	7	25	54	752
25	Kab. Sukoharjo	472	70	5	27	31	605
26	Kab. Tegal	718	103	2	25	62	910
27	Kab. Temanggung	432	74	1	15	23	545
28	Kab. Wonogiri	773	119	7	21	46	966
29	Kab. Wonosobo	481	96	3	17	28	625
30	Kota Magelang	75	21	4	12	20	132
31	Kota Pekalongan	98	27	3	9	13	150
32	Kota Salatiga	98	25	7	9	20	159
33	Kota Semarang	515	186	19	72	88	880
34	Kota Surakarta	254	75	17	34	50	430
35	Kota Tegal	140	30	1	11	20	202